



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERHUBUNGAN DARAT

B-X-46

Surat Dari	:	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha
Nomor Surat	:	
Tanggal Surat	:	
Perihal	:	Permohonan Persetujuan Konsep Dokumen Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Diterima Tanggal	:	12/10/2023
Diterima Pukul	:	09 : 31 WIB
No Agenda	:	B-X-46

☐	KSD 1	SUBDIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
☐	KSD 2	SUBDIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
☐	KSD 3	SUBDIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
☐	KSD 4	SUBDIREKTORAT KEPENGUSAHAAN
☒	KSB	KASUBBAG TATA USAHA
☐		SESPRI
☐		PARA PPK

ISI DISPOSISI

☐ Tindak Lanjuti	☐ Untuk Diketahui
☐ Tanggapan/Saran	☐ Untuk Dipelajari & Laporkan
☐ Harap Mewakili	☐ Untuk Diselsaikan & Laporkan
☐ Hadir Bersama Saya	☐ Untuk Dilaksanakan & Laporkan
☐ Siapkan Bahan	☐ Untuk Dikoordinasikan
☐ Jadwalkan	☐ Untuk Disiapkan
☐ Hadiri	☐ Sangat Segera
☐ Segera	☐ Untuk Ditanggapi

CATATAN DISPOSISI

SUSANTY PERTIWI
PLT. DIREKTUR PRASARANA TJ



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
Email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

NOTA DINAS

Nomor 373/TU-DPTJ/X/2023

Kepada Yth. : Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Dari : Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha
Hal : Permohonan Persetujuan Konsep Dokumen Laporan
Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tanggal : 12 Oktober 2023

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini terlampir kami sampaikan Konsep Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan III Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Demikian kami sampaikan, mohon perkenan dan arahan lebih lanjut.

Sudarmaji, SAP., MM
NIP. 19720814 199803 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

**TRIWULAN III
2023**



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ, S.T.	Penyusun Data Kepegawaian	9/10 ²³	
2.	Diperiksa	Sudarmaji, S.A.P.,M.M.	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	12/10 ²³	
3.	Disetujui	Susanty Pertiwi	Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan	13/10 ²³	



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	M. Alhafiq Wahyu Nabillah, S.T	Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan, Seksi Rancang Bangun Terminal	9/10 ²³	
2.	Diperiksa	Susiani,A.Md LLAJ, ST, MT	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	10/10 ²³	
3.	Diperiksa	Y Prihantoko, S.T., M.Sc.	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	10/10 ²³	
4.	Disetujui	Ahmadi Z.B., ATD, S.E., M.M.	Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	11/10 ²³	



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Syifa Azzaria, S.Stat	Ahli Pertama - Statistisi, Seksi Rancang Bangun PKB	9/10 ²³	
2.	Diperiksa	Dluha My Praba, MT	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	10/10 ²³	
3.	Diperiksa	Ayu Nilawati Agustina, SE., M.MTr.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	11/10 ²³	
4.	Disetujui	Eriza Putra, S.Si, M.M.	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	12/10 ²³	



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023**

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Dwiki Adhitya, S.ST.	Penyusun Rencana dan Program, Seksi Integrasi Moda	10/10 ²³	
2.	Diperiksa	Jekky Hendri, S.Sos	Ketua Tim Kelompok Substansi Integrasi Moda, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	10/10 ²³	
3.	Diperiksa	Astri Widiani, A.Md LLAJ, S.E.	Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	11/10 ²³	
4.	Disetujui	Herman Armanda, S.E., M.T.	Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	11/10 ²³	



**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023**

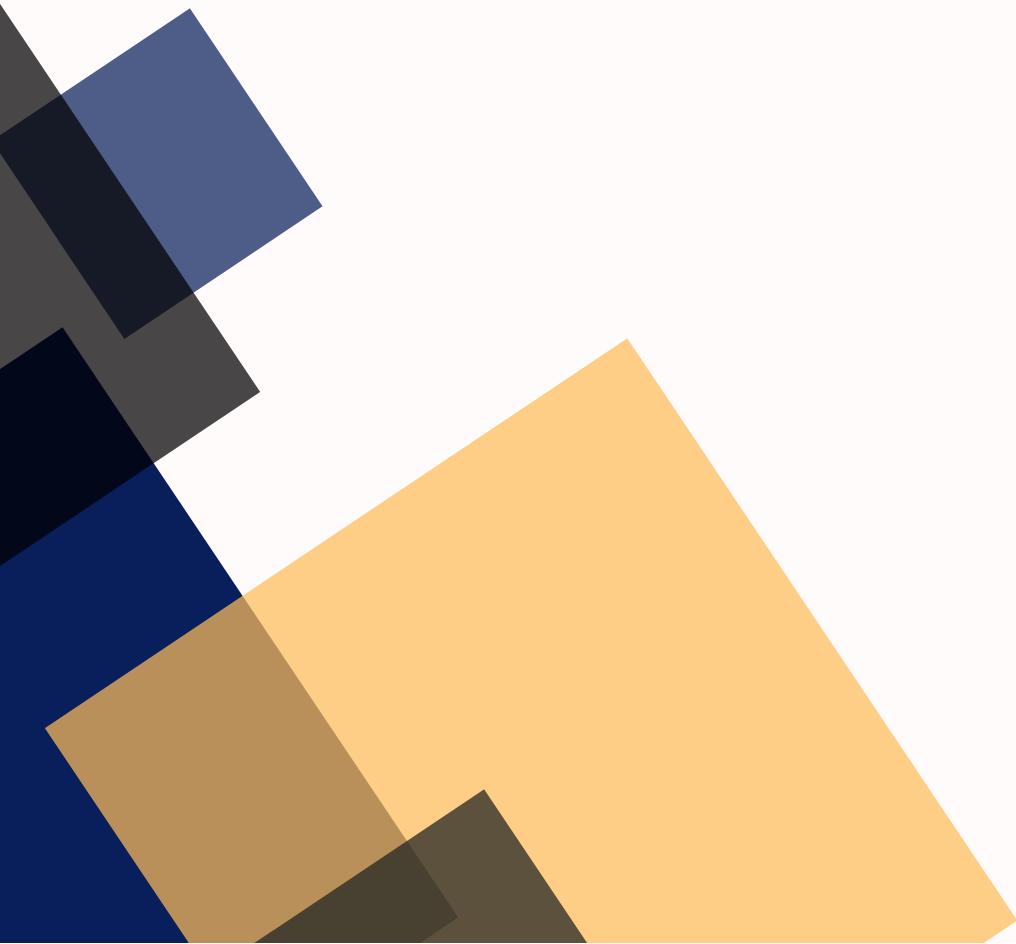
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Danny Muhammad Muflih, A.Md LLAJ, S.SiT	Penyusun Bahan Usaha, Seksi Pengawasan dan Evaluasi	9/10 ²³	
2.	Diperiksa	Diana Septi Rahayu, S.E., M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	11/10 ²³	
3.	Diperiksa	Rizki Fauzi Rahman, S.SiT, M.Si.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	12/10 ²³	
4.	Disetujui	Susanty Pertiwi	Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	12/10 ²³	



KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat. Sebagai institusi publik, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2023.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 12 Oktober 2023

Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan



Susanty Pertiwi

NIP. 19740720 199703 2 001

KATA PENGANTAR

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat. Sebagai institusi publik, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2023.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 12 Oktober 2023

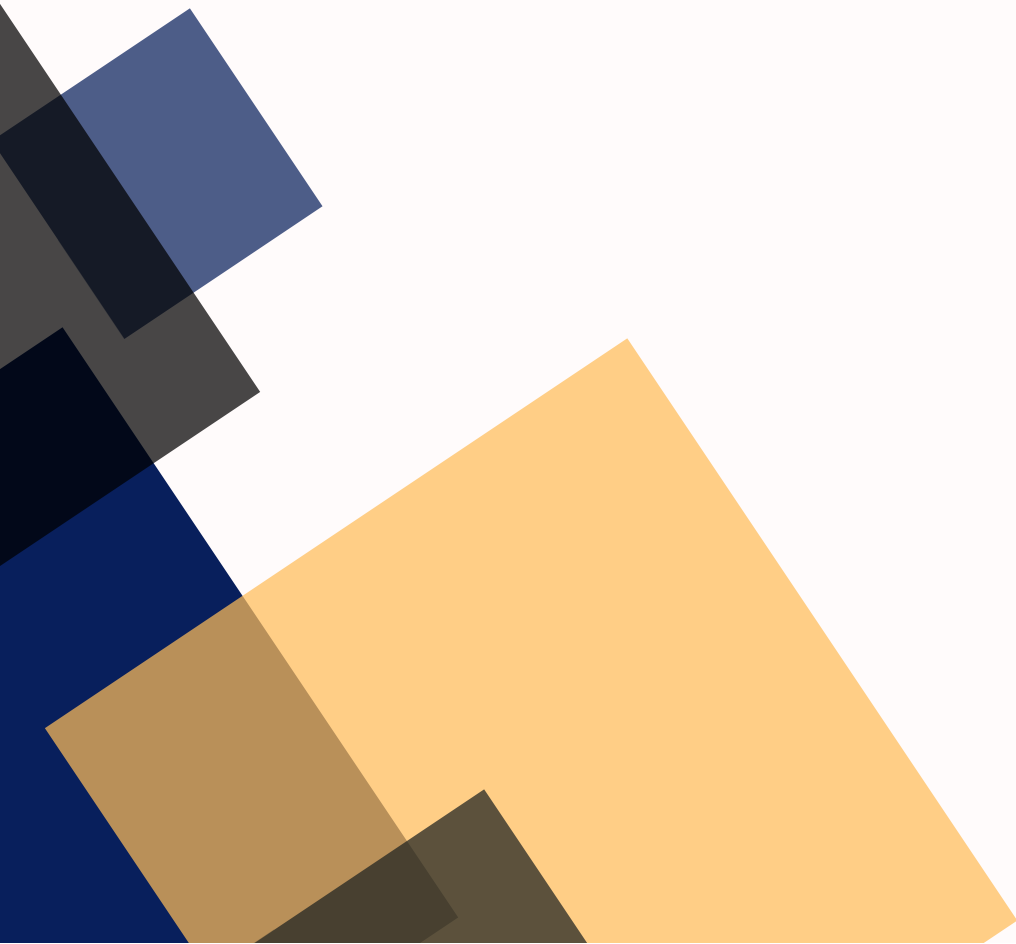
Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan



Susanty Pertiwi
NIP. 19740720 199703 2 001



RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024, untuk mendukung tercapainya target Rencana Strategis tersebut, maka dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2023, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2023, secara keseluruhan kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023, terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($SK \geq 100\%$) dan 2 (dua) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq SK < 100\%$).

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2023, Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dari **9 (sembilan)** IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat **8 (delapan)** IKK dengan **status hijau** dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan **1 (satu)** **status merah** dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan III tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$):

1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terealisasi **0,62** (target tahun 2023 sebesar 0,62), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi terealisasi sebesar **108** lokasi (target tahun 2023 sebesar 105 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **102,86%**;
3. Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terealisasi sebesar **12** lokasi (target tahun 2022 sebesar 12 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
4. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **97,54%** (target tahun 2023 sebesar 81,00) dengan Capaian Kinerja sebesar **120,42%**;
5. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **59,02%** (target tahun 2023 sebesar 53,7%), dengan capaian kinerja sebesar **109,91%**;
6. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A terealisasi **81,75%** (target tahun 2023 sebesar 78,6%), dengan capaian kinerja sebesar **104,01%**;
7. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terealisasi sebesar **24,99%** (target tahun 2023 sebesar 25%), dengan capaian kinerja sebesar **100,04%**.
8. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terealisasi **75,39** (target tahun 2023 sebesar 73), dengan capaian kinerja sebesar **103,27%**;

Indikator Kinerja Kegiatan dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$) :

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebesar **84** (target tahun 2023 sebesar 88), dengan capaian kinerja sebesar **95,45%**;

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran Kinerja adalah sebesar **102,23%** dan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja kegiatan adalah sebesar **104,00%**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara berkala.

Daftar Isi

DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN.....	6
I.1 Latar Belakang	6
I.2 Tugas Pokok dan Fungsi	6
I.2.1 Bagan Struktur Organisasi	7
I.3 Sumber Daya Manusia	8
I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	8
I.5 Sistematika Laporan	9
1.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	14
I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan 2023	15
I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	15
I.7.1 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja.....	19
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja.....	19
II.2.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	23
II.2.2 SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	47
II.2.3 SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	78
II.2.4. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat... 83	
II.2.5 SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	94
II.3 Realisasi Anggaran	102
II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2023	102
II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023	108
II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	112
BAB III PENUTUP	116
III.1 Penutup	116
III.1.1 Ringkasan Capaian	116
III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar I 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.....	7
Gambar II 2 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	26
Gambar II 3 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada tahun 2023).....	34
Gambar II 4 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada tahun 2023).....	43
Gambar II 5 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A).....	53
Gambar II 6 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A).....	64
Gambar II 7 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 3 Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A)	75
Gambar II 8 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan III tahun 2023).....	80
Gambar II 9 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023)	86
Gambar II 10 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023)	98
Gambar II 11 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2023.....	107

DAFTAR TABEL

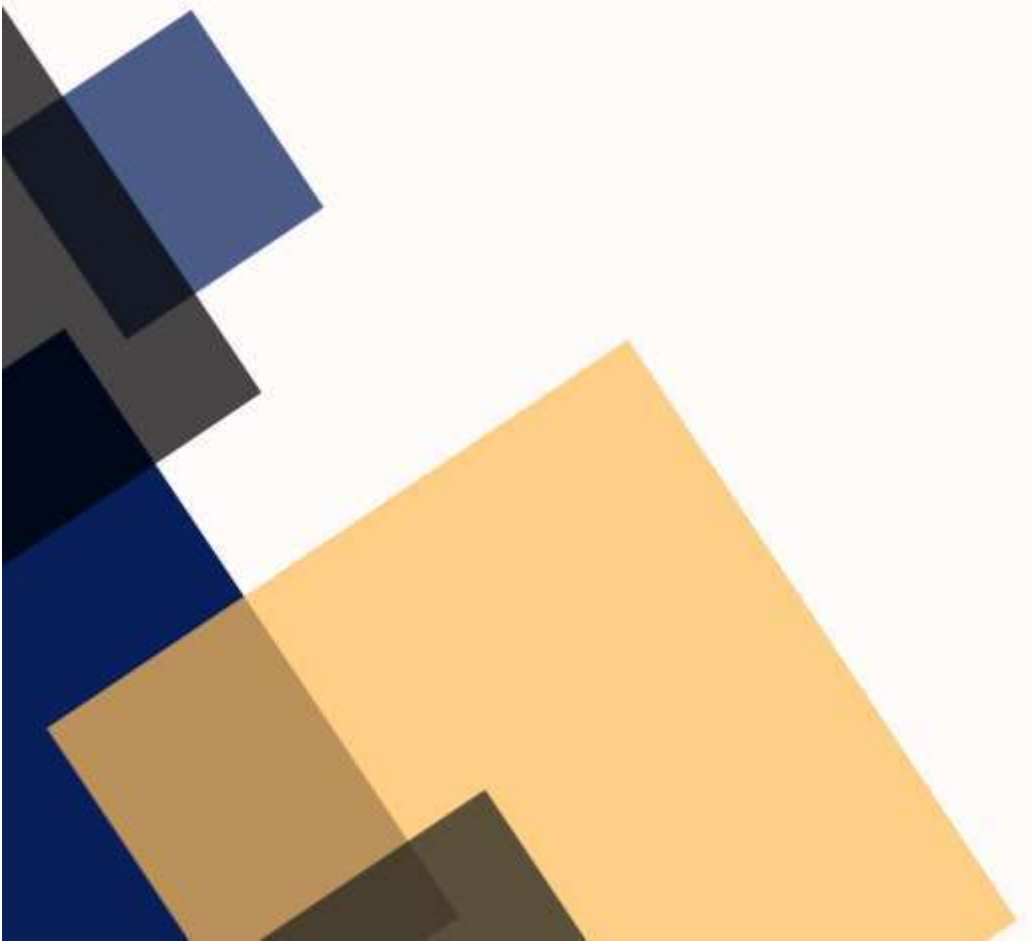
Tabel I 1	Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	8
Tabel I 2	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024	14
Tabel I 3	Rencana Kinerja Tahunan 2023	15
Tabel I 4	Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023	16
Tabel II 1	Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023	21
Tabel II 2	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	23
Tabel II 3	Capaian Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	24
Tabel II 4	Realisasi Anggaran	32
Tabel II 5	Capaian Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	33
Tabel II 6	Realisasi Anggaran	39
Tabel II 7	Capaian Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	40
Tabel II 8	Realisasi Anggaran	46
Tabel II 9	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	47
Tabel II 10	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	48
Tabel II 11	Nilai Resepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan	51
Tabel II 12	Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	56
Tabel II 13	Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015	58
Tabel II 14	Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan	64
Tabel II 15	Realisasi Anggaran	72
Tabel II 16	Capaian Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	73
Tabel II 17	Realisasi Anggaran	77
Tabel II 18	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	78
Tabel II 19	Capaian Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	78
Tabel II 20	Realisasi Anggaran	82
Tabel II 21	Capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	83
Tabel II 22	Perhitungan Nilai Bobot pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	84
Tabel II 23	Keberhasilan Capaian Indikator Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	87
Tabel II 24	Realisasi Anggaran	90
Tabel II 25	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	94
Tabel II 26	Capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	94
Tabel II 27	Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran	95
Tabel II 28	Realisasi Anggaran	101
Tabel II 29	Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2023	102
Tabel II 30	Rincian per Sumber Dana Pagu Triwulan III TA. 2023	102

Tabel II 31	Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2023	102
Tabel II 32	Rincian per Jenis Belanja Pagu Triwulan III TA. 2023	102
Tabel II 33	Histori Revisi Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2023	103
Tabel II 34	Histori Revisi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023	103
Tabel II 35	Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023	104
Tabel II 36	Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2023	105
Tabel II 37	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2023 (Triwulan III)	107
Tabel II 38	Kegiatan Program yang ada dalam DIPA.....	108
Tabel II 39	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III 2023.....	109
Tabel II 40	Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan I-II 2023	111
Tabel II 41	Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan III 2023.....	111
Tabel II 42	Efisiensi Anggaran	112
Tabel II 43	Perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM	114



BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

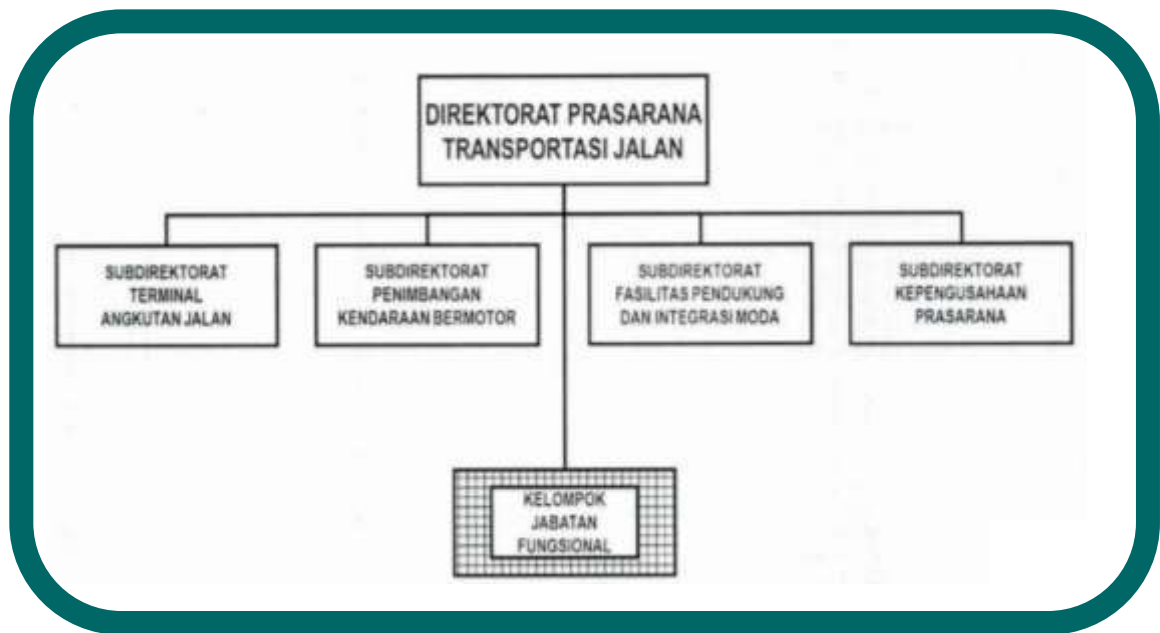
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan;
2. Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;
4. Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana;

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Gambar I 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan



I.3 Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan posisi Tahun 2023 diklasifikasikan menurut sub unit kerja sebanyak **81 orang** pegawai, Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I 1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

NO.	SUB UNIT KERJA	PNS	CPNS	PPNPN	JUMLAH
1.	Kelompok Tata Usaha	7	-	7	14
2.	Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan	13	-	3	16
3.	Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	13	-	7	20
4.	Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	13	-	5	18
5.	Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana	10	-	3	13
Jumlah		56	-	25	81

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - i Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - ii Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - iii Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - i Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen).
 - ii Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai target, sasaran dan tujuan organisasi, perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya, meliputi ketersediaan SDM yang ideal sesuai dengan beban kerja yang ada pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Prasarana Transportasi Jalan hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat dengan DIPA Awal Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada T.A. 2023 sebesar Rp. 58.794.522.000 dan DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada Triwulan III T.A. 2023 Rp.48.625.190.000,-.

4. Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah:

- a) Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
- b) Pengoperasian Terminal Penumpang;
- c) ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
- d) Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB;

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Triwulan III Tahun 2023 adalah:

- a) Rencana Strategis;
- b) Perjanjian Kinerja;
- c) Indikator Kinerja Kegiatan;
- d) Pengukuran Kinerja;
- e) Evaluasi Kinerja

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I. 3. Sumber Daya Manusia
- I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I. 5. Sistematika Laporan
- I. 6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

GA Program Infrastruktur Konektivitas

II.2.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

II.2.1.1 IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.2 IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.3 IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2 SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

II.2.2.1 IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2.2 IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2.3 IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3 SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

II.2.3.1 IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.4 SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

II.2.4.1 IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5 SK1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

II.2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum

- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2023

II.3.1.1 Pagu Anggaran

- a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2023
- a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2023
- a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

II.3.1.2 Refocusing Anggaran Tahun 2023

- a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023
- a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023
- a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023
- a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2023

II.3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2023

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

- II.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2023
- II.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023
- II.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023
- II.3.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- II.3.3.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan
- II.3.3.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)
- II.3.3.3 Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
3. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
4. Rencana Aksi Tahun 2023 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
5. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2023 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
6. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023
7. Lain – lain yang dianggap perlu.

1.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan target indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Sasaran Program Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar dapat bersinergi dalam mendukung tercapainya Sasaran Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0.58	0.61	0.67	0.67	0.70
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	104	104	111	111	114
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	4	9	15	20	25
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	79.50	80.00	80.50	81.00	81.50
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53.57	53.60	53.65	53.70	53.75
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	70.35	71.03	74.15	78.60	83.38
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	50.0	35.0	30.0	25.0	20.0
WA Program Dukungan Manajemen										
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	85	86	87	88	89
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	70	71	72	73	74

I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan 2023

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 terdiri dari Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I 3 Rencana Kinerja Tahunan 2023

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2023
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,67
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	20
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,70
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,60
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	25
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73

I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2023 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Program Infrastruktur Konektifitas dan Program Dukungan Manajemen dengan Total Anggaran per 1 Januari 2023 sebesar Rp. 58.794.522.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I 4 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2023
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,70
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,60
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73

Kegiatan**Anggaran**

1. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp25.227.734.000,00
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp 9.070.700.000,00
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp 23.746.088.000,00
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp 27.218.804.000,00

I.7.1 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2023 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan adanya perubahan pimpinan sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : ST-DRJD 624 Tahun 2023 perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan adanya perubahan anggaran sebagaimana revisi ke 03 DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor: DIPA-022.03.1.352597/2023 tanggal 14 Agustus 2023 maka Perjanjian Kinerja Tahun 2023 perlu dilakukan revisi.

Berdasarkan Revisi ke 03 DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan untuk Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen dengan Total Anggaran per 14 Agustus 2023 sebesar Rp. 48.625.190.000,-.

Program yang akan digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah Program Infrastruktur Konektivitas dengan pagu awal sebesar Rp25.227.734.000,00 pada revisi ke 03 DIPA menjadi sebesar Rp25.022.676.000,00 dan Program Dukungan Manajemen dengan pagu awal sebesar Rp33.566.788.000,00 pada revisi ke 03 DIPA menjadi sebesar Rp23.602.514.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I 5 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2023
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,70
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,60
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp 25.022.676.000,00 |
| 2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat | Rp 411.500.000,00 |
| 3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp 22.506.477.000,00 |
| 4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat | Rp 684.537.000,00 |

The background features several large, overlapping geometric shapes in shades of orange, blue, and grey. In the top-left corner, there is an orange L-shaped graphic. In the top-right corner, there is a cluster of overlapping orange, blue, and grey shapes. In the bottom-left corner, there is another cluster of overlapping blue, grey, and orange shapes. In the bottom-right corner, there is a dark blue L-shaped graphic.

BAB II

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dimasa mendatang.

• Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:


$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023**

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
4. Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja digunakan Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan Aplikasi *E-Performance*, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel II 1 Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3		
					T	R	C	T	R	C	T	R	C
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					100,00%			100,63			100,95%	
IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62	0,62	0,62	100,00%	0,62	0,62	100,00%	0,62	0,62	100,00%	
IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105	105	105	100,00%	105	107	101,90%	105	108	102,86%	
IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12	12	12	100,00%	12	12	100,00%	12	12	100,00%	
SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat					110,54%			109,65%			111,44%	
IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00	81,00	93,64	115,60%	81,00	93,19	115,05%	81,00	97,54	120,42%	
IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,70	53,70	59,02	109,91%	53,70	59,02	109,91%	53,70	59,02	109,91%	
IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,60	78,60	83,41	106,12%	78,60	81,75	104,01%	78,60	81,75	104,01%	
SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat					73,24%			82,36%			100,04%	
IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	25	25	31,69	73,24%	25	29,41	82,36%	25	24,99	100,04%	
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					94,32%			94,32%			95,45%	
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88	88	83	94,32%	88	83	94,32%	88	84	95,45%	
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					102,00%			102,71%			103,10%	
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73	73	74,58	102,16%	73	74,98	102,72%	73	75,39	103,27%	
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan												102,23%	
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan												104,00%	
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)					7			7		8			
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)					2			2		1			

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

Jika dilihat lebih detail, pada Tahun 2023, berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dari 9 IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 8 (delapan) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%) dan 1 (satu) status merah dengan kondisi kurang dari 100% (0%≤IKP<100%).

Selama tahun 2023, terdiri 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya terdapat 9 (sembilan) IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

II.2.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

• Uraian Kegiatan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengawal dan memastikan kegiatan prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi.

Tabel II 2 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						
IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,62			
		Target		0,62	0,62	0,62
		Realisasi		0,62	0,62	0,62
		Capaian		100,00%	100,00%	100,00%
IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	105			
		Target		105	105	105
		Realisasi		105	107	108
		Capaian		100,00%	101,90%	102,86%
IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	lokasi	12			
		Target		12	12	12
		Realisasi		12	12	12
		Capaian		100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan.
2. IKK 2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi
3. IKK 3. Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda

II.2.1.1 IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 3 Capaian Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi			
IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan			Satuan: Rasio
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Tahun 2023
Target	0,62	0,62	0,62	
Realisasi	0,62	0,62	0,62	
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah perbandingan jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang direncanakan untuk diakomodir dan dilayani prasarana transportasi jalan.

Jumlah KSN Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah jumlah KSN Prioritas yang di dalam wilayah administrasinya (kabupaten/kota) terdapat prasarana transportasi jalan yang beroperasi.

Simpul prasarana transportasi jalan adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda transportasi jalan yang berupa terminal tipe A, terminal barang serta fasilitas pendukung dan integrasi moda yang berupa halte.

Untuk menghitung IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun}(n)(10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional } (10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang ditetapkan}}$$

Keterangan:

Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk diakomodir akan dilayani prasarana transportasi jalan dan meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN. Adapun daftar Kawasan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut terdiri dari:

10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

1. KSPN Danau Toba;
2. KSPN Bangka Belitung;

3. KSPN Borobudur;
4. KSPN Bromo Tengger Semeru;
5. KSPN Mandalika;
6. KSPN Labuan Bajo;
7. KSPN Likupang;
8. KSPN Wakatobi;
9. KSPN Morotai;
10. KSPN Raja Ampat.

9 Kawasan Industri (KI)

1. KI Sei Mangkei;
2. KI Galang Batang;
3. KI Bintan Aerospace;
4. KI Sadai;
5. KI Ketapang
6. KI Surya Borneo;
7. KI Palu;
8. KI Teluk Weda;
9. KI Teluk Bintuni

8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1. KPBPB Sabang;
2. KEK Arun Lhokseumawe;
3. KPBPB Batam Bintan Karimun;
4. KEK Tanjung Lesung;
5. KEK Mandalika*;
6. KEK MBTK;
7. KEK Bitung;
8. KEK Morotai;

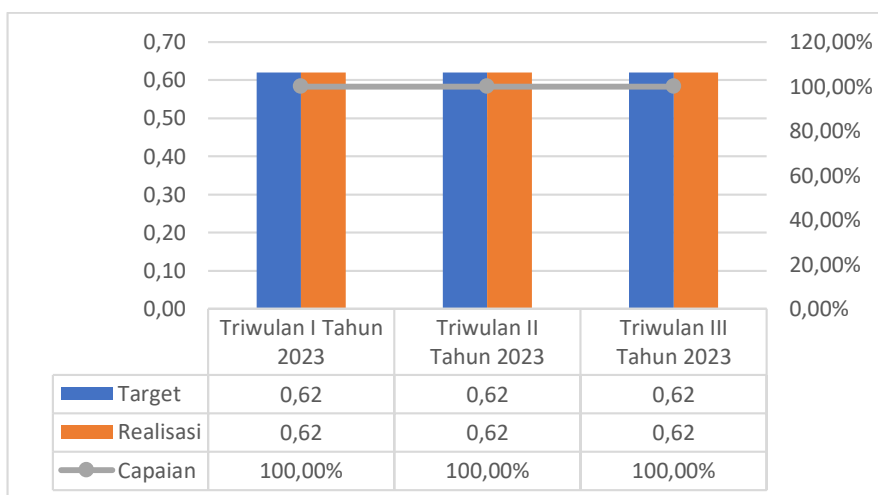
42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional:

1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;
7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;
11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;
17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;

21. Gerbangkertosusilo;
22. Malang;
23. Sarbagita;
24. Mataram Raya;
25. Kupang;
26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;
29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;
30. Tarakan;
31. Gorontalo;
32. Manado;
33. Bitung;
34. Palu;
35. Maminasata;
36. Kendari;
37. Ambon;
38. Ternate;
39. Sorong;
40. Timika;
41. Jayapura;
42. Merauke.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan pada Triwulan III tahun 2023 sebesar 0,62 jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2023 sebesar 0,62 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.1**. Grafik Capaian IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan.



Gambar II 2 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan Tahun 2023)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, terdapat sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Umum dan Fasilitas Prasarana Jalan serta Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyeberangan. Dari total Kawasan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melayani 83 Kawasan Strategis Nasional.

a) Terminal Penumpang Tipe-A

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia dan KM 100 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia, jumlah Terminal Penumpang Tipe A adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) terminal.

Dari 127 Terminal Penumpang Tipe A tersebut terdapat 55 (lima puluh lima) Terminal Penumpang Tipe A telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Kawasan (Lampiran 9) dari 69 (enam puluh sembilan) Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 9 (sembilan) Kawasan Industri (KI), 8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 42 (empat puluh) Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sisanya 72 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas transportasi darat karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional.

b) Terminal Barang Untuk Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:

1. KP 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum dan Terminal Transit Penumpang di Entikong Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat **(Lampiran 2)**;
2. KM 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau yang Berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat **(Lampiran 3)**;
3. KM 45 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk yang Berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat **(Lampiran 4)** dan;
4. KM 139 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum yang Berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua **(Lampiran 5)**.

Berikut adalah jumlah Terminal Barang untuk umum sebanyak 7 Terminal, antara lain:

1. Entikong di Kalimantan Barat;
2. Skouw di Papua. (PKN Jayapura)
3. Aruk di Kalimantan Barat;
4. Nanga Badau di Kalimantan Barat;
5. Motaain di Nusa Tenggara Timur;
6. Motamasin di Nusa Tenggara Timur;
7. Wini di Nusa Tenggara Timur;

Dari 7 Terminal Barang untuk Umum yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan tersebut di atas terdapat 1 (satu) Terminal Barang untuk Umum yang telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak 1 (satu) Kawasan (Lampiran 9) dari 69 (enam puluh sembilan) Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 9 (sembilan) Kawasan Industri (KI), 8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 42 (empat puluh) Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sisanya sebanyak 6 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional dan/atau belum beroperasi.

c) Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 (**Lampiran 6**);
2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (**Lampiran 7**) dan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 (**Lampiran 8**).

Terdapat penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda berupa halte di **Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional** sebanyak **6 lokasi, yaitu :**

1. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika dan Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika (mendukung penyelenggaraan Moto GP tahun 2022);
2. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru;
3. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba;
4. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur;
5. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo;
6. Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema *Buy The Service* di Denpasar.

• Narasi Kronologi Target

Berdasarkan target pada renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, untuk target pada tahun 2023 adalah sebesar 0,67 dengan target 47 KSN terlayani oleh simpul Prasarana Transportasi Jalan disesuaikan dengan kegiatan pada DIPA TA 2023 menjadi 0,62 dengan target 43 KSN terlayani simpul Prasarana Transportasi Jalan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan setelah disesuaikan dengan realisasi capaian kinerja dimana terdapat 43 kawasan yang terlayani oleh simpul prasarana transportasi jalan sehingga pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, telah dilakukan revisi target menjadi 0,62 karena belum ada penambahan simpul lokasi baru pada Kawasan Strategis Nasional.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan terhadap kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan tahun 2023 yaitu:

1. Dari 127 Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia sebagaimana diubah dengan KM 100 Tahun 2023 terdapat **55 (lima puluh lima)** Terminal Penumpang Tipe A telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak **39 (tiga puluh sembilan) Kawasan (Lampiran 9)** dari 69 (enam puluh sembilan) Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari **10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)**, **9 (sembilan) Kawasan Industri (KI)**, **8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** dan **42 (empat puluh) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**. Sisanya 72 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas transportasi darat karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional.
2. Dalam pelaksanaannya sampai dengan Triwulan III tahun 2023, Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dapat terealisasi sebanyak 6 lokasi, yaitu Mandalika, Pekanbaru, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Denpasar. Penambahan realisasi pada akhir tahun 2022, yaitu adanya penambahan pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo;
3. Adanya Kegiatan Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan dan Survey dan Monitoring Simpul-Simpul Transportasi di KSPN;

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu:

1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2023 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 Terminal menjadi 107 untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum.
2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan *excellent service*.
3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Barang Umum yaitu:

1. Mengoperasikan Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai dibangun meskipun kendaraan barang belum ada yang masuk terminal supaya bangunan tetap terawat dengan baik;
2. Tetap melanjutkan progres pembangunan Terminal Barang Untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan diprioritaskan pada Terminal Barang Untuk Umum yang memiliki permintaan/*demand* yang cukup besar;
3. Koordinasi dengan pihak terkait khususnya instansi yang membidangi *Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS)* dikarenakan operasional Terminal Barang Untuk Umum yang menangani ekspor impor harus memiliki izin ICQS.

Keberhasilan Ketersediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berhasil dicapai sampai dengan tahun 2023 yaitu :

1. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan *event* MotoGP dengan melakukan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Mandalika melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali dengan melakukan Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema *Buy The Service* di Denpasar melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Penentuan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional;
4. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas.

● **Narasi Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan**

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Terminal Penumpang Tipe A** antara lain:

1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A.
2. Terdapat *backlog* kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan.
3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan.

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Terminal Barang Umum** antara lain (3 point):

1. Terdapat kendala operasional kendaraan barang belum masuk ke terminal dikarenakan kesepakatan dengan negara lain masih dalam proses administrasi, pembangunan jalan khusus belum selesai dibangun dan penetapan pengelola yang terkendala masalah lahan.
2. Terdapat *backlog* kegiatan pembangunan Terminal Barang Untuk Umum lanjutan karena keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan tidak dapat dilaksanakan pada semua terminal yang belum selesai dibangun.
3. Operasional kendaraan barang masuk ke Terminal Barang Untuk Umum tergantung pada kesepakatan antara 2 negara terkait Standar Operasional Prosedur ekspor-impor komoditi.

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda** antara lain:

1. Koordinasi perizinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada di atas bahu jalan;
2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung;
3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda

- **Narasi Realisasi Kinerja**

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan merupakan perbandingan Jumlah KSN Prioritas yang telah terlayani prasarana transportasi jalan pada Kawasan Prioritas Nasional terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

Sehingga:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun(n)} (10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN})}{\text{yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}} \\ &= \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional } (10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional } (10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang ditetapkan}} \\ \text{Capaian Rasio Konektivitas} &= \frac{43 \text{ wilayah (irisan simpul TTA \& faspim yang terlayani)}}{69 \text{ wilayah KSN}} = 0,62 \end{aligned}$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan Triwulan III Tahun 2023 terhadap target Revisi I PK Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,62}{0,62} \times 100\% = 100,00\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah sebagai berikut:

Tabel II 4 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW III	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas								
SK 1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi								
IKK 1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	1.038.351.000	1.034.056.000	293.301.790	28,25%	420.605.860	40,51%	802.479.655	77,61%
1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan;	357.420.000	378.132.000	246.525.910	68,97%	285.847.160	79,98%	367.062.360	97,07%
2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan;	507.887.000	507.887.000	28.375.880	5,59%	116.358.700	22,91%	295.881.362	58,26%
3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	173.044.000	148.037.000	18.400.000	10,63%	18.400.000	10,63%	139.535.933	94,26%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan percepatan pengawasan kegiatan pembangunan pada simpul-simpul prasarana transportasi Jalan;
2. Mengusulkan kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai dengan target pada sasaran strategis yang telah ditetapkan;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.1.2 IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 5 Capaian Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi			
IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi			Satuan: Lokasi
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q2	Tahun 2023
Target	105	105	105	
Realisasi	105	107	108	
Capaian	100,00%	101,90%	102,86%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang adalah jumlah terminal tipe A dan terminal barang di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah memberikan pelayanan berupa adanya aktivitas kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

Terminal tipe A dan terminal barang kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah terminal tipe A dan terminal barang yang telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan aset lahan serta bangunannya telah menjadi milik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Untuk menghitung IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah TTA \& TB yang beroperasi} \\ & = \text{Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang Beroperasi} + \text{Jumlah Terminal Barang Umum yang beroperasi} \end{aligned}$$

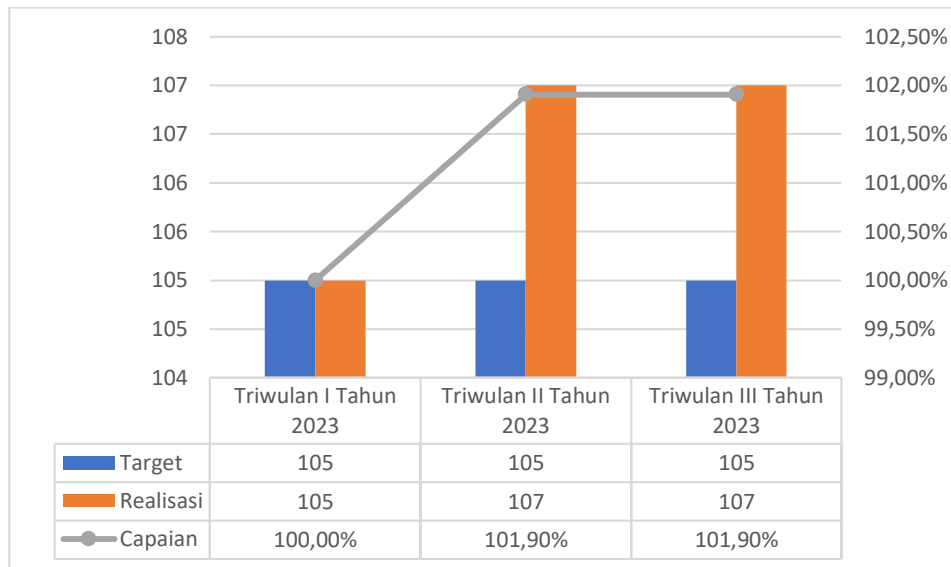
Keterangan :

* TTA = Terminal Tipe A

TB = Terminal Barang

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Triwulan III tahun 2023 sebesar 108 lokasi jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2023 sebesar 105 lokasi maka capaian kinerja mencapai 102,86%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.2**. Grafik Capaian IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi.



Gambar II 3 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada tahun 2023)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

Terminal Penumpang Tipe-A

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia dan KM 100 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia, jumlah Terminal Penumpang Tipe A adalah 127 (seratus dua puluh tujuh) terminal dengan rincian eksisting sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

1. 113 (seratus dua belas) Terminal Penumpang Tipe A telah **serah terima** operasional yang menjadi kewenangan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

a. **107** Terminal Penumpang Tipe A **telah beroperasi**

b. **6** Terminal Penumpang Tipe A **belum beroperasi**, dengan rincian sebagai berikut:

1) 2 (dua) Terminal Penumpang Tipe A masih dalam proses pembangunan dan revitalisasi yaitu:

- Terminal Demak (Jawa Tengah)
- Terminal Air Sebakul (Bengkulu)

- 2) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A belum dibangun (Terminal Singkawang, Kalimantan Barat);
 - 3) 1 Terminal Penumpang Tipe A kondisi bangunannya kurang terawat dan sedang dilakukan studi KPBU untuk pemanfaatan aset terminal tanpa menghilangkan fungsi pelayanan terminal (Terminal Betan Subing, Provinsi Lampung);
 - 4) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A masih terkendala mekanisme serah-terima aset dengan Pemerintah Daerah (Terminal Bangkalan, Jawa Timur).
- c. **4 (empat)** Terminal Penumpang Tipe A menjadi kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan telah beroperasi (Terminal Pondok Cabe, Terminal Poris Plawad, Terminal Baranangsiang, Terminal Jatijajar);
 - d. **2 (dua)** Terminal Penumpang Tipe A menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan telah beroperasi (Terminal Kalideres dan Terminal Kampung Rambutan);
 - e. **8 (delapan)** Terminal Penumpang Tipe A belum diserahkan ke Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota serta Perusahaan Daerah (Terminal Padang Bulan, Terminal Gerbangsari, Terminal Induk Bekasi, Terminal Kalijaya Cikarang, Terminal Cicaheum, Terminal Sri Tanjung, Terminal Osowilangun, Terminal Daya).

Terminal Barang Untuk Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:

1. KP 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum dan Terminal Transit Penumpang di Entikong Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (**Lampiran 2**);
2. KM 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau yang Berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (**Lampiran 3**);
3. KM 45 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk yang Berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (**Lampiran 4**) dan;
4. KM 139 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum yang Berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua (**Lampiran 5**).

Berikut adalah jumlah Terminal Barang untuk umum sebanyak 7 Terminal, antara lain:

1. Entikong di Kalimantan Barat;
2. Skouw di Papua. (PKN Jayapura)
3. Aruk di Kalimantan Barat;
4. Nanga Badau di Kalimantan Barat;
5. Motaain di Nusa Tenggara Timur;
6. Motamasin di Nusa Tenggara Timur;
7. Wini di Nusa Tenggara Timur;

Rincian dari 7 (tujuh) Terminal Barang Untuk Umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) Terminal Barang Untuk Umum yaitu Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong yang sudah selesai dibangun pada tahun 2020, dengan kondisi tahun 2021 sudah ada operasional internal oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) akan tetapi belum ada pelayanan terhadap kendaraan barang baik kendaraan barang domestik maupun

kendaraan barang internasional. Adapun kendala/masalah yang masih dihadapi Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong adalah sebagai berikut:

- a) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, agar bisa ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Sementara (TPS), harus ada badan usaha pengelola TPS. Proses penetapan pengelola Tempat Penimbunan Sementara (TPS) masih terkendala sertifikat lahan yang belum selesai diproses.
 - b) Proses sertifikat lahan di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Sanggau dilakukan dalam beberapa tahap, saat ini telah selesai tahap 1 dengan terbitnya sertifikat a.n. Kementerian Perhubungan seluas 30.820 m² yang belum mencakup kelesuruhan dari tanah yang dimohonkan. Tahap 2 akan dilakukan pendaftaran hak atas tanah setelah hasil sidang sengketa keluar dan diketahui titik batasnya.
 - c) Dalam rangka persiapan operasional TBI sedang diajukan beberapa permohonan antara lain permohonan ulang Penetapan Kawasan Pabean kepada Menteri Keuangan, permohonan spesifikasi teknis alat pemindai barang untuk keperluan operasional ekspor-impor dan permohonan persetujuan sewa BMN kepada Kepala KPKNL Pontianak.
 - d) Beberapa kendala yang dihadapi terkait operasional antara lain belum lengkapnya fasilitas penunjang, SDM dan kompetensi personil, belum adanya pengaturan sirkulasi lalu lintas angkutan barang, belum terbangunnya jalur khusus (dedicated lane) menuju perbatasan dan belum tersusunnya SOP angkutan barang lintas batas negara.
2. Terdapat 2 (dua) Terminal Barang Untuk Umum yang baru selesai proses pembangunannya pada Tahun Anggaran 2022 dan sudah dialokasikan anggaran operasional untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu Terminal Barang Internasional (TBI) Skouw di Papua dan Nanga Badau di Kalimantan Barat.
 3. Terdapat 4 (empat) Terminal Barang Untuk Umum yang masih dalam proses pembangunan, yaitu Aruk di Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur, Motamasin di Nusa Tenggara Timur, dan Wini di Nusa Tenggara Timur.

- **Narasi Kronologi Target**

Berdasarkan target pada renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, untuk target Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada tahun 2023 yang semula sebanyak 111 lokasi, berubah menjadi 105 lokasi karena pada awal tahun 2023 belum ada penambahan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang baru yang beroperasi.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan terhadap kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang tahun 2023 yaitu:

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu:

1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2023 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 menjadi 107 Terminal untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum.

2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan *excellent service*.
3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Barang Umum yaitu:

1. Mengoperasikan Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai dibangun meskipun kendaraan barang belum ada yang masuk terminal supaya bangunan tetap terawat dengan baik;
2. Tetap melanjutkan progres pembangunan Terminal Barang Untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan diprioritaskan pada Terminal Barang Untuk Umum yang memiliki permintaan/*demand* yang cukup besar;
3. Koordinasi dengan pihak terkait khususnya instansi yang membidangi *Immigration, Customs, Quarantine and Security* (ICQS) dikarenakan operasional Terminal Barang Untuk Umum yang menangani ekspor impor harus memiliki izin ICQS.

• **Narasi Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan**

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Terminal Penumpang Tipe A** antara lain:

1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A.
2. Terdapat *backlog* kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan.
3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan.

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Terminal Barang Umum** antara lain (3 point):

1. Terdapat kendala operasional kendaraan barang belum masuk ke terminal dikarenakan kesepakatan dengan negara lain masih dalam proses administrasi, pembangunan jalan khusus belum selesai dibangun dan penetapan pengelola yang terkendala masalah lahan.
2. Terdapat *backlog* kegiatan pembangunan Terminal Barang Untuk Umum lanjutan karena keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan tidak dapat dilaksanakan pada semua terminal yang belum selesai dibangun.
3. Operasional kendaraan barang masuk ke Terminal Barang Untuk Umum tergantung pada kesepakatan antara 2 negara terkait Standar Operasional Prosedur ekspor-impor komoditi.

• **Narasi Realisasi Kinerja**

IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi merupakan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk menghitung IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

Sehingga: *Jumlah Terminal Penumpang Tipe A + Jumlah Terminal Barang Umum yang beroperasi (sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat)*

$$= 107 + 1$$

$$= 108 \text{ lokasi}$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Tahun 2023 terhadap target Revisi I PK Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{108}{105} \times 100\% = 102,86\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang adalah sebagai berikut:

Tabel II 6 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW III	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas								
SK 1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi								
IKK 2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	500.000.000	519.139.000	37.700.255	7,54%	83.401.975	16,68%	193.938.737	37,36%
'Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan	500.000.000	519.139.000	37.700.255	7,54%	83.401.975	16,68%	193.938.737	37,36%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan percepatan pengawasan kegiatan pembangunan pada simpul-simpul prasarana transportasi Jalan;
2. Mengusulkan kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai dengan target pada sasaran strategis yang telah ditetapkan;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.2.3 IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 7 Capaian Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi			
IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			Satuan: Lokasi
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Tahun 2023
Target	12	12	12	
Realisasi	12	12	12	
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk diakomodir akan dilayani meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN. Adapun daftar Kawasan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut terdiri dari:

10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

1. KSPN Danau Toba;
2. KSPN Bangka Belitung;
3. KSPN Borobudur;
4. KSPN Bromo Tengger Semeru;
5. KSPN Mandalika;
6. KSPN Labuan Bajo;

7. KSPN Likupang;
8. KSPN Wakatobi;
9. KSPN Morotai;
10. KSPN Raja Ampat.

9 Kawasan Industri (KI)

1. KI Sei Mangkei;
2. KI Galang Batang;
3. KI Bintan Aerospace;
4. KI Sadai;
5. KI Ketapang
6. KI Surya Borneo;
7. KI Palu;
8. KI Teluk Weda;
9. KI Teluk Bintuni

8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1. KPBPB Sabang;
2. KEK Arun Lhokseumawe;
3. KPBPB Batam Bintan Karimun;
4. KEK Tanjung Lesung;
5. KEK Mandalika*;
6. KEK MBTK;
7. KEK Bitung;
8. KEK Morotai;

42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional:

1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;
7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;
11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;
17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;
21. Gerbangkertosusilo;
22. Malang;
23. Sarbagita;
24. Mataram Raya;

25. Kupang;
26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;
29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;
30. Tarakan;
31. Gorontalo;
32. Manado;
33. Bitung;
34. Palu;
35. Maminasata;
36. Kendari;
37. Ambon;
38. Ternate;
39. Sorong;
40. Timika;
41. Jayapura;
42. Merauke.

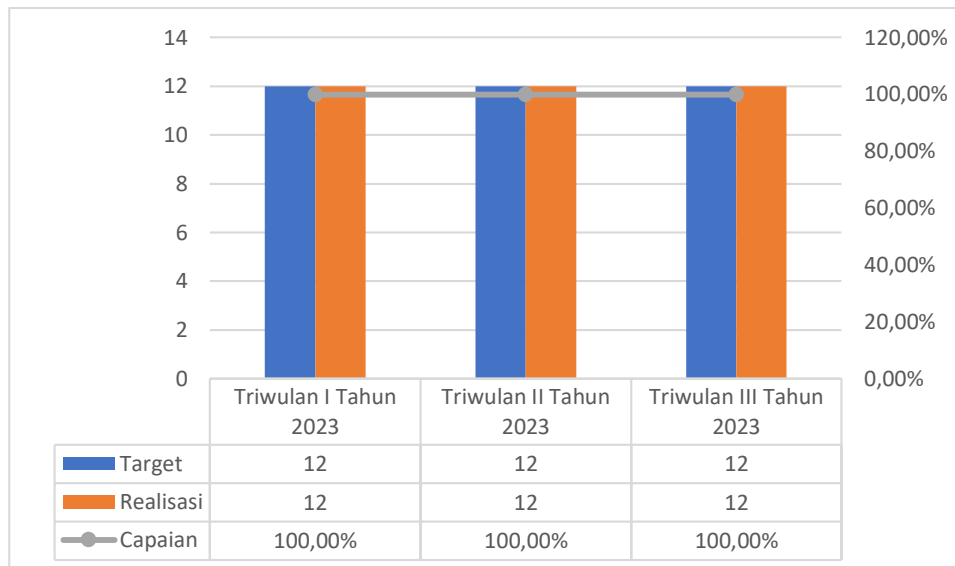
Untuk menghitung IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda} = \text{Fasilitas Pendukung dan Integrasi moda yang sudah terbangun pada lokasi KSN Th 2020 s.d Th ke n}$$

Berdasarkan nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat pada Lampiran I Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, terdapat kesalahan/ ketidaksesuaian penulisan nomenklatur dimana indikator Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda memiliki satuan lokasi.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Triwulan III tahun 2023 sebesar 12 lokasi jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2023 sebesar 12 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.3.** Grafik Capaian IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda.



Gambar II 4 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada tahun 2023)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 (**Lampiran 6**);
2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (**Lampiran 7**) dan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 (**Lampiran 8**).

- **Narasi Kronologi Target**

Berdasarkan target pada renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, untuk target persentase penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda pada tahun 2023 yang semula sebanyak 20 lokasi, berubah menjadi 12 lokasi karena sesuai dengan DIPA TA 2023, belum ada penambahan terkait penyediaan fasilitas pendukung & integrasi moda.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Persentase penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dengan target penyediaan fasilitas pendukung sampai dengan tahun 2023 ada sebanyak 12 lokasi.

Penyediaan fasilitas pendukung sudah terealisasi di 12 (dua belas) lokasi, antara lain:

1. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika dan Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika (mendukung penyelenggaraan Moto GP tahun 2022);
2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang;
3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo;
4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta;

5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten;
6. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga;
7. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang;
8. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru;
9. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba;
10. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur;
11. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo;
12. Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema *Buy The Service* di Denpasar.

Berdasarkan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdapat 12 (dua belas) lokasi penyediaan fasilitas pendukung, terdapat 12 (dua belas) lokasi.

Keberhasilan Ketersediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berhasil dicapai sampai dengan tahun 2023 yaitu :

1. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan *event* MotoGP dengan melakukan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Mandalika melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali dengan melakukan Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema *Buy The Service* di Denpasar melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Dalam pelaksanaannya sampai dengan Triwulan III tahun 2023, Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dengan target penyediaan fasilitas pendukung tahun 2023 sebanyak 12 lokasi, dapat terealisasi sebanyak 12 (dua belas) lokasi, yaitu Mandalika, Magelang, Purworejo, Surakarta, Klaten, Salatiga, Palembang, Pekanbaru, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Denpasar. Penambahan realisasi ada pada akhir tahun 2022, yaitu adanya penambahan pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo. Sehingga dari 12 (dua belas) lokasi penyediaan fasilitas pendukung pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2023, telah terealisasi sebanyak 12 (dua belas) lokasi yang berada di 8 Kawasan Strategis Nasional;
4. Penentuan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional;
5. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda** antara lain:

1. Koordinasi perizinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada di atas bahu jalan;
2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung;
3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

IKK Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda merupakan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang telah terbangun di wilayah kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Untuk menghitung IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Sehingga: } \text{Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung \& Integrasi Moda} = \frac{\text{Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang terbangun pada lokasi KSN Th 2020 s.d Th 2023}}{12 \text{ lokasi}}$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Triwulan III Tahun 2023 terhadap target Revisi I PK Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{12}{12} \times 100\% = 100,00\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II 8 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW III	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas								
SK 1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi								
IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	432.896.000	259.859.000	108.588.895	25,08%	119.634.395	27,64%	207.401.486	79,81%
Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu :								
1. Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan;	259.852.000	259.859.000	90.188.895	34,71%	101.234.395	38,96%	207.401.486	79,81%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan percepatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda pada lokasi yang sudah menjadi target pembangunan pada renstra;
2. Meningkatkan kegiatan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda serta Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.2 SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

• Uraian Kegiatan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengawal dan memastikan kegiatan prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat.

Tabel II 9 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3
SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00			
		Target		81,00	81,00	81,00
		Realisasi		93,64	93,19	97,54
		Capaian		115,60%	115,05%	120,42%
IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,7			
		Target		53,7	53,7	53,7
		Realisasi		59,02	59,02	59,02
		Capaian		109,91%	109,91%	109,91%
IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,6			
		Target		78,6	78,6	78,6
		Realisasi		83,41	81,75	81,75
		Capaian		106,12%	104,01%	104,01%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A.
2. IKK 2. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A
3. IKK 3. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

II.2.2.1 IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 10 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A

SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat			
IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A			Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Tahun 2023
Target	81,00	81,00	81,00	
Realisasi	93,64	93,19	97,54	
Capaian	115,60%	115,05%	120,42%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A merupakan rekapitulasi hasil Survey Koresponden pada Terminal Penumpang Tipe A melalui aplikasi *Case Management System* IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian survey dilakukan secara periodik setiap bulan oleh penumpang di seluruh Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah keewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dapat diakses melalui *barcode* ataupun *link* survey yang berbeda-beda setiap terminalnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan nilai capaian kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh publik dimana nilai capaian / Indeks Kepuasan dimaksud diperoleh melalui pelaksanaan Survei yang disebut Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi darat adalah metode untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik transportasi darat, melalui Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terminal Tipe A menggunakan Proses perumusan Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Aspek Penilaian

Penilaian publik atas penyelenggaraan transportasi darat melalui aplikasi 3A IPK-IKM atau Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dapat diakses melalui www.skm.dephub.go.id. Unsur penilaian SKM meliputi:

- 1) Persyaratan, Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 3) Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- 4) Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- 5) Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- 6) Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 7) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
- 8) Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
- 9) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- 10) Sarana dan Prasarana, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Barcode untuk mengakses form survey disediakan oleh masing-masing Terminal Tipe A dengan cara di-display melalui poster dan/atau banner ataupun melalui link yang diberikan oleh petugas terminal kepada penumpang di terminal serta disebarakan melalui media sosial masing-masing terminal.



Pengisian survey dilakukan dengan cara mengisi data diri dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelayanan di terminal dengan memberikan rating dari 1 sampai 6, dengan rating 6 berarti paling memuaskan dan rating 1 paling tidak memuaskan.



Rekapitulasi hasil survey seluruh Terminal Tipe A dapat diakses melalui link skm.dephub.go.id dengan cara memasukkan username dan password yang telah terdaftar sebagai admin.

2. Pembobotan Nilai

Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan sebagai berikut:

Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan;
2. memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel II 11 Nilai Resepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Keterangan Tabel : Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

3. Parameter

Pada tahun 2022 Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan aplikasi 3A IPK-IKM dengan rumus hitung dan unsurnya sesuai dengan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Aplikasi 3A ditujukan untuk melakukan survei cepat penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan asumsi penentuan target yang merujuk pada target sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 menggunakan asumsi dari pemenuhan Dokumen Standar Pelayanan;
2. Pada tahun 2022 menggunakan asumsi telah dilaksanakan reviu dokumen Standar Pelayanan dan Penerapan SPBE;
3. Pada tahun 2023 menggunakan asumsi pelaksanaan implementasi Road Map TIK untuk pelayanan; dan
4. Pada tahun 2024 menggunakan asumsi dari optimalisasi pelayanan pada penerapan SPBE.

Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Layanan dan dilakukan oleh Para Pengguna Layanan.

4. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan* atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \frac{\{\lambda^2 . N . P . Q\}}{\{d^2(N - 1) + \lambda^2 . P . Q\}}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

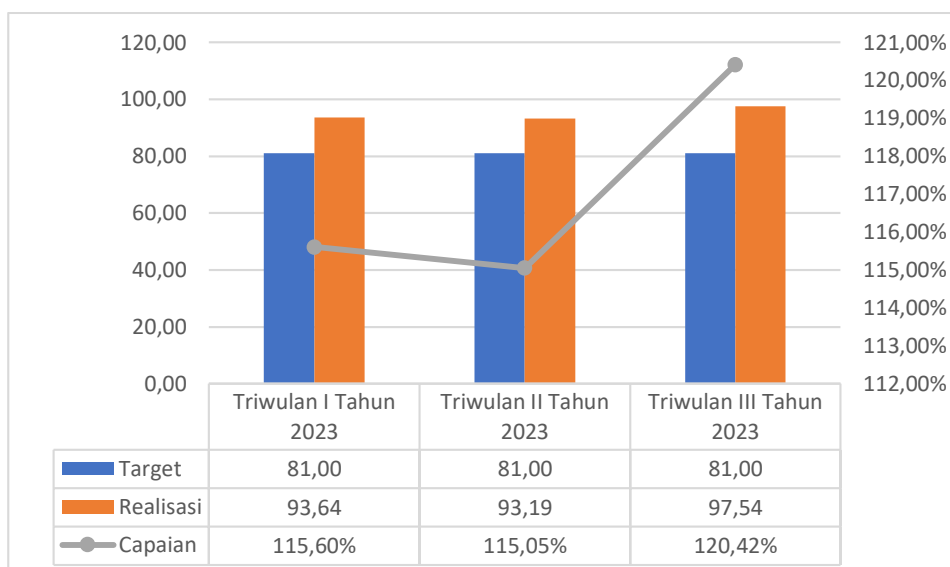
N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja IKK Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A pada Triwulan III Tahun 2023 sebesar 97,54% jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2023 sebesar 81,00% maka capaian kinerja mencapai 120,42%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.4.** Grafik Capaian IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A.



Gambar II 5 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area peningkatan pelayanan publik tahun 2023, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan survey pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan khususnya Satuan Pelayanan Terminal Tipe A dengan menggunakan Aplikasi. Survey tersebut dilaksanakan untuk mengukur Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penggunajasa / stakeholders pada unit layanan Ditjen Perhubungan Darat yang mengacu pada kepada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

- **Narasi Kronologi Target**

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Terminal Tipe A memiliki target pada tahun 2023 sebesar 81,00 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

Pada tahun 2023 pelaksanaan SKM masih menggunakan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi 3A IPK-IKM dan masih berfokus pada pendampingan dan supervisi atas pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dimaksud kepada petugas layanan dan target Survei itu sendiri yaitu seluruh pengguna layanan. sehingga masih banyak kendala yang dihadapi baik

dari sisi pemahaman petugas pelaksana layanan maupun dari sisi pemahaman pengguna jasa yang menyebabkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Terminal Tipe A Triwulan III tahun 2023 sudah mencapai 97,54.

Capaian Nilai 97,54 diperoleh dari :

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A = Rekapitulasi hasil survey IKM pada Terminal Penumpang Tipe A = 97,54

$$\frac{\text{Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terminal a} + \text{Nilai IKM Terminal} \dots n}{\text{Jumlah Terminal yang melakukan survey pada bulan ke-n}}$$

$$\frac{97,54}{1} = 97,54$$

Capaian 97,54 bila disesuaikan pada tabel range akan diperoleh predikat kinerja unit pelayanan pada tingkat Sangat baik. Berdasarkan jumlah terminal yang melakukan survey, hanya ditemukan 1 (satu) terminal dikarenakan sistem masih dalam perbaikan sejak bulan Juli 2023.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Perbaikan layanan antara lain perbaikan sarana dan prasarana;
2. Mensosialisasikan informasi terkait prosedur layanan dan produk layanan yang ada secara bertahap serta penerapan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa;
3. Meningkatnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Terminal Tipe A tahun 2023 Triwulan III menjadi 97,54;
4. Tersedianya Aplikasi 3A IPK-IKM untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa Terminal Tipe A.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Adapun beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

Dalam mencapai kinerja pelayanan Terminal Tipe A masih di temukan banyak permasalahan, sampai dengan tahun 2023 masih belum sepenuhnya teratasi, adapun permasalahan yang banyak di temukan pada unit pelayanan publik sebagai berikut:

1. Persyaratan teknis maupun administratif yang dianggap belum memudahkan para pengguna layanan;
2. Prosedur yang dianggap tidak mudah untuk diikuti oleh pengguna layanan;
3. Layanan pengaduan yang masih belum tersedia;
4. Masih terdapat banyak satuan pelaksana yang belum melakukan survey IKM, sehingga hasil rekapitulasi yang diperoleh tidak maksimal.
5. Masih didapati pengguna jasa yang belum seluruhnya mendapatkan kualitas pelayanan yang baik salah satunya yaitu belum mendapatkan informasi secara lengkap terkait prosedur layanan serta petugas pelaksana belum sepenuhnya mendapatkan pemahaman secara lengkap terkait prosedur layanan serta penerapan pelaksanaan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa;
6. Pada periode Juli s.d September 2023 Aplikasi 3A IPK-IKM masih dalam proses perbaikan sistem sehingga hanya satu satuan pelayanan terminal yang dapat terekam sistem.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A Triwulan III tahun 2023 yang diisi oleh koresponden pada satuan pelayanan Terminal Tipe A yang beroperasi, melalui aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperoleh hasil rekapitulasi rata-rata nilai IKM pada Triwulan III tahun 2023 sebesar 97,54.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, pada tahun 2023, dari 108 Terminal Tipe A yang beroperasi, terdapat 1 Terminal Tipe A yang melakukan survey IKM pada bulan September 2023.

Sehingga:

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A = Rekapitulasi hasil survey IKM pada Terminal Penumpang Tipe A = 97,54

$$IKK_n = \frac{\sum IKM_{T1} + IKM_{T2} + \dots + IKM_{Tn}}{n}$$

$$IKK_n = \frac{\text{Nilai IKM Terminal 1} + \text{Nilai IKM Terminal 2} + \text{Nilai IKM Terminal} \dots n}{\text{Jumlah Terminal yang melakukan survey pada bulan ke-n}}$$

$$\frac{97,54}{1} = 97,54$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A pada Triwulan III tahun 2023 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{97,54}{81,00} \times 100\% = 120,42\%$$

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A adalah melalui Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A dengan anggaran senilai Rp0,00 dengan realisasi hingga akhir tahun 2023 senilai Rp0,00 dikarenakan untuk IKK Indeks Kepuasan Masyarakat masih belum dianggarkan, karena untuk kegiatannya yaitu melakukan rekapitulasi hasil survey kinerja pelayanan melalui Aplikasi 3A IPK-IKM.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A agar secara rutin melakukan survey IKM dengan melakukan survey koresponden melalui Aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah disediakan dengan cara mengisi kuesioner melalui link dan scan QRcode yang telah disediakan.
2. Seluruh satpel Terminal Tipe A dapat melakukan survey koresponden secara rutin sehingga dapat mengetahui kondisi secara keseluruhan hasil dari survey IKM tersebut.

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;
4. Berkoordinasi dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) saat ada kendala terkait aplikasi Aplikasi 3A IPK-IKM.

II.2.2.2 IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 12 Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat			
IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A			Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Tahun 2023
Target	53,7	53,7	53,7	
Realisasi	59,02	59,02	59,02	
Capaian	109,91%	109,91%	109,91%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

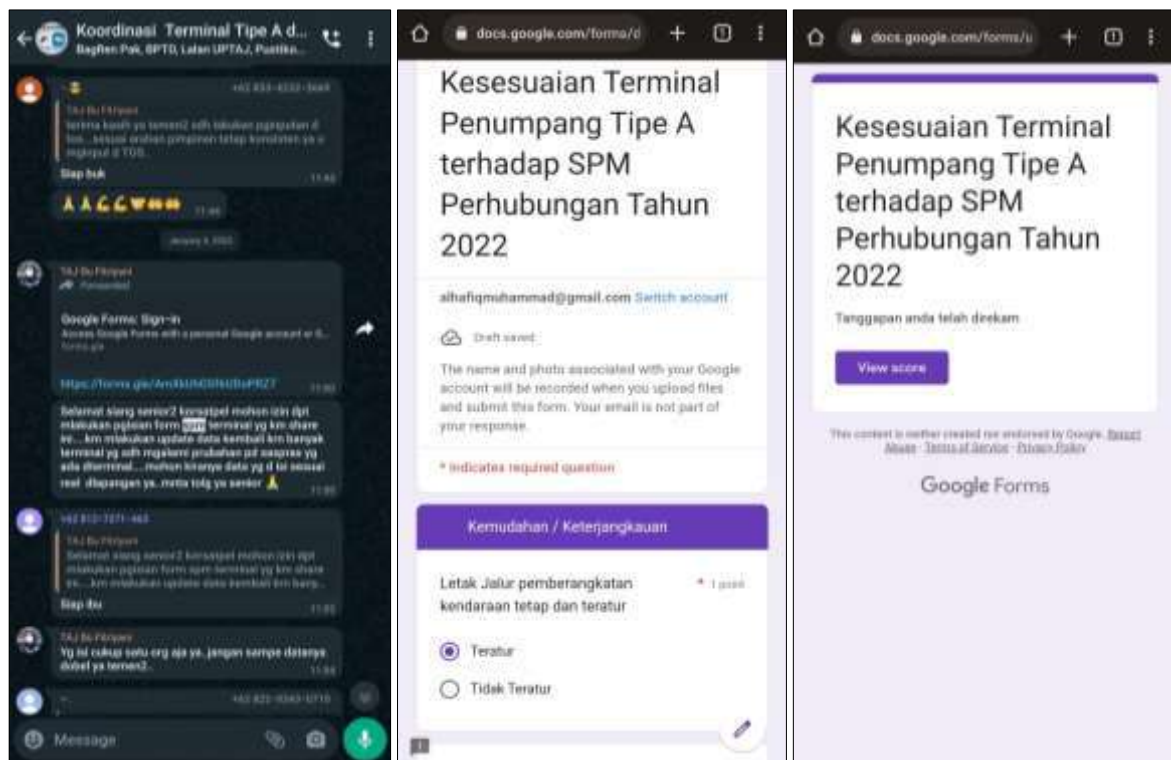
IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Penumpang Tipe A adalah rata-rata dari persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada Terminal Penumpang Tipe A beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A didapatkan dari hasil survei penilaian pemenuhan jenis pelayanan yang diberikan nilai berdasarkan indikatornya dibandingkan dengan nilai maksimal yang bisa didapatkan jika semua jenis pelayanan terpenuhi indikatornya.

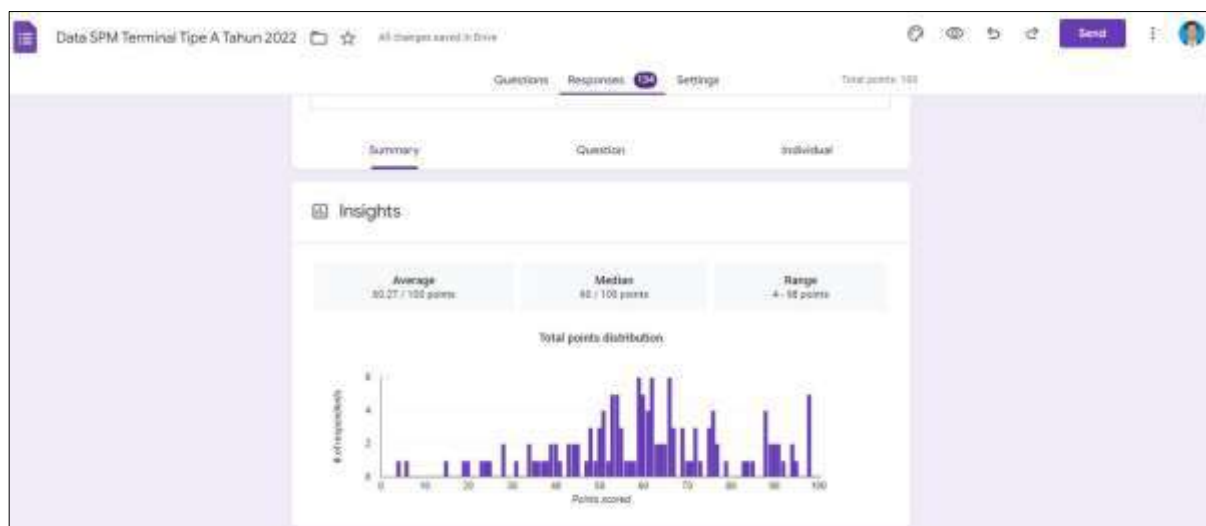
Berdasarkan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A mencakup:

- (1) Pelayanan Keselamatan;
- (2) Pelayanan Keamanan;
- (3) Pelayanan Keandalan/Keteraturan;
- (4) Pelayanan Kenyamanan;
- (5) Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan;
- (6) Pelayanan Kesenjajaran.

Survei pemenuhan Standar Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A dilakukan secara *online* dengan menyebar kuisioner *google form* ke seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



Pengisian kuisioner dilakukan dengan menjawab pertanyaan terkait jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kondisi di terminal masing-masing. Rekapitulasi hasil pengisian kuisioner seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat di akun *google drive* yang digunakan untuk membuat form kuesioner.



8	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
9	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP_{keamanan})		
1	Fasilitas pencegah tindak kriminal Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP_{keandalan})		
1	Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
3	Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis.	2

	Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	
5	Ketersediaan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loker tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
6	Keteraturan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila Loker tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	1
7	Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai). Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.	2
9	Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP_{kenyamanan})		
1	Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.	2
3	Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2

4	Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
5	Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
6	Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
7	Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
11	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
14	Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
15	Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
16	Ketersediaan Area merokok (smoking area)	2

	Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
17	Ketersediaan Drainase yang memadai Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
19	Ketersediaan Ruang baca (reading corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP_{kemudahan})		
1	Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1
3	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
4	Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
5	Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
6	Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
7	Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca) Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah	2

	didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	
9	Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca. Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
11	Ketersediaan Tempat penitipan barang Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
14	Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
ASPEK PELAYANAN KESETARAAN (AP_{kesetaraan})		
1	Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
2	Ketersediaan Ruang ibu menyusui Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal		100

Sehingga :

$$SPM\ TTA = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

$$IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$$

Note:

*Monitoring dilaksanakan pada saat Proses rehabilitasi selesai dilaksanakan pada tahun (n)

SPM TTA = Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (SP) pada masing-masing Terminal

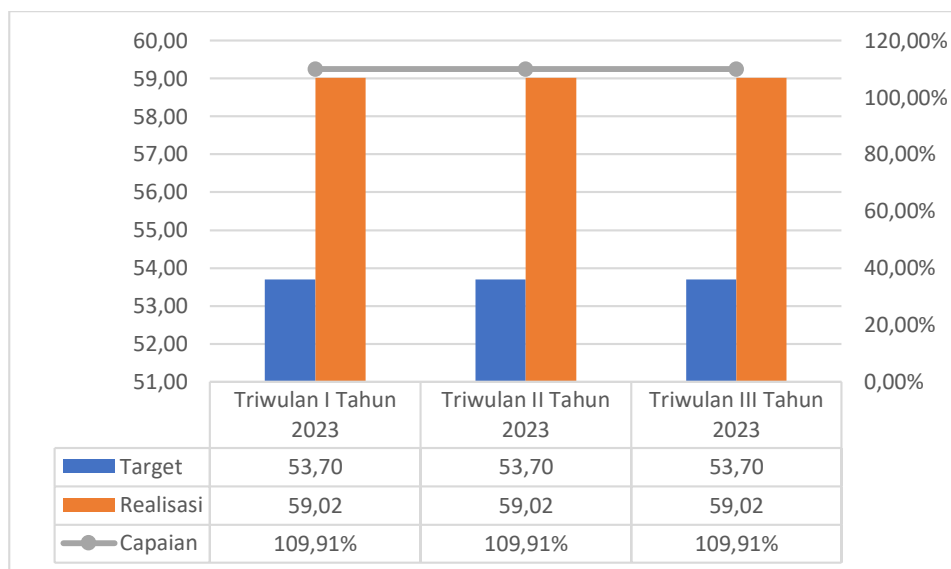
Penumpang Tipe A (TTA) yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat

n = Jumlah Terminal yang beroperasi

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A sebesar 59,02% jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2023 sebesar 53,7% maka capaian kinerja mencapai 109,91,%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.5**. Grafik Capaian IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A.



Gambar II 6 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dan Balai Pengelola Transportasi Darat telah melakukan revitalisasi terhadap Terminal Penumpang Tipe A sehingga mengakibatkan persentase SPM Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meningkat karena adanya penambahan dan perbaikan fasilitas umum dan penunjang sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan sebagai berikut :

Tabel II 14 Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015

Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:		
NO	ASPEK PENGUKURAN	NILAI (POINT)
ASPEK PELAYANAN KESELAMATAN ($AP_{keselamatan}$)		
1	Lajur Pejalan Kaki	2

	Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan <i>crossing</i> dengan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
2	Fasilitas Keselamatan Jalan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, penerangan jalan umum, pagar). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Jalur Evakuasi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Alat Pemadam Kebakaran Nilai 2 (dua) point apabila tersedia alat pemadam kebakaran. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
5	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas kesehatan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
6	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
7	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
9	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP_{keamanan})		
1	Fasilitas pencegah tindak kriminal Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2

ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP _{keandalan})		
1	Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
3	Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
5	Ketersediaan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loker tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
6	Keteraturan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila Loker tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	1
7	Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai). Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.	2
9	Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal.	2

	Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	
ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP_{kenyamanan})		
1	Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.	2
3	Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
4	Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
5	Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
6	Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
7	Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1

11	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
14	Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
15	Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
16	Ketersediaan Area merokok (smoking area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
17	Ketersediaan Drainase yang memadai Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
19	Ketersediaan Ruang baca (reading corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP_{kemudahan})		
1	Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1
3	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1

4	Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
5	Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
6	Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
7	Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca) Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca. Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
11	Ketersediaan Tempat penitipan barang Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
14	Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
ASPE PELAYANAN KESETARAAN (AP_{kesetaraan})		
1	Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
2	Ketersediaan Ruang ibu menyusui	1

	Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal		100

• **Narasi Kronologi Target**

Target SPM di Terminal Penumpang Tipe A Tahun 2023 sebesar 53,7% dikarenakan Terminal Penumpang Tipe A pada mulanya merupakan Terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sehingga kondisi Terminal berbeda-beda tergantung kemampuan daerah dalam mengelola dan merawat Terminalnya. Proses serah terima Terminal dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) dilaksanakan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018, sehingga kondisi awal Terminal yang diterima oleh Kementerian Perhubungan pada Tahun 2019 yaitu 53,54% sesuai dengan realisasi capaian SPM Terminal yang ada dilapangan pada saat itu yang merupakan rata-rata nilai SPM dari Terminal yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Seluruh Indonesia yang menjadi data dasar/baseline dikarenakan target SPM yaitu pemerataan untuk Terminal di seluruh Indonesia supaya target bersifat realitis.

Dikarenakan jumlah Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia berjumlah cukup banyak (lebih dari 100 Terminal) sehingga dalam meningkatkan jumlah rata-rata SPM 1% saja membutuhkan usaha yang tidak mudah. Target tahun 2023 adalah 53,7% jika dibandingkan dengan target tahun sebelumnya yaitu sebesar 53,65% mengalami kenaikan 0,05% dikarenakan pada tahun 2023 Terminal yang menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah 112 Terminal sehingga untuk mencapai peningkatan rata-rata SPM di seluruh Indonesia sebesar 0,05% tersebut dibutuhkan beberapa Terminal untuk dilakukan rehabilitasi dalam 1 Tahun Anggaran untuk mencapai target tersebut.

Realisasi SPM Tahun 2023 adalah 59,02% dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 58,49% terdapat peningkatan sebesar 0,53%. Nilai persentase peningkatan tersebut terjadi dikarenakan terdapat kegiatan rehabilitasi/peningkatan Terminal Tahun Anggaran 2022 berjumlah 19 Terminal (Terminal Batoh, Terminal Lhokseumawe, Terminal Amplas, Terminal Tanjung Pinggir, Terminal Alang-Alang Lebar, Terminal Pakupatan, Terminal Banjar, Terminal Tingkir, Terminal Tegal, Terminal Bobotsari, Terminal Kebumen, Terminal Blitar, Terminal Tamanan, Terminal Kertonegoro, Terminal Samarinda Seberang, Terminal Puuwatu, Terminal Induk Lumpue, Terminal Isimu, Terminal Bolang Mongondow) dengan anggaran sebesar 12,86 Triliun. Dapat disimpulkan bahwa target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dengan peningkatan sebesar 0,05% sudah cukup menantang, dikarenakan kegiatan rehabilitasi/peningkatan terminal membutuhkan anggaran yang besar.

Terminal yang direhabilitasi atau ditingkatkan tidak dapat memenuhi SPM 100% dikarenakan anggaran yang disetujui bukanlah sesuai kebutuhan capaian SPM 100% terminal, akan tetapi target minimal operasi Terminal sehingga masih ada beberapa item fasilitas SPM yang masih belum dapat dipenuhi.

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A pada tahun 2023 memiliki target sebesar 53,7 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Melakukan rehabilitasi dan peningkatan Terminal Tipe A sebanyak mungkin agar standar terminal bisa merata;
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun Training kepada Satuan Pelayanan Terminal;
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan prima pada Terminal melalui kegiatan *Excellent Service*;

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A masih di temukan banyak permasalahan, yang selama tahun 2023 masih belum sepenuhnya teratasi, adapun permasalahan yang banyak di temukan sebagai berikut:

1. Terdapat backlog kegiatan, yang semula terencana menjadi tidak terlaksana;
2. Adanya kerusakan pada fasilitas fisik terminal karena kurang maksimalnya perawatan terminal;
3. Masih terdapat kekurangan SDM pada beberapa terminal.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2023, realisasi kinerja pada Triwulan III adalah sebesar 59,02 dengan target kinerja sebesar 53,7.

Sehingga:

SPM TTA

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

$$IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$$

$$realisasi = \frac{6138}{104} \times 100\% = 59,02\% \dots\dots \text{Lampiran 12}$$

Note:

*Monitoring dilaksanakan pada saat Proses rehabilitasi selesai dilaksanakan pada tahun (n)

SPM TTA = Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (SP) pada masing-masing Terminal

Penumpang Tipe A (TTA) yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat

n = Jumlah Terminal yang beroperasi

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A Triwulan III tahun 2023 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{59,02}{53,7} \times 100\% = 109,91\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2023 adalah melalui :

Tabel II 15 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW III	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU(%)		
GA Program Infrastruktur Konektivitas								
SK 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat								
IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan;	539.957.000	539.957.000	53.706.569	9,95%	81.279.069	15,05%	223.799.817	41,45%
	539.957.000	539.957.000	53.706.569	9,95%	81.279.069	15,05%	223.799.817	41,45%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat.
2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang

II.2.2.3 IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 16 Capaian Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat			
IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A			Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Tahun 2023
Target	78,6	78,6	78,6	
Realisasi	83,41	81,75	81,75	
Capaian	106,12%	104,01%	104,01%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A adalah presentase penerapan digitalisasi di Terminal Penumpang Tipe A yang meliputi :

1. Presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System dengan bobot 74%;
2. Presentase terminal yang dipasang mesin check in tiket dan passenger gate dengan bobot 8,4%;
3. Presentase terminal yang dipasang vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV dengan bobot 17,6%.

Bobot nilai ditentukan berdasarkan fokus tujuan pada pelaporan data produksi secara online melalui system. Langkah tersebut merupakan langkah step by step menuju terminal yang smart melalui digitalisasi terminal. Latar belakang yang mendasari rumusan IKK tersebut yaitu karena terdapat perubahan pelaporan data produksi terminal yang semula dilaporkan secara manual kemudian direkap oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berubah menjadi input melalui sistem online sehingga sebagai tahap awal digitalisasi perencanaan 5 tahun melalui Rensta 2020 s.d. 2024 mengutamakan Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia untuk melaporkan data produksi secara online sehingga presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System berkontribusi paling besar yaitu dengan bobot 74%. SIASATI dapat diakses melalui <https://siasati.dephub.go.id/> .

Selanjutnya dalam rangka menuju terminal yang smart Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merencanakan akan mengaplikasikan digitalisasi terminal dengan memasang alat yang dapat mengirimkan data Terminal secara realtime yaitu mesin check in tiket, passenger gate, vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV. Akan tetapi karena besarnya jumlah Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia, sehingga pengaplikasian alat-alat tersebut dilakukan secara bertahap, sehingga dalam indikator kinerja diberikan bobot penilaian sebesar 8,4% dan 17,6%. Vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV memiliki bobot yang lebih besar dikarenakan merupakan cerminan dari terminal data produksi Terminal yaitu kendaraan angkutan umum yang keluar masuk Terminal.

Presentase-presentase di atas didapatkan dari data jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang memenuhi masing-masing kriteria dibandingkan dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi dalam kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan pada saat ini Terminal Penumpang Tipe A di Indonesia berada dalam kewenangan BPTJ (Pemerintah Pusat) untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah Bodetabek, kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah DKI Jakarta, kewenangan swasta dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk Terminal Penumpang Tipe A yang tidak diserahkan ke pemerintah pusat.

Presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System adalah perbandingan jumlah terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Jumlah terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System didapatkan dari data produksi yang di-input oleh petugas pencatat data kedatangan dan keberangkatan (*checker*) di masing-masing satuan pelayanan terminal tipe A yang beroperasi. Apabila data produksi tersebut telah masuk ke sistem SIASATI dan/atau TOS maka terminal tersebut telah dihitung melaporkan data produksi.

Presentase terminal yang dipasang mesin check in tiket dan passenger gate adalah perbandingan jumlah terminal yang dipasang mesin check in tiket dan passenger gate dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Presentase terminal yang dipasang vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV adalah perbandingan jumlah terminal yang dipasang vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

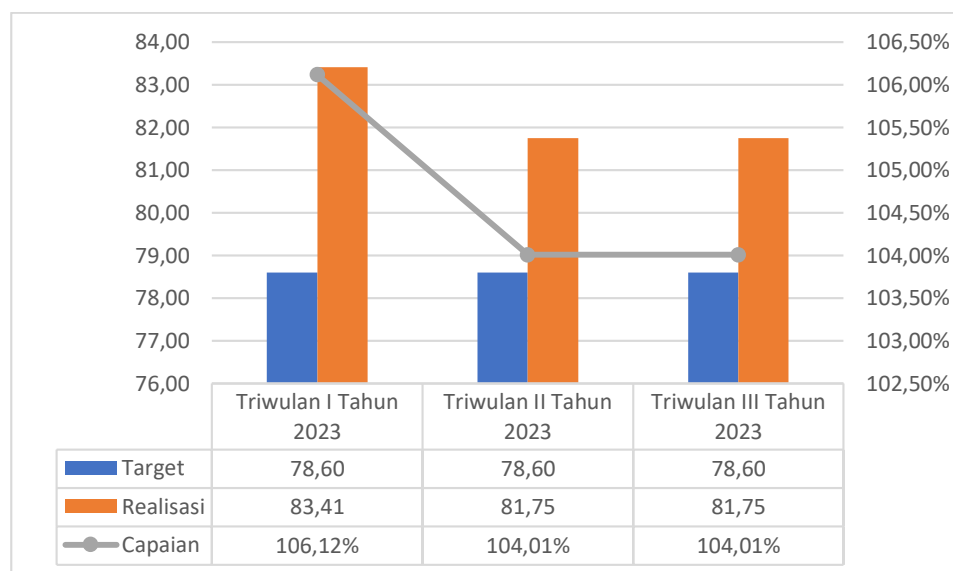
Pembobotan masing-masing data didasarkan pada rencana digitalisasi Terminal Penumpang Tipe A yang pada tahap awal akan lebih banyak berfokus pada pelaporan data produksi secara online melalui sistem yang telah dikembangkan yaitu SIASATI dan/atau Terminal Online System. Sedangkan untuk pemasangan mesin check in tiket dan passenger gate serta pemasangan vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV akan lebih banyak dilakukan pada digitalisasi tahap selanjutnya.

Untuk menghitung IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\%Penerapan\ Smart\ Terminal = \left[\frac{Jumlah\ TTA\ Yang\ Melaporkan\ Operasional\ Secara\ Online}{Jumlah\ TTA\ kewenangan\ Ditjen\ Hubdat\ yang\ Beroperasi} \times 74\% \right] + \left[\frac{Jumlah\ terminal\ dipasang\ mesin\ check\ in\ ticket\ dan\ passenger\ gate}{Jumlah\ TTA\ kewenangan\ Ditjen\ Hubdat\ yang\ Beroperasi} \times 8,4\% \right] + \left[\frac{Jumlah\ terminal\ dipasang\ vehicle\ gate,\ digital\ information,\ cctv}{Jumlah\ TTA\ kewenangan\ Ditjen\ Hubdat\ yang\ Beroperasi} \times 17,6\% \right]$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A sebesar 81,75% jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2023 sebesar 78,6% maka capaian kinerja mencapai 104,01%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.6**. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 3 Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A).



Gambar II 7 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 3 Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Dasar Hukum

Berdasarkan:

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 9151 TAHUN 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3171 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Angkutan Jalan. (**Lampiran 13**)

• Narasi Kronologi Target

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada Tahun 2023 memiliki target 78,6 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun

2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan dalam mencapai target pada Indikator Kinerja Kegiatan ini meliputi :

1. Menerapkan Terminal Online System (TOS) pada seluruh Terminal Tipe A;
2. Melakukan peningkatan SDM melalui training dan Bimtek terkait Terminal Online System (TOS);
3. Menambah biaya operasional pada satuan pelayanan untuk mendukung terlaksananya smart terminal sehingga persentase penerapan smart terminal dapat meningkat;

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Faktor yang dapat menghambat dalam mencapai target pada Indikator Kinerja Kegiatan ini meliputi:

1. Adanya backlog kegiatan, yang semula terencana dalam Renstra tetapi menjadi tidak terlaksana;
2. Belum meratanya penerapan smart terminal pada Terminal Tipe A;
3. Masih kurangnya jumlah SDM yang mampu melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana terkait Smart Terminal maupun Terminal Online System (TOS).

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berikut adalah perhitungan realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A tahun 2023 :

$$\begin{aligned}
 \% \text{Penerapan Smart Terminal} &= \left[\frac{\text{Jumlah TTA Yang Melaporkan Operasional Secara Online}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 74\% \right] + \\
 &\quad \left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 8,4\% \right] \\
 &\quad + \\
 &\quad \left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information, cctv}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 17,6\% \right] \\
 &= \left[\frac{115}{106} \times 74\% \right] + \left[\frac{8}{106} \times 8,4\% \right] + \left[\frac{5}{106} \times 17,6\% \right] \\
 &= 81,75\%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

Penerapan Smart Terminal dibagi menjadi 3 bagian, antara lain :

1. Persentase dari Jumlah Terminal Tipe A Yang Melaporkan Operasional Secara Online dengan bobot 74%
2. Persentase dari Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate dengan bobot 8,4%
3. Persentase dari Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information dan CCTV dengan bobot 17,6%

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A tahun 2023 terhadap target Revisi I PK Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{Capaian} = \frac{81,75}{78,6} \times 100\% = 104,01\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II 17 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW III	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas								
SK 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat								
IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu :	507.638.000	486.926.000	374.515.982	73,78%	486.235.982	95,78%	486235982	99,86%
1. Bimtek Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan;	201.172.000	194.840.000	194.791.647	96,83%	194.791.647	96,83%	194791647	99,98%
2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan;	306.466.000	292.086.000	179.724.335	58,64%	291.444.335	95,10%	291444335	99,78%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan mengoptimalisasikan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percepatan kegiatan Pemanfaatan Terminal Operating System;
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan terminal terkait dengan implementasi Terminal Online System dan penginputan data produksi terminal pada aplikasi SIASATI;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.3 SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

• Uraian Kegiatan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Tabel II 18 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3
SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						
IKK 1	Persentase	%	25			
	Pelanggaran pada	Target		25	25	25
	UPPKB Direktorat	Realisasi		31,69	29,41	24,99
	Jenderal Perhubungan Darat	Capaian		73,24%	82,36%	100,04%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

II.2.3.1 IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 19 Capaian Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

SK 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat			
IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat			Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Q3
Target		25	25	25
Realisasi		31,69	29,41	24,99
Capaian		73,24%	82,36%	100,04%

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah angkutan barang yang masuk ke UPPKB.

Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi:

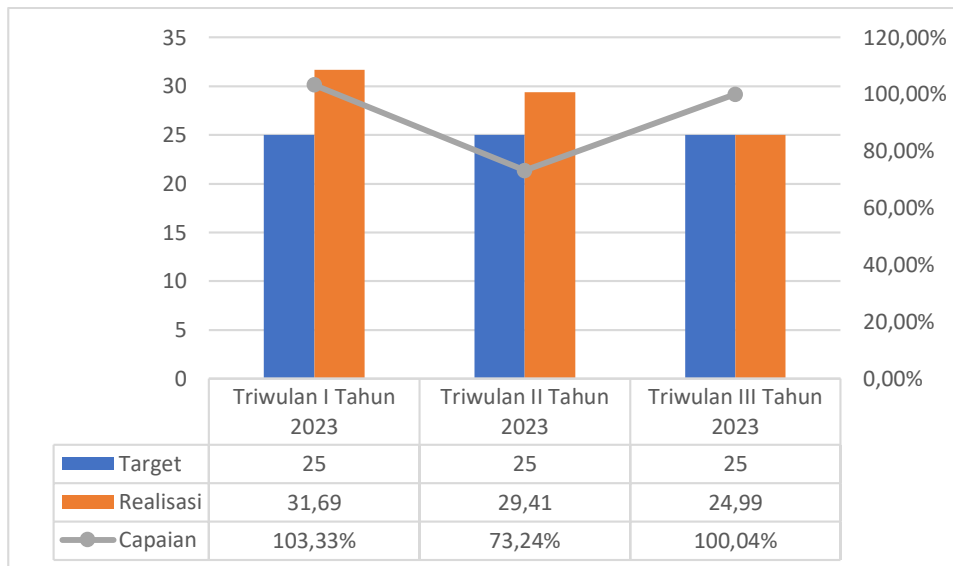
- a. tata cara pemuatan barang;
- b. dimensi kendaraan Angkutan Barang;
- c. tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
- d. dokumen Angkutan Barang;
- e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
- f. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Untuk menghitung IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah Kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada triwulan III tahun 2023 sebesar 24,99% jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2023 sebesar 25% maka capaian kinerja mencapai 100,04%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.7**. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan III tahun 2023).



Gambar II 8 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan III tahun 2023)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan menyatakan fungsi pengawasan pencatatan, pengawasan, dan penindakan angkutan barang di UPPKB dilakukan terhadap:

- tata cara pemuatan barang;
- dimensi kendaraan Angkutan Barang;
- tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
- dokumen Angkutan Barang;
- kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
- jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Pada tahun 2023, sebanyak 82 UPPKB yang beroperasi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 567 Tahun 2022 tentang Pengoperasian Fasilitas Penimbangan di Seluruh Indonesia.

Selain itu, terdapat beberapa dasar hukum yang mendukung indikator kinerja persentase pelanggaran pada UPPKB, meliputi:

- Peraturan Direktur Jenderal Nomor SK. 736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Peraturan Direktur Jenderal Nomor KP.4084/AJ.005/DRJD/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor
- Peraturan Direktur Jenderal Nomor SK.5370/KP.108/DRJD/2017 tentang Kompetensi Petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor

• Narasi Kronologi Target

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2023 memiliki target 25 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

- **Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

Berikut adalah beberapa faktor keberhasilan yang dapat mendukung dalam pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:

1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM);
2. Membuat outlook UPPKB;
3. Membuat Pedoman Teknis WIM;
4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Pelayanan UPPKB untuk dapat memenuhi capaian target persentase pelanggaran;
6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736;
7. Pengadaan WIM di UPPKB;
8. Melakukan pengawasan kepada Satpel UPPKB melalui adanya pelaporan data penimbangan secara periodik setiap bulan.

- **Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang menjadi penyebab kegagalan tercapainya IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat:

1. Kurangnya SDM pada UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. Adanya jaminan keselamatan petugas UPPKB;
3. Adanya gejolak di lingkungan masyarakat terhadap penindakan di UPPKB;
4. Masih terdapat beberapa UPPKB yang letaknya sulit untuk dijangkau oleh jaringan internet.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Triwulan III tahun 2023, diperoleh realisasi sebesar 24,99% sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 telah mencapai target Revisi I PK Tahun 2023.

Sehingga :

$$IKK = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\%$$

$$= \frac{54.724}{218.964} \times 100\% = 24,99\%$$

*semakin rendah persentase pelanggaran, semakin baik, semakin tinggi persentase pelanggaran, semakin buruk.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{25 - (24,99 - 25)}{25} \times 100\% = 100,04\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2023 adalah

Tabel II 20 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW III	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas								
SK 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
IKK 1. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua;	27.261.292.000	16.578.729.000	273.886.690	0,87%	2.840.693.008	10,42%	9.458.335.177	57,05%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Mewujudkan Indonesia bebas ODOL dengan cara melakukan pemasangan fasilitas pendukung sistem jembatan timbang online, pengembangan integrasi JTO dengan sistem weight in motion dan sistem ETLE milik Kepolisian;
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan UPPKB terkait dengan pelanggaran ODOL;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.4. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

• Uraian Kegiatan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat;

Tabel II. 20 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3
SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat						
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88			
		Target		88	88	88
		Realisasi		83	83	84
		Capaian		94,32%	94,32%	95,45%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.

II.2.4.1 IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 21 Capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat			
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat			Satuan: Nilai
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Q2
Target		88	88	88
Realisasi		83	83	84
Capaian		94,32%	94,32%	95,45%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat merupakan hasil kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan menggunakan uraian bobot menyesuaikan dengan target Ditjen Perhubungan Darat. Salah satu bobot yang mempengaruhi yaitu tingkat penyerapan Anggaran Satuan Kerja dengan menyesuaikan realisasi anggaran Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- Aspek Perencanaan;
- Aspek Kepegawaian (SDM);
- Aspek Keuangan;
- Aspek Hukum dan Kerjasama.

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Berikut adalah tabel perhitungan nilai bobot pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat:

Tabel II 22 Perhitungan Nilai Bobot pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	35%	
I	SAKIP	20%	
a	Rencana Strategis (Renstra)	4	
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	
	Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥ 1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥ 1 Januari)		
c	Perjanjian Kinerja (PK)	3	
	Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	
	Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
e	Input Aplikasi e-Performance	2	
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
	f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III, II, I	2	
		Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
		Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	
		Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	2	Input Aplikasi e-Planning	15%	
	a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	
	b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5	
	c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5	
B	Indeks Profesionalisme ASN		35%	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5	
	2	Kompetensi	14	
	3	Kinerja	11	
	4	Disiplin	1,5	
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan		30%	
	1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap ≥100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
		Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023 sebesar 84 jika dibandingkan dengan target Revisi I PK tahun 2023 sebesar 88 maka capaian kinerja mencapai 95,45%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.8**. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023)



Gambar II 9 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

a) Aspek Perencanaan;

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.
- c) Aspek Keuangan;
Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.

• Narasi Kronologi Target

Target pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat menggunakan dan mengacu target yang digunakan oleh Ditjen Perhubungan Darat pada Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2020-2024.

• Narasi Faktor Keberhasilan

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan telah diselesaikan secara tepat waktu;
2. Daya serap anggaran satuan kerja Triwulan III Tahun 2023 sudah mencapai 63,34%;
3. Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK) tahun 2021 dan 2022 sudah tuntas 100%.

• Narasi Faktor Kegagalan

Berikut ini adalah faktor yang dapat menjadi potensi kegagalan tercapainya IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat:

1. Pelaksanaan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang tidak tepat waktu;
2. Daya serap anggaran satuan kerja masih dibawah 80%;
3. Pengelolaan dalam melakukan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara masih kurang maksimal;
4. Masih terdapat Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK) yang belum tuntas.

• Narasi Realisasi Kinerja

Berdasarkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023, diperoleh realisasi sebesar 84 sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 telah sesuai dengan target Revisi I PK Tahun 2023.

Sehingga :

Tabel II 23 Keberhasilan Capaian Indikator Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan		35%	
	I	SAKIP	20%	
	a	Rencana Strategis (Renstra)	4	4
		Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥ 1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥ 1 Januari)		

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
	c	Perjanjian Kinerja (PK)	3	3
		Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
		Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
		Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	e	Input Aplikasi e-Performance	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
		Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III, II, I	2	2
		Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
		Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	4
		Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
		Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	2	Input Aplikasi e-Planning	15%	
	a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	4
	b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5	4
	c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5	4
B	Indeks Profesionalisme ASN		35%	
	1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5	8,5
	2	Kompetensi	14	14
	3	Kinerja	11	11
	4	Disiplin	1,5	1,5
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan		30%	
	1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	6
		Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap $\geq 100\%$		
		Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
		Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
	2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	2
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
		Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	10
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		
				84

- Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{84}{88} \times 100\% = 95,45\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023 adalah :

Tabel II 24 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW III	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas								
SK 5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat								
IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana 2. FGD Pedoman Rancang Bangun dan Penyusunan Standar Biaya Operasional Terminal 3. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor 4. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 5. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor 7. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	21.709.455.000	22.548.936.000	4.155.038.877	19,14%	6.307.986.067	29,06%	15.761.994.623	69,90%

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW III	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas								
SK 5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat								
8. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 9. Monitoring dan Indentifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan 10. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan 11. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta 12. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ 13. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan 14. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri 15. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi 16. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 17. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan 18. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan								

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW III	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas								
SK 5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat								
19. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A dan UPPKB di Pulau Jawa 20. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait 21. Pendampingan Transaksi Proyeksi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) 22. Pendampingan Transaksi Proyeksi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) 23. Penyusunan Preliminary Studi KPBU Transit Sistem dan ITS IKN 24. Penyusunan Preliminary Studi KPBU Urban Consolidation Centre IKN 25. Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Umum Massal Perkotaan di KIPP IKN (Tahap 1) 26. Penyediaan Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran, Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024								

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW III	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas								
SK 5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat								
27. Penyusunan Feasibility Study (FS) Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Simpul Kereta Cepat Jakarta-Bandung								

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan dukungan teknis agar dapat mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan sesuai dengan target perjanjian kinerja dan rencana strategis serta dapat mendukung tercapainya program kegiatan sesuai dengan DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2023.
2. Meningkatkan kegiatan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan target waktu yang ditentukan.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
4. Meningkatkan pengusulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang tercatat pada SIMAK-BMN Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

II.2.5 SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

• Uraian Kegiatan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

Tabel II 25 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3
SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73			
		Target		73	73	73
		Realisasi		74,58	74,98	75,39
		Capaian		102,16%	102,71%	103,27%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

II.2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 26 Capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel			
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan			Satuan: Nilai
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Q3
Target		73	73	73
Realisasi		74,58	74,58	75,39
Capaian		102,16%	102,16%	103,27%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum, sebagaimana dijelaskan yaitu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan urusan keprotokolan, ketatausahaan, arsip, kerumatanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal.
2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
3. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada stakeholders (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai implikasi dari tugas dan fungsi yang diampu Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Sumber Data pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui hasil kuesioner sebagai berikut:

1. Hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Terhadap Kinerja Layanan Perkantoran yang ditujukan kepada setiap Pegawai yang bertempat di Kantor Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
2. Hasil kuesioner assessment (penilaian sendiri) yang ditujukan kepada internal sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Cara Menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui perhitungan sebagai berikut :

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
3. Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

Tabel II 27 Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon II	10	
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8	
3	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7	
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III, dan IV diukur melalui kuesioner terlampir

FORM A1

**KUESIONER TINGKAT KEPUASAN
PENYELENGGARAAN PEKANTORAN**

SATUAN KERJA

NAMA
JABATAN
NIK

A. PEKANTORAN

1. Berikut merupakan persepsi atau tingkat pelayanan layanan Pekantoran, dengan indikator 1 (Tidak Nyaman/Baik), 2 (Kurang Nyaman/Baik), 3 (Cukup), 4 (Nyaman/Baik), 5 (Sangat Nyaman/Baik) adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN/URAIAN	PERSEPSI				
		1	2	3	4	5
1	Kondisi Ruang Kerja					
2	Kebersihan Ruang Kerja					
3						
4						
5						
6						

Ket: diisi dengan tanda centang (!"!) pada pilihan persepsi

B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner berikut :

FORM A1

**KUESIONER TINGKAT KEPUASAN
PENYELENGGARAAN PEKANTORAN**

SATUAN KERJA

NAMA
JABATAN
NIK

A. PEKANTORAN

1. Berikut merupakan persepsi atau tingkat pelayanan layanan Pekantoran, dengan indikator 1 (Tidak Nyaman/Baik), 2 (Kurang Nyaman/Baik), 3 (Cukup), 4 (Nyaman/Baik), 5 (Sangat Nyaman/Baik) adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN/URAIAN	PERSEPSI				
		1	2	3	4	5
1	Kondisi Ruang Kerja					
2	Kebersihan Ruang Kerja					
3						
4						
5						
6						

Ket: diisi dengan tanda centang (!"!) pada pilihan persepsi

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

$$x = \frac{95}{81} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}^*} \times 100\%$$

$$x = \frac{50}{81} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata-rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

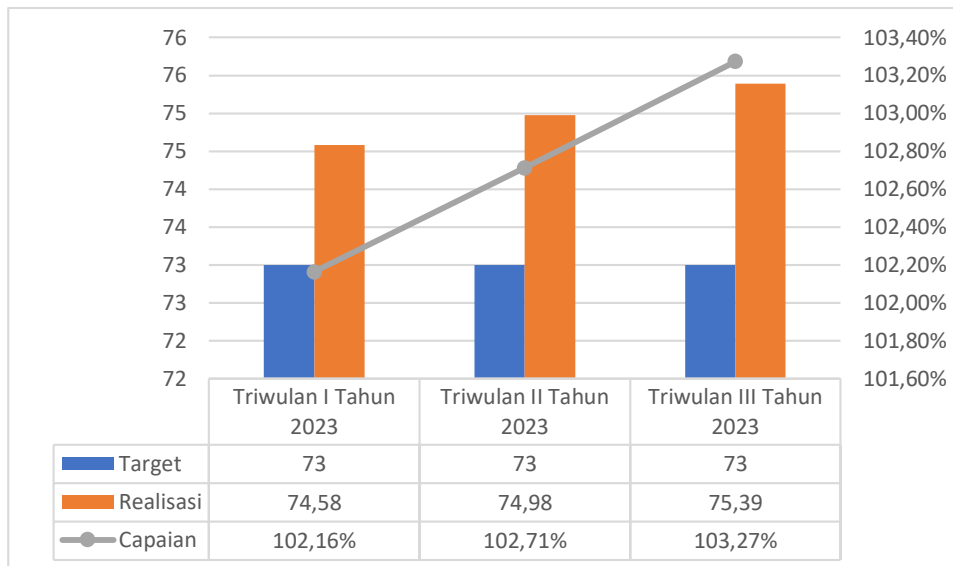
$$x = \frac{2,31}{5} \times 100\%$$

Note:

- *) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security
- **) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (download) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor
- ***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Triwulan III Tahun 2023 sebesar 75,39 jika dibandingkan dengan target Revisi I PK Tahun 2023 sebesar 73 maka capaian kinerja mencapai 103,27%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.9**. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023.



Gambar II 10 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat PrasaranaTransportasi Jalan merupakan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan memperhitungkan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran sesuai dengan target pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Kegiatan yang termasuk dalam Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, yaitu kegiatan layanan perkantoran dan pengadaan belanja modal lainnya.

- **Narasi Kronologi Target**

Target pada IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 menggunakan dan mengacu target yag digunakan oleh Ditjen Perhubungan Darat pada Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2020-2024.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Melakukan survey tingkat kepuasan baik kepada pejabat, maupun staf terkait layanan perkantoran;
2. Meningkatkan ketersediaan pc/laptop dengan menyesuaikan jumlah pegawai;
3. Meningkatkan kecepatan internet (unduh) di kantor.
4. Meningkatkan kesadaran antar pegawai untuk merawat fasilitas yang telah diberikan.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang dapat menjadi potensi kegagalan tercapainya IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023:

1. Ketersediaan PC/laptop masih belum sesuai dengan jumlah pegawai;
2. Kecepatan fasilitas unduh internet masih dibawah standar kecepatan internet;
3. Diperlukan kesadaran pegawai untuk merawat fasilitas yang telah diberikan oleh unit kerja.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023, diperoleh realisasi sebesar 75,39 sehingga capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2023 telah sesuai dengan target Revisi I PK Tahun 2023.

Sehingga :

Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran

NO	URAIAN	BOBOT	HASIL PERHITUNGAN	NILAI	BULAN											
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon II	10%	70,0	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8%	70,0	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60			
3	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7%	70,0	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90			
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	70,0	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50			
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%														
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20%	117,28	23,46	22,62	22,62	22,89	22,35	22,62	23,17	23,46	23,46	23,46			
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15%	66,67	10,00	9,64	9,64	9,76	9,53	9,64	9,88	10,00	10,00	10,00			
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15%	46,2	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93			
TOTAL NILAI				75,39	74,19	74,19	74,58	73,81	74,19	74,98	75,39	75,39	75,39	0,00	0,00	0,00

Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III, dan IV

1. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II = $70 \times 10\%$ (bobot) = **7**
2. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III = $70 \times 8\%$ (bobot) = **5,60**
3. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon IV = $70 \times 7\%$ (bobot) = **4,90**

Tingkat Kepuasan Staf = $70 \times 25\%$ = **17,50**

Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

$$x = \frac{95}{81} \times 100\%$$

$$X = 117,28 \times 20\% \text{ (bobot)} = \mathbf{23,46}$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$

$$x = \frac{54}{81} \times 100\%$$

$$X = 66,67 \times 15\% \text{ (bobot)} = \mathbf{10,00}$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata – rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

$$x = \frac{2,31}{5} \times 100\%$$

$$X = 46,2 \times 15\% \text{ (bobot)} = \mathbf{6,93}$$

$$\text{Total Nilai} = \mathbf{7,00 + 5,60 + 4,90 + 17,50 + 23,46 + 10,00 + 6,93 = 75,39}$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 terhadap target revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{75,39}{73} \times 100\% = 103,27\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 adalah :

Tabel II 28 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
WA. Program Dukungan Manajemen								
SK 1. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel								
IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.657.588.000	6.657.588.000	1.169.116.882	17,56%	1.802.606.861	27,08%	3.664.458.990	55,04%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan layanan perkantoran;
2. Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan target rencana penarikan dana yang ada.
3. Meningkatkan pengawasan pada kegiatan layanan perkantoran.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2023

II.3.1.1 Pagu Anggaran

a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2023

1) Pagu Awal DIPA TA. 2023 sebesar **Rp 58.794.522.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II 29 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2023

	Rp.	58.794.522.000	100,00%
PNBP	Rp.	-	0,00%
SBSN	Rp.	-	0,00%
Total	Rp.	58.794.522.000	100,00%

Total Pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan per Sumber Dana pada Triwulan III Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp48.625.190.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II 30 Rincian per Sumber Dana Pagu Triwulan III TA. 2023

RM	Rp.	48.625.190.000	100,00%
PNBP	Rp.	0	0,00%
SBSN	Rp.	0	0,00%
Total	Rp.	48.625.190.000	100,00%

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2023

Pagu Awal DIPA TA. 2023 sebesar **Rp 58.794.522.000,-** dengan rincian per Jenis Belanja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel II 31 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2023

Belanja Pegawai	Rp.	-	0,00%
Belanja Barang	Rp.	48.797.323.000	83,00%
Belanja Modal	Rp.	9.997.199.000	17,00%
Total	Rp.	58.794.522.000	100,00%

Total Pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan per Jenis Belanja Triwulan III T.A. 2023 adalah sebesar **Rp48.625.190.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II 32 Rincian per Jenis Belanja Pagu Triwulan III TA. 2023

Belanja Pegawai	Rp.	0	0,00%
Belanja Barang	Rp.	43.165.920.000	88,77%
Belanja Modal	Rp.	5.459.270.000	11,23%
Total	Rp.	48.625.190.000	100,00%

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Pada Triwulan III Tahun 2023 terdapat revisi anggaran pada Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berupa Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KU.002/1/12/DRJD/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Usulan Revisi Anggaran T.A. 2023 dan Surat Usulan Revisi Anggaran Nomor KU.002/62/SDPTJ/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Usulan Revisi Anggaran T.A. 2023.

II.3.1.2. Refocussing/Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2022

Terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* Belanja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat sesuai surat DJA sebagai berikut:

1. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KU.002/1/12/DRJD/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Usulan Revisi Anggaran T.A. 2023 dengan Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap pada DIPA Satker-Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, TA 2023 (Revisi ke-1);
2. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KU.002/62/SDPTJ/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Usulan Revisi Anggaran T.A. 2023.

Pada Tahun 2023 terdapat revisi Revisi Anggaran dengan pagu anggaran menjadi sebesar Rp.48.625.190.000,00.

Tabel II 33 Histori Revisi Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2023

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	58.794.522.000	-	-	58.794.522.000
REVISI KE-1	58.794.522.000	-	-	58.794.522.000
REVISI KE-2	50.135.322.000	-	-	50.135.322.000
REVISI KE-3	48.625.190.000	-	-	48.625.190.000

Tabel II 34 Histori Revisi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	-	48.797.323.000	9.997.199.000	58.794.522.000
REVISI KE-1	-	51.021.323.000	7.773.199.000	58.794.522.000
REVISI KE-2	-	44.500.323.000	5.634.999.000	50.135.322.000
REVISI KE-3	-	43.165.920.000	5.459.270.000	48.625.190.000

Tabel II 35 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
Belanja Barang	48.797.323.000	2.224.000.000	51.021.323.000	6.521.000.000	44.500.323.000
Belanja Modal	9.997.199.000	2.224.000.000	7.773.199.000	2.138.200.000	5.634.999.000
TOTAL	58.794.522.000	-	58.794.522.000	- 8.659.200.000	50.135.322.000

	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN III
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	44.500.323.000	- 1.334.403.000	43.165.920.000
Belanja Modal	5.634.999.000	- 175.729.000	5.459.270.000
TOTAL	50.135.322.000	- 1.510.132.000	48.625.190.000

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi).

Tabel II 36 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2023

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I	
				REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	25.227.734.000	25.227.734.000	3.057.664.058	12,12%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	25.227.734.000	25.227.734.000	3.057.664.058	12,12%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	33.566.788.000	33.566.788.000	3.353.791.882	14,12%
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	9.070.700.000	9.070.700.000	-	0,00%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	23.746.088.000	23.746.088.000	3.353.791.882	14,12%
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	750.000.000	750.000.000	0	0,00%
GRAND TOTAL		58.794.522.000	58.794.522.000	6.411.455.940	10,90%

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	25.227.734.000	25.227.734.000	3.057.664.058	31,90%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	25.227.734.000	25.227.734.000	8.046.540.438	31,90%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	33.566.788.000	24.907.588.000	5.090.995.588	20,44%
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	9.070.700.000	411.500.000	-	0,00%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	23.746.088.000	23.746.088.000	4.954.088.188	20,86%
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	750.000.000	750.000.000	136.907.400	18,25%
GRAND TOTAL		58.794.522.000	50.135.322.000	13.137.536.026	26,20%

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III	
				REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	25.227.734.000	25.022.676.000	17.620.462.237	70,42%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	25.227.734.000	25.022.676.000	17.620.462.237	70,42%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	33.566.788.000	23.602.514.000	13.178.182.230	55,83%
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	9.070.700.000	411.500.000	199.356.000	48,45%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	23.746.088.000	22.506.477.000	12.431.196.630	55,23%
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	750.000.000	684.537.000	547.629.600	80,00%
GRAND TOTAL		58.794.522.000	48.625.190.000	30.798.644.467	63,34%

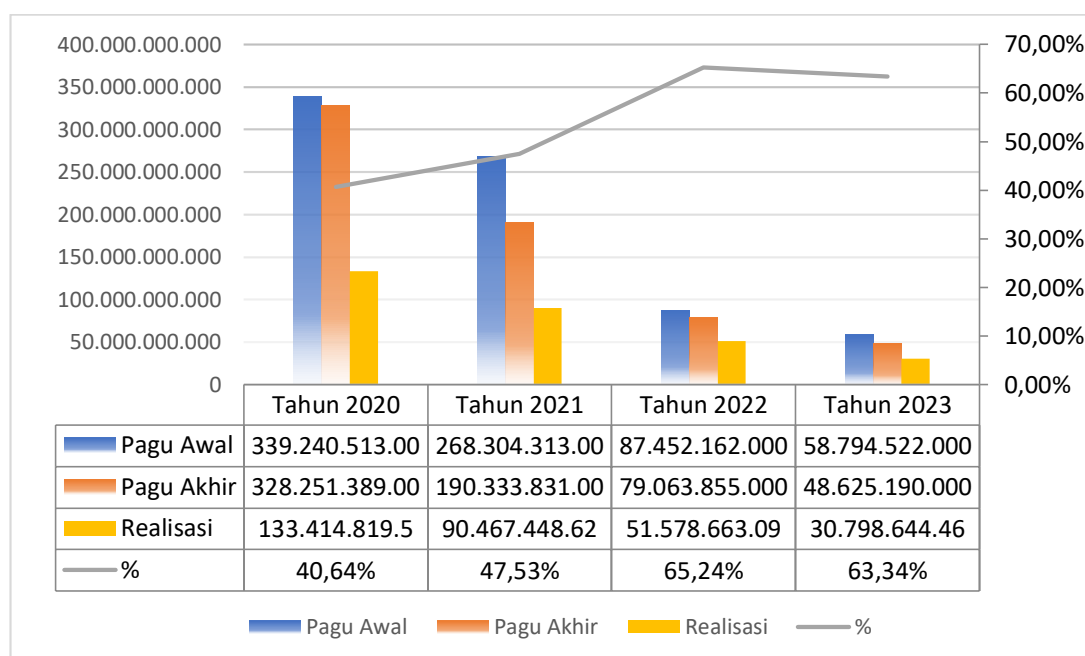
Sumber: Data diolah dari Direktur Prasarana Transportasi Jalan

II.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 37 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2023
(Triwulan III)

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	133414819536	%
1	2020	339.240.513.000	328.251.389.000	133.414.819.536	40,64%
2	2021	268.304.313.000	190.333.831.000	90.467.448.628	47,53%
3	2022	87.452.162.000	79.063.855.000	51.578.663.093	65,24%
4	2023	58.794.522.000	48.625.190.000	30.798.644.467	63,34%



Gambar II 11 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran
Tahun 2020 – Tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020 anggaran yang terserap pada Triwulan III Tahun 2020 sebesar Rp133.414.819.536,- atau mencapai 40,64% dari pagu akhir Rp328,251,389,000,-. Sedangkan pada tahun 2021 tingkat serapan anggaran Triwulan III Tahun 2021 yaitu sebesar Rp90.467.448.628,- atau mencapai 47,53% dari pagu akhir tahun 2021 yaitu sebesar Rp190,333,831,000,-. Sedangkan pada tahun 2022 tingkat serapan anggaran Triwulan III Tahun 2022 yaitu sebesar Rp51.578.663.093,- atau mencapai 65,24% dari pagu akhir tahun 2022 yaitu sebesar Rp79.063.855.000,-. Pada tahun 2023 tingkat serapan anggaran Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebesar Rp30.798.644.467,- atau mencapai 63,34% dari pagu akhir triwulan III Tahun 2023 yaitu sebesar Rp48.625.190.000,-.

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

II.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II 38 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I	
				REALISASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	25.227.734.000	25.227.734.000	3.057.664.058	12,12%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	25.227.734.000	25.227.734.000	3.057.664.058	12,12%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	33.566.788.000	33.566.788.000	3.353.791.882	14,12%
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	9.070.700.000	9.070.700.000	-	0,00%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	23.746.088.000	23.746.088.000	3.353.791.882	14,12%
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	750.000.000	750.000.000	-	0,00%
GRAND TOTAL		58.794.522.000	58.794.522.000	6.411.455.940	10,90%

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALISASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	25.227.734.000	25.227.734.000	3.057.664.058	31,90%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	25.227.734.000	25.227.734.000	8.046.540.438	31,90%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	33.566.788.000	24.907.588.000	5.090.995.588	20,44%
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	9.070.700.000	411.500.000	-	0,00%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	23.746.088.000	23.746.088.000	4.954.088.188	20,86%
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	750.000.000	750.000.000	136.907.400	18,25%
GRAND TOTAL		58.794.522.000	50.135.322.000	13.137.536.026	26,20%

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III	
				REALISASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	25.227.734.000	25.022.676.000	17.620.462.237	70,42%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	25.227.734.000	25.022.676.000	17.620.462.237	70,42%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	33.566.788.000	23.602.514.000	13.178.182.230	55,83%
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	9.070.700.000	411.500.000	199.356.000	48,45%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	23.746.088.000	22.506.477.000	12.431.196.630	55,23%
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	750.000.000	684.537.000	547.629.600	80,00%
GRAND TOTAL		58.794.522.000	48.625.190.000	30.798.644.467	63,34%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Triwulan III Tahun 2023 sebesar 30.798.644.467,- atau sebesar 63,34%.

II.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja dan Per Jenis Sumber Dana Tahun 2023

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2023 yang sudah di analisis per Triwulan III, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 39 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI	REALISASI TW I	
		(TW I)		
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	51.021.323.000	6.411.455.940	12,57%
3	Belanja Modal	7.773.199.000	-	0,00%
TOTAL		58.794.522.000	6.411.455.940	10,90%

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI	REALISASI TW II	
		(TW II)		
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	44.500.323.000	12.265.743.136	27,56%
3	Belanja Modal	5.634.999.000	871.792.890	15,47%
TOTAL		50.135.322.000	13.137.536.026	26,20%

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III	
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	43.165.920.000	26.698.549.366	61,85%
3	Belanja Modal	5.459.270.000	4.100.095.101	75,10%
TOTAL		48.625.190.000	30.798.644.467	63,34%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2023 dari Triwulan III sebesar Rp30.798.644.467,00 atau sebesar 63,34%.

Tabel II 40 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan I-II 2023

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I	
		Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	58.794.522.000	6.411.455.940	10,90%
2	PNBP	-	-	-
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		58.794.522.000	6.411.455.940	10,90%

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II	
		Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	50.135.322.000	13.137.536.026	26,20%
2	PNBP	-	-	-
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		50.135.322.000	13.137.536.026	26,20%

Tabel II 41 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan III 2023

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III	
		Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	48.625.190.000	30.798.644.467	63,34%
2	PNBP	-	-	-
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		48.625.190.000	30.798.644.467	63,34%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2023 dari Triwulan III sebesar Rp30.798.644.467,- atau sebesar 63,34%.

II.3.2.3 Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Dari total pagu anggaran triwulan III Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar Rp. 48.625.190.000,- (Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp. 30.798.644.467,- (Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 63,34%.

Pada Triwulan III tahun 2023, terdapat 16 (enam belas) kegiatan kontraktual dengan seluruh kegiatan sudah kontrak .

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II. 3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan III Tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II 42 Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan II)
1	SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	100,00%	13,00%	87,00%	100,63%	28,32%	72,31%
2	SK2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	110,54%	15,01%	95,53%	109,65%	37,31%	72,34%
3	SK3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	73,24%	0,87%	72,37%	82,36%	9,26%	73,10%
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	94,32%	13,14%	81,18%	94,32%	29,06%	65,26%
5	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	102,00%	12,49%	89,51%	102,71%	27,08%	75,64%
Total		96,02%	10,90%	85,12%	101,83%	26,20%	75,63%

No	Sasaran Kegiatan		Triwulan III		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan III)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	100,95%	65,40%	35,55%
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	111,44%	70,05%	41,39%
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	100,04%	57,05%	42,99%
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	95,45%	69,14%	26,31%
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	103,27%	55,04%	48,23%
Total			102,23%	63,34%	38,89%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 102,23%, dengan realisasi anggaran sebesar 63,34% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 38,89%.

II. 3.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel II 43 Perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM

No	Sasaran Kegiatan	Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	% Capaian SDM	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	Efisiensi (posisi Triwulan II)
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	25	19	17%	100,95%	24,95%
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	25	15	60%	111,44%	51,44%
3	SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	25	14	56%	100,04%	44,04%
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	30	26	93%	95,45%	8,78%
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	20	7	35%	103,27%	68,27%
Total		125	81	64%	102,23%	39,50%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Triwulan III sebesar 102,23%, dengan Capaian Sumber Daya Manusia menunjukkan adanya efisiensi Sumber Daya Manusia sebesar 39,50%, dimana walaupun masih ada kekurangan Sumber Daya Manusia tetapi masih bisa mencapai target kinerja.

II.3.3.3 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023:

1. Terdapat *Automatic Adjustment* anggaran untuk kegiatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda Tahun Anggaran 2023 sehingga mengakibatkan tidak bertambahnya capaian kinerja indikator kinerja kegiatan Persentase penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda.
2. Membutuhkan koordinasi yang lebih intens dan komprehensif dengan stakeholder terkait agar kegiatan monitoring atau evaluasi menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi kinerjanya maupun realisasi anggaran.
3. Berdasarkan hasil review secara periodik, dibutuhkan adanya monitoring kinerja dan evaluasi kegiatan sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.



BAB III

PENUTUP

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023 ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Beberapa poin yang dapat disampaikan pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ini, secara keseluruhan kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023, terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($SK \geq 100\%$) dan 2 (dua) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq SK < 100\%$)
2. Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2023, Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dari 9 (sembilan) IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 8 (delapan) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 1 (satu) status merah dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan III tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$):

- 1) Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terealisasi **0,62** (target tahun 2023 sebesar 0,62), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
- 2) Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi terealisasi sebesar **108** lokasi (target tahun 2023 sebesar 105 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **102,86%**;
- 3) Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terealisasi sebesar **12** lokasi (target tahun 2022 sebesar 12 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
- 4) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **97,54%** (target tahun 2023 sebesar 81,00) dengan Capaian Kinerja sebesar **120,42%**;
- 5) Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **59,02%** (target tahun 2023 sebesar 53,7%), dengan capaian kinerja sebesar **109,91%**;
- 6) Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A terealisasi **81,75%** (target tahun 2023 sebesar 78,6%), dengan capaian kinerja sebesar **104,01%**;
- 7) Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terealisasi sebesar **24,99%** (target tahun 2023 sebesar 25%), dengan capaian kinerja sebesar **100,04%**.

- 8) Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terealisasi **75,39** (target tahun 2023 sebesar 73), dengan capaian kinerja sebesar **103,27%**;

Indikator Kinerja Kegiatan dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq \text{IKP} < 100\%$) :

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebesar **84** (target tahun 2023 sebesar 88), dengan capaian kinerja sebesar **95,45%**;

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran Kinerja adalah sebesar **102,23%** dan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja kegiatan adalah sebesar **104,00%**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara berkala.

3. Total pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada triwulan III T.A. 2023 adalah sebesar Rp.48.625.190.000,00 dengan realisasi anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp30.798.644.467,00 (63,34%);
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - b. Melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka penyerapan realisasi anggaran;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
 - d. Memaksimalkan peran SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi demi tercapainya target capaian kinerja.

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				(12)	(13)	(14)
1	S K 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,62	0,62	100,00%	0,62	0,62	100,00%	0,62	0,62	100,00%	TERCAPAI	Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105	105	100,00%	105	107	101,90%	105	108	102,42%	TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan operasional Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Barang untuk Umum melalui: 1. Konsistensi jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 108 Terminal. 2. Menetapkan lokasi terminal tipe A dan Terminal Barang Untuk Umum baru sesuai dengan skala prioritas berdasarkan hasil pengkajian lebih lanjut; 3. Meningkatkan kegiatan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A. 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 5. Mengoperasikan Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai dibangun meskipun kendaraan barang belum ada yang masuk terminal supaya bangunan tetap terawat dengan baik; 6. Tetap melanjutkan progres pembangunan Terminal Barang Untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan diprioritaskan pada Terminal Barang Untuk Umum yang memiliki permintaan/demand yang cukup besar. 7. Koordinasi dengan pihak terkait khususnya instansi yang membidangi Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) dikarenakan operasional Terminal Barang Untuk Umum yang menangani ekspor impor harus memiliki izin ICQS.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Lokasi	12	12	100,00%	12	12	100,00%	12	12	100,00%	TERCAPAI	1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas. 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	S K 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00	81,00	93,64	115,60%	81,00	93,19	115,05%	81,00	97,54	120,42%	TERCAPAI	Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terkait pelayanan terminal melalui : 1. Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengingatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya. 2. Tersedianya aplikasi Aplikasi 3A IPK-IKM untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa Terminal Tipe A. 3. Perbaikan layanan antara lain perbaikan sarana dan prasarana; 4. Mensosialisasikan informasi terkait prosedur layanan dan produk layanan yang ada secara bertahap serta penerapan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa;	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,7	53,7	59,02	109,91%	53,7	59,02	109,91%	53,7	59,02	109,91%	TERCAPAI	Mengoptimalkan fasilitas yang ada pada Terminal Tipe A melalui : 1. Melakukan rehabilitasi dan peningkatan Terminal Tipe A sebanyak mungkin agar standar terminal bisa merata; 2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun Training kepada Satuan Pelayanan Terminal; 3. Melaksanakan kegiatan pelayanan prima pada Terminal. 4. Melakukan evaluasi paruh waktu renstra.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,6	78,6	83,41	106,12%	78,6	81,75	104,01%	78,6	81,75	104,01%	TERCAPAI	Meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal meliputi: 1. Menerapkan Terminal Online System (TOS) pada seluruh Terminal Tipe A; 2. Melakukan peningkatan SDM melalui training dan Bimtek terkait Terminal Online System (TOS); 3. Menambah biaya operasional pada satuan pelayanan untuk mendukung terlaksananya smart terminal sehingga persentase penerapan smart terminal dapat meningkat.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
4	S K 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25	25	31,69	73,24%	25	29,41	82,36%	25	24,99	100,04%	TERCAPAI	Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM); 2. Sudah terdapat konsep outlook UPPKB; 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR DRJD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Sudah terdapat konsep Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Pelayanan UPPKB untuk dapat memenuhi capaian target persentase pelanggaran; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736; 7. Melakukan pengawasan kepada Satpel UPPKB melalui adanya pelaporan data penimbangan secara periodik setiap bulan.	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
5	S K 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88	88	83	94,32%	88	83	94,32%	88	84	95,45%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan cara: 1. Pada aspek perencanaan akan melaksanakan penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan secara tepat waktu; 2. Pada aspek kepegawaian, melakukan <i>updating</i> sistem kepegawaian, membuat laporan bulanan kinerja pegawai setiap bulan melalui AP2Kp, dan membuat penilaian kinerja pegawai setiap akhir tahun.	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				(12)	(13)	(14)
																	3. Pada aspek keuangan, melakukan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan rapat Kemajuan Realisasi Kegiatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang rutin dilaksanakan pada hari senin.	Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73	73	74,58	102,16%	73	74,98	102,72%	73	75,39	103,27%	TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, meliputi: 1. Terdapat pengadaan PC dan Printer pada Tahun Anggaran 2023; 2. Menambah kecepatan jaringan internet untuk memudahkan kegiatan layanan perkantoran.	Subbag Tata Usaha



LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0.67
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	111
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	lokasi	20
2	SK.2 Meningkatkan Kinerja pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81.00
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53.70
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78.60
3	SK.3 Meningkatkan keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25
4	SK.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	nilai	88
5	SK.1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	nilai	73

Jakarta, 2 Desember 2022

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Ir. M. POPIK MONTANASYAH., M.T.

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630910 199203 1 003



RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PARAF PERSETUJUAN	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SK.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0.67		Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	111		Subdit Faspim
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	lokasi	20		Subdit Terminal Angkutan Jalan
2	SK.2 Meningkatkan Kinerja pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81		Subdit Faspim
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	54		Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	79		Subdit Terminal Angkutan Jalan
3	SK.3 Meningkatkan keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25		Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SK.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	nilai	88		Subdit Terminal Angkutan Jalan,
						Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
						Subdit Faspim
						Subdit KP
						Subbag Tata Usaha
5	SK.1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	nilai	73		Subbag Tata Usaha

Jakarta, 2 Desember 2022

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI

Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630910 199203 1 003



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

PERJANJIAN KINERJA

2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. M. Popik Montanasyah., M.T.

Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pihak Pertama
Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Ir. M. POPIK MONTANASYAH., M.T.
NIP. 19630910 199203 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2		3		4	5
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,62
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	105
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	lokasi	12
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,70
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,60
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	nilai	88
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	nilai	73

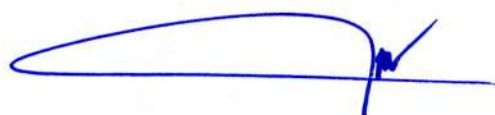
Kegiatan

Anggaran

1. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	25.227.734.000,00
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	9.070.700.000,00
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	23.746.088.000,00
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp.	27.218.804.000,00

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Jakarta, 3 Januari 2023
Direktur Prasarana Transportasi Jalan



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.



Ir. M. POPIK MONTANASYAH., M.T.
NIP. 19630910 199203 1 003



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	RENCANA PELAKSANAAN												(19)	(20)
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	SK.1	Meningkatnya Efektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar moda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62												865.307.000	Subdit TAJ Subdit Fasipim
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105												500.000.000	Subdit TAJ
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12												432.896.000	Subdit Fasipim
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	(%)	81													Subdit TAJ
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	(%)	53,7												860.346.000	Subdit TAJ
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	(%)	78,6												507.638.000	Subdit TAJ
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	(%)	26												27.261.292.000	Subdit PKB
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88												21.709.455.000	Subdit TAJ Subdit PKB Subdit Fasipim Subdit KP Subbag Tata Usaha
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat	Nilai	73												6.657.588.000	Subbag Tata Usaha

Jakarta, 3 Januari 2023

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Dr. M. POPKE MONTANARYAN, M.T.
Pejabat Utama Madhya (IV/d)
NIP. 19630910 199203 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERHUBUNGAN DARAT

C-VIII-154

Surat Dari	: Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha (Disposisi Dirjen Hubdat)
Nomor Surat	: 275/DPTJ/VIII/2023
Tanggal Surat	: 16/08/2023
Perihal	Permohonan Tanda Tangan Konsep Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 da rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dirktorat Prasarana Transportasi Jalan
Diterima Tanggal	: 04/09/2023
No Agenda	: C-VIII-154

☐	KSD 1	SUBDIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
☐	KSD 2	SUBDIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
☐	KSD 3	SUBDIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
☐	KSD 4	SUBDIREKTORAT KEPENGUSAHAAN
☒	KSB	KASUBBAG TATA USAHA
☐		SESPRI
☐		PARA PPK
☐		SEKRETARIS SATKER

ISI DISPOSISI

☒ Tindak Lanjuti	☐ Untuk Diketahui
☐ Tanggapan/Saran	☐ Untuk Dipelajari & Laporkan
☐ Harap Mewakili	☒ Untuk Diselsaikan & Laporkan
☐ Hadir Bersama Saya	☐ Untuk Dilaksanakan & Laporkan
☐ Siapkan Bahan	☒ Untuk Dikoordinasikan
☐ Jadwalkan	☐ Untuk Disiapkan
☐ Hadiri	☐ Sangat Segera
☐ Segera	☐ Untuk Ditanggapi

CATATAN DISPOSISI

04
18/9/2023
SUSANTY PERTIWI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERHUBUNGAN DARAT

C-VIII-154

Surat Dari	: Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha (Disposisi Dirjen Hubdat)
Nomor Surat	: 275/DPTJ/VIII/2023
Tanggal Surat	: 16/08/2023
Perihal	: Permohonan Tanda Tangan Konsep Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 da rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dirktorat Prasarana Transportasi Jalan
Diterima Tanggal	: 23/08/2023
No Agenda	: C-VIII-154

☐	KSD 1	SUBDIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
☐	KSD 2	SUBDIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
☐	KSD 3	SUBDIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
☐	KSD 4	SUBDIREKTORAT KEPENGUSAHAAN
☒	KSB	KASUBBAG TATA USAHA
☐		SESPRI
☐		PARA PPK
☐		SEKRETARIS SATKER

ISI DISPOSISI

☒ Tindak Lanjuti	☐ Untuk Diketahui
☐ Tanggapan/Saran	☐ Untuk Dipelajari & Laporkan
☐ Harap Mewakili	☐ Untuk Diselsaikan & Laporkan
☐ Hadir Bersama Saya	☐ Untuk Dilaksanakan & Laporkan
☐ Siapkan Bahan	☒ Untuk Dikoordinasikan
☐ Jadwalkan	☐ Untuk Disiapkan
☐ Hadiri	☐ Sangat Segera
☐ Segera	☐ Untuk Ditanggapi

CATATAN DISPOSISI

Masih ada keha Tim yg olm ktd
yg dilengkapi.
TMS

PLT
23/8/2023
SUSANTY PERTIWI



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta (10110)



LEMBAR DISPOSISI

Yth. Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat		
Surat Diterima	Nomor agenda	N.1006
	Diterima Tanggal	22 Agustus 2023
	Pukul	10.34 WIB
	Dari	Plt. Dir Prasarana Transportasi Jalan
	Nomor surat	275/DJ/VIII/2023
	Tanggal	16 Agustus 2023
	Perihal	Permohonan Tanda Tangan Konsep revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Diteruskan kepada Yth.		
1. ☐ SESDITJEN 2. ☐ DIR. LALULINTAS JALAN 3. ☐ DIR. ANGKUTAN JALAN 4. ☒ DIR. PRASARANA TRANSPORTASI JALAN 5. ☐ DIR. SARANA TRANSPORTASI JALAN 6. ☐ DIR. TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN 7. ☐ SPRI 8. ☐ ADC		
Isi Disposisi		
1. ☐ Tindak Lanjuti 2. ☐ Tanggapan /Saran 3. ☐ Harap Mewakili 4. ☐ Hadir Bersama Saya 5. ☐ Siapkan Bahan 6. ☐ Jadwalkan	1. ☐ Untuk Diketahui 2. ☐ Untuk Dipelajari dan Laporkan 3. ☐ Untuk Diselesaikan dan Laporkan 4. ☐ Untuk Dilaksanakan dan Laporkan 5. ☐ Untuk Dikoordinasikan 6. ☐ Untuk Diarsipkan	
Catatan :		
 Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M		



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

NOTA DINAS

Nomor 275/DPTJ/VIII/2023

Kepada Yth. : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Dari : Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Hal : Permohonan Tanda Tangan Konsep Revisi I Perjanjian
Kinerja Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi
Jalan
Tanggal : 16 Agustus 2023

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor UM.207/55/3/DJPD/2023 tanggal 9 Agustus 2023 perihal Undangan Penyusunan Dokumen Revisi PK dan Renaksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Susanty Pertiwi
NIP. 19740720 199703 2 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

NOTA DINAS

Nomor 275/DPTJ/VIII/2023

Kepada Yth. : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Dari : Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Hal : Permohonan Tanda Tangan Konsep Revisi I Perjanjian
Kinerja Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi
Jalan
Tanggal : 16 Agustus 2023

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor UM.207/55/3/DJPD/2023 tanggal 9 Agustus 2023 perihal Undangan Penyusunan Dokumen Revisi PK dan Renaksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Susanty Pertiwi
NIP. 19740720 199703 2 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

2023



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	M. Alhafiq Wahyu Nabillah, S.T	Ahli Pertama - Pengendali Dampak Lingkungan, Seksi Rancang Bangun Terminal	15/8 ²³	
2.	Diperiksa	Susiani,A.Md LLAJ, ST, MT	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	15/8 ²³	
3.	Diperiksa	Y Prihantoko, S.T., M.Sc.	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	15/08 ²³	
4.	Disetujui	Ahmadi Z.B., ATD, S.E., M.M.	Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	15/8 ²³	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Syifa Azzaria, S.Stat	Ahli Pertama - Statistisi, Seksi Rancang Bangun PKB	15/8 23	
2.	Diperiksa	Dluha My Praba, MT	Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	15/8 23	
3.	Diperiksa	Ayu Nilawati Agustina, SE., M.MTr.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	15/8 23	
4.	Disetujui	Eriza Putra, S.Si, M.M.	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	15/8 23	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Danny Muhammad Muflih	Penyusun Bahan Usaha, Seksi Pengawasan dan Evaluasi	15/8 23	
2.	Diperiksa	Diana Septi Rahayu, S.E., M.T.	Ketua Tim Kelompok Substansi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	15/8 23	
3.	Diperiksa	Rizki Fauzi Rahman, S.SiT, M.Si.	Ketua Tim Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	15/8 23	
4.	Disetujui	Susanty Pertiwi	Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	16/8 23	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ, S.T.	Penyusun Data Kepegawaian	15/8 23	
2.	Diperiksa	Sudarmaji, S.A.P.,M.M.	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	15/8 23	
3.	Disetujui	Susanty Pertiwi	Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan	16/8 23	



REVISI I PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi I Perjanjian Kinerja
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Tahun 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Dwiki Adhitya, S.ST.	Penyusun Rencana dan Program, Seksi Integrasi Moda	15/23 10	
2.	Diperiksa	Jekky Hendri, S.Sos	Ketua Tim Kelompok Substansi Integrasi Moda, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	15/23 8	
3.	Diperiksa	Astri Widiani, A.Md LLAJ, S.E.	Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	15/23 8	
4.	Disetujui	Herman Armanda, S.E., M.T.	Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	15/23 8	

Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sehubungan dengan adanya perubahan pimpinan sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : ST-DRJD 624 Tahun 2023 perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan adanya perubahan anggaran sebagaimana revisi ke 03 DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor: DIPA-022.03.1.352597/2023 tanggal 14 Agustus 2023 maka Perjanjian Kinerja Tahun 2023 perlu dilakukan revisi.

Program yang akan digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah Program Infrastruktur Konektivitas dengan pagu awal sebesar Rp25.227.734.000,00 pada revisi ke 03 DIPA menjadi sebesar Rp25.022.676.000,00 dan Program Dukungan Manajemen dengan pagu awal sebesar Rp33.566.788.000,00 pada revisi ke 03 DIPA menjadi sebesar 23.602.514.000,00.



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susanty Pertiwi

Jabatan : Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Agustus 2023

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Pihak Pertama

Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan

SUSANTY PERTIWI
NIP. 19740720 199703 2 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

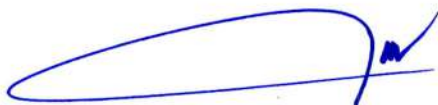
No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,70
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,60
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73

Kegiatan

1. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	25.022.676.000,00
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	411.500.000,00
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	22.506.477.000,00
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp.	684.537.000,00

Anggaran

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, 16 Agustus 2023
Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan



SUSANTY PERTIWI
NIP. 19740720 199703 2 001

**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,62	Rasio	1. Subdit TAJ 2. Subdit Faspim
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	105	Lokasi	Subdit TAJ
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	12	Lokasi	Subdit Faspim
2	SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	81,00	%	Subdit TAJ
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53,70	%	Subdit TAJ
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	78,60	%	Subdit TAJ
3	SK.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	25	%	Subdit PKB
4	SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	88	Nilai	1. Subdit TAJ 2. Subdit PKB 3. Subdit Faspim 4. Subdit KP 5. Subbag Tata Usaha
5	SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	73	Nilai	Subbag Tata Usaha

Lampiran III Nota Dinas Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan
 Nomor : 275/DPTJ/VIII/2023
 Tanggal : 16 Agustus 2023

**TABEL SEMULA MENJADI
 REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target (2022)	Realisasi (2022)	Target Renstra 2023	Target 2023 Semula	Target 2023 Menjadi	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0.61	0.62	0.67	0.62	0.62	Usulan tetap
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	104	105	111	105	105	Usulan tetap
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	11	12	20	12	12	Usulan tetap
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	(%)	80.5	93.43	81	81	81	Usulan tetap
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	(%)	53.65	59.02	53.7	53.7	53.7	Usulan tetap
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	(%)	74.15	83.41	78.6	78.6	78.6	Usulan tetap

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target (2022)	Realisasi (2022)	Target Renstra 2023	Target 2023 Semula	Target 2023 Menjadi	Keterangan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	(%)	30	29	25	25	25	Usulan tetap
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	86	86	88	88	88	Usulan tetap
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	72	74.19	73	73	73	Usulan tetap



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor : ST-DRJD 624 Tahun 2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penunjukan dan Pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
 3. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Alih Jabatan Dalam Jabatan Fungsional Dosen Nomor SK. 1793 Tahun 2023 Tanggal 2 Mei 2023 atas nama Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.

MENUNJUK:

- Kepada :
- Nama : SUSANTY PERTIWI, S.S., M.Hum.
NIP : 19740720 199703 2 001
Pangkat, Gol. Ruang : Pembina Tk.I – IV/b
Jabatan : Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana
- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 29 Mei 2023 untuk menjadi Pelaksana Tugas Direktur Prasarana Transpotasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sampai dengan ditunjuknya pejabat struktural definitif berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan.
 2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan-keputusan yang mengikat.
 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Mei 2023

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kemenhub;
2. Inspektur Jenderal, Kemenhub;
3. Para Direktur, Ditjen Hubdat;
4. Para Kepala Bagian, Setditjen Hubdat.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA,
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : KU.002/62/SDPTJ/2023
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran

Jakarta, 9 Agustus 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta

di Jakarta

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
- b. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang menjadi Kewenangan Ditjen Perbendaharaan;
- c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor SP DIPA-022.03.1.352597/2023 tanggal 30 November 2022 (revisi ke-2 tanggal 10 April 2023) Kode Digital Stamp: 6080-4347-0212-0787

2. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tema revisi : Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap
- b. Mekanisme : - Pergeseran anggaran antar KRO/RO pada antar Satker revisi dalam satu wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
- Perubahan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA.

3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:

- a. Menunjang kelancaran kegiatan operasional di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
- b. Meningkatkan efektivitas, kualitas belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung sebagai berikut :

- a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
- b. ADK RKA-KL DIPA Revisi;
- c. DIPA Petikan sebelum Revisi;
- d. Konsep DIPA sesudah Revisi;
- e. Data pendukung lainnya.

Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua

5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kebenaran formil dan materiil usulan revisi anggaran yang diajukan, dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Revisi Anggaran ini menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

Kuasa Pengguna Anggaran,



Susanty Pertiwi

NIP. 19740720 199703 2 001

Tembusan:

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : SP DIPA- 022.03.1.352597/2023



DS:1002-7073-1931-6360

Revisi ke 03

Tanggal : 14 Agustus 2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (022) | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | Ditjen Perhubungan Darat |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode/Nama Satker | : (352597) | DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN |
| Sebesar | : Rp. | 48.625.190.000 (EMPAT PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH LIMA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

04 EKONOMI

04.08 TRANSPORTASI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 48.625.190.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| 1. KPPN JAKARTA IV | (133) Rp. | 48.625.190.000 |
|--------------------|-----------|----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2023



DS:1002-7073-1931-6360

Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

GA	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp.	25.022.676.000
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	25.022.676.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	23.602.514.000
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	411.500.000
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	22.506.477.000
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp.	684.537.000

DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2023

I A. INFORMASI KINERJA



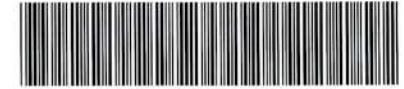
DS:1002-7073-1931-6360

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : I A. 1

Program	:	022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			25.022.676.000
Kegiatan	:	4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat			25.022.676.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	5.268.363.000
Rincian Output	:	01 ABF.001	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	12,00	Rekomendasi Kebijakan	5.268.363.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	34,00	Laporan, Rekomendasi	11.780.313.000
Rincian Output	:	01 FAE.923	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	34,00	Laporan	11.780.313.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	7.974.000.000
Rincian Output	:	01 PBF.209	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional)	(PN)	1,00 Kajian	2.500.000.000
	:	02 PBF.210	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional)	(PN)	1,00 Kajian	2.500.000.000
	:	03 PBF.211	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Dukungan IKN) (Prioritas Nasional)	(PN)	3,00 Rekomendasi Kebijakan	2.974.000.000
Program	:	022.03.WA	Program Dukungan Manajemen			23.602.514.000
Kegiatan	:	4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat			411.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4596.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket	411.500.000
Rincian Output	:	01 EBB.906	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	1,00	unit	411.500.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2023
I A. INFORMASI KINERJA



DS:1002-7073-1931-6360

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

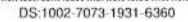
Halaman : I A. 2

Kegiatan	:	4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat			22.506.477.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	2	:	4670.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	22.506.477.000
Rincian Output	:	01	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	22.506.477.000
Kegiatan	:	4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat			684.537.000
	:					
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4671.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	684.537.000
Rincian Output	:	01	ABF.901 Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	1,00	Rekomendasi Kebijakan	684.537.000

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Menteri Perhubungan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

I B. SUMBER DANA



			Pagu	Ekuivalen Rupiah			
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	48.625.190.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	48.625.190.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.	0
2. PNBPN	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	(dalam ribuan rupiah)

[illegible]

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2023

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS-1002-7073-1931-6360

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	-	43.165.920	5.459.270	-	-	48.625.190		
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	-	20.659.443	4.363.233	-	-	25.022.676		
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	-	20.659.443	4.363.233	-	-	25.022.676		
4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	1.655.130	3.613.233	-	-	5.268.363	01.00	
01	RM	-	1.655.130	3.613.233	-	-	5.268.363	133	
4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	11.780.313	-	-	-	11.780.313	01.51	
01	RM	-	11.780.313	-	-	-	11.780.313	133	
4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	7.224.000	750.000	-	-	7.974.000	01.51	
01	RM	-	7.224.000	750.000	-	-	7.974.000	133	
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	-	22.506.477	1.096.037	-	-	23.602.514		
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	-	-	411.500	-	-	411.500		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2023

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1002-7073-1931-6360

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
Kewenangan : (KP)

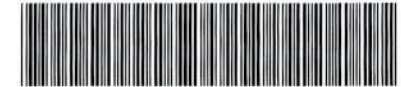
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
4596.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	411.500	-	-	411.500	01 . 51	
01 RM		-	-	411.500	-	-	411.500	133	
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	-	22.506.477	-	-	-	22.506.477		
4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	22.506.477	-	-	-	22.506.477	01 . 51	
01 RM		-	22.506.477	-	-	-	22.506.477	133	
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	-	-	684.537	-	-	684.537		
4671.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	684.537	-	-	684.537	01 . 51	
01 RM		-	-	684.537	-	-	684.537	133	
JUMLAH		-	43.165.920	5.459.270	-	-	48.625.190		

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Menteri Perhubungan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:1002-7073-1931-6360

Kementerian Negara/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (03) Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

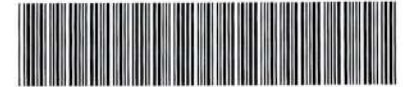
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.161.347	2.922.081	4.909.745	4.377.434	4.898.002	4.059.917	6.654.385	3.968.837	3.746.954	3.579.539	3.618.450	4.728.500	48.625.190
		BELANJA BARANG	738.455	2.499.189	4.486.853	3.954.541	4.475.110	3.637.024	6.138.993	3.226.945	3.324.062	3.156.646	2.906.272	4.621.830	43.165.920
		BELANJA MODAL	422.892	422.892	422.892	422.892	422.892	422.892	515.392	741.892	422.892	422.892	712.178	106.670	5.459.270
		022.03.GA.4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	1.098.847	1.098.847	3.004.966	2.842.163	2.129.838	2.535.267	2.198.284	2.133.923	2.223.039	2.061.425	2.085.466	1.610.611	25.022.676
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	738.455	738.455	2.644.574	2.481.771	1.769.445	2.174.875	1.837.892	1.773.530	1.862.647	1.701.032	1.432.825	1.503.942	20.659.443
		53 BELANJA MODAL	360.392	360.392	360.392	360.392	360.392	360.392	360.392	360.392	360.392	360.392	652.641	106.670	4.363.233
		022.03.WA.4596 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	0	0	0	0	0	0	92.500	319.000	0	0	0	0	411.500
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	92.500	319.000	0	0	0	0	411.500
		022.03.WA.4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	0	1.760.734	1.842.279	1.472.771	2.705.664	1.462.150	4.301.101	1.453.415	1.461.415	1.455.614	1.473.447	3.117.889	22.506.477
	022.03.WA.4671	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	1.760.734	1.842.279	1.472.771	2.705.664	1.462.150	4.301.101	1.453.415	1.461.415	1.455.614	1.473.447	3.117.889	22.506.477
		Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	59.537	0	684.537
		53 BELANJA MODAL	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	59.537	0	684.537

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Menteri Perhubungan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2023
IV A. B L O K I R**



DS:1002-7073-1931-6360

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

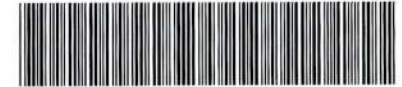
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Menteri Perhubungan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 022.03.1.352597/2023
IV B. C A T A T A N



DS.1002-7073-1931-6360

Kementerian Negara/Lembaga : [022] KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : [03] Ditjen Perhubungan Darat
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [352597] DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
a.n. Menteri Perhubungan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.
Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 48,625,190,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			25,022,676,000	
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat			25,022,676,000	
4640.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana[Base Line]	12.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		5,268,363,000	
4640.ABF.001	Lokasi : DKI JAKARTA Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	12.0 Rekomendasi Kebijakan		5,268,363,000	
501	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana			5,268,363,000	U
A	SUBDIT TERMINAL			985,619,000	
536111	Belanja Modal Lainnya			985,619,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Tipe A Giwangan, Prov. D.I.Yogyakarta	1.0 Paket	296,309,000	296,309,000	
	- Penyusunan Feasibility Stud, Masterplan, dan DED Terminal Tipe A Mandai, Prov. Sulawesi Selatan	1.0 Paket	689,310,000	689,310,000	
B	SUBDIT UPPKB			2,627,614,000	
536111	Belanja Modal Lainnya			2,627,614,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan Analisis Dampak Lalu Lintas Penimbangan Marisa	1.0 Paket	661,193,000	661,193,000	
	- Penyusunan Feasibility Study, Masterplan dan DED Fasilitas Penimbangan Marisa	1.0 Paket	675,946,000	675,946,000	
	- Penyusunan Masterplan dan DED Fasilitas Penimbangan Mentawa Baru dan Kotabaru	1.0 Paket	644,677,000	644,677,000	
	- Penyusunan Masterplan dan DED Fasilitas Penimbangan Datae dan Walenrang	1.0 Paket	645,798,000	645,798,000	
C	SUBDIT FASPIM			1,655,130,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			1,655,130,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Penyusunan Kajian Integrasi Sistem Transportasi di Kawasan Pengembangan Kota Baru Mandiri Maja	1.0 Paket	749,930,000	749,930,000	
	- Penyusunan Kajian Integrasi Sistem Transportasi di Kawasan Pengembangan Kota Baru Mandiri Sofifi	1.0 Paket	905,200,000	905,200,000	
4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Base Line]	34.0 Laporan, Rekomendasi		11,780,313,000	
4640.FAE.923	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	34.0 Laporan		11,780,313,000	
923	Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat			11,780,313,000	U
A	Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan			378,132,000	
521211	Belanja Bahan			43,752,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- ATK dan Suplayer	1.0 thn	43,752,000	43,752,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			44,380,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 thn	44,380,000	44,380,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			290,000,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	290,000,000	290,000,000	
B	Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan			539,957,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 48,625,190,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			41,772,000	RM
	- ATK dan Suplayer	1.0 thn	41,772,000	41,772,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			45,000,000	RM
	- Percetakan, Penggandaan, Akomodasi, dll	1.0 thn	45,000,000	45,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			453,185,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	453,185,000	453,185,000	
C	Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan			507,887,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			40,380,000	RM
	- ATK dan Suplayer	1.0 thn	40,380,000	40,380,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			45,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.0 thn	45,000,000	45,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			422,507,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	422,507,000	422,507,000	
D	Bimbingan teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan			292,086,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			109,470,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	109,470,000	109,470,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			15,100,000	RM
	- Jasa Profesi	1.0 Tahun	15,100,000	15,100,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			29,900,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	29,900,000	29,900,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			50,020,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 thn	50,020,000	50,020,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			87,596,000	RM
	- Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	87,596,000	87,596,000	
E	Bimbingan teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan			194,840,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			57,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	57,000,000	57,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			7,200,000	RM
	- Jasa Profesi	1.0 Tahun	7,200,000	7,200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 48,625,190,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			7,750,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	7,750,000	7,750,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			122,890,000	RM
	- Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	122,890,000	122,890,000	
F	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan			500,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			35,000,000	RM
	- ATK dan Suplayer	1.0 thn	35,000,000	35,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			40,000,000	RM
	- Percetakan, Penggandaan, Akomodasi, dll	1.0 thn	40,000,000	40,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			425,000,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	425,000,000	425,000,000	
G	FGD Pedoman Rancang Bangun dan Penyusunan Standar Biaya Operasional Terminal			320,389,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			90,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	90,000,000	90,000,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.133-Jakarta IV)			9,000,000	RM
	- Sewa Kendaraan	1.0 Tahun	9,000,000	9,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			15,000,000	RM
	- Jasa Profesi	1.0 Tahun	15,000,000	15,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			20,000,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	20,000,000	20,000,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			186,389,000	RM
	- Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	186,389,000	186,389,000	
H	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor			579,841,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			195,120,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	195,120,000	195,120,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			63,900,000	RM
	- Jasa Profesi	1.0 Tahun	63,900,000	63,900,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			54,881,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	54,881,000	54,881,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 48,625,190,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			265,940,000	RM
	- Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	265,940,000	265,940,000	
	Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor			570,101,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			179,720,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	179,720,000	179,720,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			81,600,000	RM
	- Jasa Profesi	1.0 Tahun	81,600,000	81,600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			28,131,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	28,131,000	28,131,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			280,650,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 thn	280,650,000	280,650,000	
	Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor			574,992,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			195,120,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	195,120,000	195,120,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			71,400,000	RM
	- Jasa Profesi	1.0 Tahun	71,400,000	71,400,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			77,992,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	77,992,000	77,992,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			230,480,000	RM
	- Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	230,480,000	230,480,000	
	Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor			417,247,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			23,647,000	RM
	- Belanja Barang Operasional Lainnya	1.0 thn	23,647,000	23,647,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			90,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	90,000,000	90,000,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.133-Jakarta IV)			15,000,000	RM
	- Sewa Kendaraan	1.0 Tahun	15,000,000	15,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			48,600,000	RM
	- Jasa Profesi	1.0 Tahun	48,600,000	48,600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 48,625,190,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			90,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	90,000,000	90,000,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			150,000,000	RM
	- Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	150,000,000	150,000,000	
L	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor			694,526,000 *	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			20,920,000	RM
	- Kebutuhan ATK	1.0 Tahun	20,920,000	20,920,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			92,906,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	92,906,000	92,906,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.133-Jakarta IV)			46,500,000	RM
	- Sewa Kendaraan	1.0 Tahun	46,500,000	46,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			534,200,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	534,200,000	534,200,000	
M	Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor			308,922,000 *	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			24,797,000	RM
	- Kebutuhan ATK	1.0 Tahun	24,797,000	24,797,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			84,125,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	84,125,000	84,125,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.133-Jakarta IV)			19,000,000	RM
	- Sewa Kendaraan	1.0 Tahun	19,000,000	19,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			181,000,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	181,000,000	181,000,000	
N	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor			296,488,000 *	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			66,254,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	66,254,000	66,254,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.133-Jakarta IV)			19,300,000	RM
	- Sewa Kendaraan	1.0 Tahun	19,300,000	19,300,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			210,934,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	210,934,000	210,934,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 48,625,190,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
O	Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua			278,793,000	*
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			95,507,000	RM
	- Belanja Barang Operasional Lainnya	1.0 thn	95,507,000	95,507,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.133-Jakarta IV)			21,250,000	RM
	- Sewa Kendaraan	1.0 Tahun	21,250,000	21,250,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			162,036,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	162,036,000	162,036,000	
P	Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			267,087,000	*
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			77,759,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	77,759,000	77,759,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			23,800,000	RM
	- Jasa Profesi	1.0 Tahun	23,800,000	23,800,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			48,312,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	48,312,000	48,312,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			117,216,000	RM
	- Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	117,216,000	117,216,000	
Q	Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			292,087,000	*
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			15,989,000	RM
	- atk dll	1.0 thn	15,989,000	15,989,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			151,779,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	151,779,000	151,779,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			17,700,000	RM
	- Jasa Profesi	1.0 Tahun	17,700,000	17,700,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			27,799,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	27,799,000	27,799,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			78,820,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	78,820,000	78,820,000	
R	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			148,037,000	*

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
 UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 ALOKASI Rp. 48,625,190,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			8,400,000	RM
	- atk dll	1.0 thn	8,400,000	8,400,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			18,501,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	18,501,000	18,501,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			121,136,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	121,136,000	121,136,000	
S	Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			259,859,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			11,700,000	RM
	- Atk dll	1.0 thn	11,700,000	11,700,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			36,744,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	36,744,000	36,744,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			211,415,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	211,415,000	211,415,000	
T	Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan			267,400,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belanja Barang Operasional Lainnya	1.0 thn	30,000,000	30,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			10,000,000	RM
	- atk dan lain - lain	1.0 thn	10,000,000	10,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			227,400,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	227,400,000	227,400,000	
U	Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBUPrasarana Transportasi Jalan			646,140,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			14,737,000	RM
	- atk dll	1.0 thn	14,737,000	14,737,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.133-Jakarta IV)			226,720,000	RM
	- Honor Output Kegiatan	1.0 thn	226,720,000	226,720,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			59,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	59,000,000	59,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			192,960,000	RM
	- Jasa Profesi	1.0 Tahun	192,960,000	192,960,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 48,625,190,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			112,723,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	112,723,000	112,723,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			20,000,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 Tahun	20,000,000	20,000,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			20,000,000	RM
	- Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	20,000,000	20,000,000	
V	Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta			548,512,000	*
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			10,000,000	RM
	- atk dll	1.0 thn	10,000,000	10,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			201,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	201,000,000	201,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			143,790,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	143,790,000	143,790,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			81,690,000	RM
	- Uang Harian Full Board	105.0 OH	130,000	13,650,000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Full Board	105.0 OH	648,000	68,040,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			112,032,000	RM
	- Paket Meeting Luar Kota	100.0 Tahun	1,000,000	100,000,000	
	- Uang Harian	94.0 OH	128,000	12,032,000	
W	Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ			264,948,000	*
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			58,948,000	RM
	- Kebutuhan ATK	1.0 Tahun	58,948,000	58,948,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			176,000,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	176,000,000	176,000,000	
X	Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan			256,000,000	*
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			12,000,000	RM
	- atk dll	1.0 thn	12,000,000	12,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 48,625,190,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			82,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	82,000,000	82,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			16,000,000	RM
	- Jasa Profesi	1.0 Tahun	16,000,000	16,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			26,000,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	26,000,000	26,000,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			120,000,000	RM
	- Paket Meeting Luar Kota Fullboard	1.0 Tahun	120,000,000	120,000,000	
Y	Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri			865,042,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			75,000,000	RM
	- Belanja Barang Operasional Lainnya	1.0 thn	75,000,000	75,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			45,000,000	RM
	- atk dll	1.0 thn	45,000,000	45,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			75,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	75,000,000	75,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			670,042,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	670,042,000	670,042,000	
Z	Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi			246,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belanja Barang Operasional Lainnya	1.0 thn	30,000,000	30,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- atk dll	1.0 thn	30,000,000	30,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			36,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	36,000,000	36,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			120,000,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	120,000,000	120,000,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Paket Meeting Luar Kota (full Board)	40.0 OH	750,000	30,000,000	
ZA	Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024			174,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 48,625,190,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belanja Barang Operasional Lainnya	1.0 thn	30,000,000	30,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			18,000,000	RM
	- atk dll	1.0 thn	18,000,000	18,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			60,000,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	60,000,000	60,000,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			36,000,000	RM
	- Paket Meeting Luar Kota (full Board)	48.0 OH	750,000	36,000,000	
ZB	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan			155,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			15,000,000	RM
	- Belanja Barang Operasional Lainnya	1.0 thn	15,000,000	15,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			21,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	21,000,000	21,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-Jakarta IV)			9,000,000	RM
	- Jasa Profesi	1.0 Tahun	9,000,000	9,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			20,000,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	20,000,000	20,000,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			90,000,000	RM
	- Paket Meeting Luar Kota (full Board)	120.0 OH	750,000	90,000,000	
ZC	Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan			328,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- atk dll	1.0 thn	30,000,000	30,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			48,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	48,000,000	48,000,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.133-Jakarta IV)			15,000,000	RM
	- Belanja Sewa	1.0 thn	15,000,000	15,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 48,625,190,000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			235,000,000	RM
ZD	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	235,000,000	235,000,000	
	Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A dan UPPKB di Pulau Jawa			440,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	30,000,000	30,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			410,000,000	RM
ZE	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	410,000,000	410,000,000	
	Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait			168,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- Belanja Barang Operasional Lainnya	1.0 thn	30,000,000	30,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.133-Jakarta IV)			30,000,000	RM
	- atk dll	1.0 thn	30,000,000	30,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			48,000,000	RM
	- Belanja Barang Non Operasional	1.0 Tahun	48,000,000	48,000,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.133-Jakarta IV)			15,000,000	RM
	- Belanja Sewa	1.0 thn	15,000,000	15,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.133-Jakarta IV)			45,000,000	RM
	- Perjalanan Dinas Biasa	1.0 Tahun	45,000,000	45,000,000	
4640.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana[Base Line]	5.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		7,974,000,000	

	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
4640.PBF.209	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional)	1.0 Kajian		2,500,000,000	
051	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya)			2,500,000,000	U
A	Pendampingan Transaksi Proyek KPB Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur			2,500,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			2,500,000,000	RM
	Penyiapan Dokumen dan Persyaratan untuk Proses Transaksi Proyek KPB Pengembangan Terminal Puarabaya	1.0 Paket	2,500,000,000	2,500,000,000	
4640.PBF.210	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional)	1.0 Kajian		2,500,000,000	
501	Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing)			2,500,000,000	U
A	Pendampingan Transaksi Proyek KPB Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung			2,500,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
 UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 ALOKASI Rp. 48,625,190,000

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyiapan Dokumen dan Persyaratan untuk Proses Transaksi Proyek KPBU Pengembangan Terminal Betan Subing Lampung	1.0 Paket	2,500,000,000	2,500,000,000 *	RM
4640.PBF.211	Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Dukungan IKN) (Prioritas Nasional)	3.0 Rekomendasi Kebijakan		2,974,000,000	
055	Penyusunan Preliminary Studi KPBU Transit System dan ITS			1,112,000,000	U
A	Penyusunan Preliminary Studi KPBU Transit System dan ITS			1,112,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyusunan Preliminary Studi KPBU Transit Sistem dan ITS IKN	1.0 Paket	1,112,000,000	1,112,000,000	RM
056	Penyusunan Preliminary Study KPBU Urban Consolidation Centre			1,112,000,000	U
A	Penyusunan Preliminary Study KPBU Urban Consolidation Centre			1,112,000,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyusunan Preliminary Studi KPBU Urban Consolidation Centre IKN	1.0 Paket	1,112,000,000	1,112,000,000	RM
060	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Umum Massal Perkotaan di KIPP IKN (Tahap 1)			750,000,000	U
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Umum Massal Perkotaan di KIPP IKN (Tahap1)			750,000,000	
536111	Belanja Modal Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV) - Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Umum Massal Perkotaan di KIPP IKN (Tahap1)	1.0 Paket	750,000,000	750,000,000	RM
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen			23,602,514,000	
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat			411,500,000	
4596.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal(Base Line)	1.0 Unit, m2, Paket		411,500,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
4596.EBB.906	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	1.0 unit		411,500,000	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			411,500,000	U
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi			411,500,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.133-Jakarta IV) - Digitalisasi arsip Direktorat Prasarana Transportasi Jalan - Pengadaan PC All In One - Pengadaan Handy Talky - Pengadaan Sound Portable (ruang rapat) - Pengadaan Printer Hitam Putih - Printer warna - Pengadaan Alat Penghancur Kertas	1.0 unit 5.0 unit 10.0 unit 2.0 unit 5.0 unit 5.0 unit 2.0 unit	200,000,000 25,000,000 2,500,000 6,000,000 3,500,000 5,000,000 3,500,000	200,000,000 125,000,000 25,000,000 12,000,000 17,500,000 25,000,000 7,000,000	RM
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat			22,506,477,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
ALOKASI Rp. 48,625,190,000

Halaman : 13

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		22,506,477,000	

4670.EBA.994	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT				
002	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		22,506,477,000	U
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			22,506,477,000	
	TANPA SUB KOMPONEN			16,260,389,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya			16,260,389,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua	1.0 Paket	15,000,000,000	15,000,000,000	
	Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan				
	Lebaran, Libur Panjang, Natal Tahun 2023 dan Tahun	1.0 Paket	1,260,389,000	1,260,389,000	
	Baru 2024				
B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			6,246,088,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			1,958,672,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Pengadaan Pakaian Dinas Pengemudi dan PPNPN	28.0 Unit	750,000	21,000,000	
	- Honorarium Pramubakti Penunjang Administrasi dan	143.0 OB	4,400,000	629,200,000	
	Teknis (SMA)				
	- Honorarium Pramubakti Penunjang Petugas	26.0 OB	4,500,000	117,000,000	
	Administrasi dan Teknis (D3)				
	- Honorarium Pramubakti Penunjang Petugas	195.0 OB	4,600,000	897,000,000	
	Administrasi dan Teknis (S1)				
	- Honorarium Pengemudi Pejabat Eselon II	13.0 OB	5,344,000	69,472,000	
	- Biaya Minum / Makanan Untuk Rapat	1.0 Tahun	112,500,000	112,500,000	
	- Pengadaan air minum, langganan surat	1.0 Tahun	112,500,000	112,500,000	
	kabar/berita/majalah, langganan bunga/tanaman hias				
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			42,500,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat dan	1.0 Tahun	42,500,000	42,500,000	
	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat				
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			910,320,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Honorarium Staf Pengelola Keuangan	192.0 OB	2,350,000	451,200,000	
	- Honorarium Penanggung Jawab SAI	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Koordinator SAI	12.0 OB	250,000	3,000,000	
	- Honorarium Ketua SAI	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Honorarium Anggota SAI	48.0 OB	150,000	7,200,000	
	- Honorarium Pengurus / Penyimpan BMN	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran	12.0 OB	3,160,000	37,920,000	
	- Honorarium PPK	60.0 OB	4,700,000	282,000,000	
	- Honorarium Penguji dan Penandatanganan SPM	12.0 OB	3,620,000	43,440,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OB	6,330,000	75,960,000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			268,300,000	RM
	(KPPN.133-Jakarta IV)				
	- Belanja Barang Operasional Lainnya	1.0 Tahun	106,250,000	106,250,000	
	- Belanja Barang Keperluan Satker	1.0 thn	162,050,000	162,050,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
 UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 ALOKASI Rp. 48,625,190,000

Halaman : 14

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			14,400,000	RM
	- Honorarium Pejabat Pengadaan	24.0 ob	600,000	14,400,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			518,920,000	RM
	- Pengadaan Toner dan Tinta Mesin Photocopy dan Printer	1.0 Tahun	127,500,000	127,500,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 THN	170,000,000	170,000,000	
	- Pengadaan Seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS)	60.0 Paket	857,000	51,420,000	
	- Belanja Barang Operasional Pendukung Kegiatan Angkutan Lebaran, Angkutan Natal dan Tahun Baru	1.0 thn	170,000,000	170,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			276,250,000	RM
	- Alat Tulis Kantor dan Computer Supplies	1.0 Tahun	170,000,000	170,000,000	
	- Pengadaan Barang Cetakan	1.0 thn	106,250,000	106,250,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			195,500,000	RM
	- Langganan Layanan Internet	1.0 thn	85,000,000	85,000,000	
	- Langganan Bunga Tanaman Hias	1.0 thn	42,500,000	42,500,000	
	- Langganan PLN dan PAM	1.0 thn	68,000,000	68,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			771,400,000	RM
	- Sewa Mesin Photocopy (2 Unit)	1.0 thn	120,000,000	120,000,000	
	- Sewa Gudang Kantor	1.0 THN	200,000,000	200,000,000	
	- Sewa Kendaraan Operasional Kantor (5 Unit)	60.0 U/B	6,690,000	401,400,000	
	- Sewa Vidio Confren	1.0 thn	50,000,000	50,000,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			460,070,000	RM
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	1.0 THN	38,730,000	38,730,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 4	8.0 UNIT	33,650,000	269,200,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Roda 2	1.0 Unit	3,640,000	3,640,000	
	- Biaya STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	8.0 Unit	2,500,000	20,000,000	
	- Biaya STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	1.0 Unit	1,000,000	1,000,000	
	- Biaya Pemeliharaan Peralatan mesin dan elektronik	1.0 Tahun	127,500,000	127,500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			255,000,000	RM
	- Belanja Perjalanan Biasa	1.0 Tahun	255,000,000	255,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			170,000,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.0 Tahun	170,000,000	170,000,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.133-Jakarta IV)			170,000,000	RM
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.0 thn	170,000,000	170,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORG (03) Ditjen Perhubungan Darat
 UNIT KERJA (352597) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
 ALOKASI Rp. 48,625,190,000

Halaman : 15

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.133-Jakarta IV)			234,756,000	RM
	- Paket Meeting Luar Kota	1.0 Tahun	234,756,000	234,756,000	
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat			684,537,000	
4671.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		684,537,000	U
4671.ABF.901	Lokasi : KOTA JAKARTA PUSAT Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana	1.0 Rekomendasi Kebijakan		684,537,000	
051	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana			684,537,000	
C	SUBDIT FASPIM			684,537,000	
536111	Belanja Modal Lainnya (KPPN.133-Jakarta IV)			684,537,000	RM
	Penyusunan Feasibility Study (FS) Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Pada Simpul Kereta Cepat Jakarta- Bandung	1.0 Paket	684,537,000	684,537,000	

JAKARTA, 21 Agustus 2023

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

SUSANTY PERTIWI, S.S., M.HUM
 NIP 197407201997032001

Lampiran V Nota Dinas Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan
 Nomor : 275/DPTJ/VIII/2023
 Tanggal : 16 Agustus 2023

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2023	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SK. 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan DEFINISI : IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah perbandingan jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang direncanakan untuk diakomodir dan dilayani prasarana transportasi jalan. Jumlah KSN Prioritas yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah jumlah KSN Prioritas yang di dalam wilayah administrasinya (kabupaten/kota) terdapat prasarana transportasi jalan yang beroperasi. Simpul prasarana transportasi jalan adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda transportasi jalan yang berupa terminal tipe A, terminal barang serta fasilitas pendukung dan integrasi moda yang berupa halte. Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk dilayani prasarana transportasi jalan meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN.	Rasio	0.62	TERMINAL ANGKUTAN JALAN: 1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan; FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA: Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	1 thn 1 thn 1 thn	1. Subdit TAJ 2. Subdit Faspim

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target PK 2023	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi DEFINISI: Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi adalah jumlah terminal tipe A dan terminal barang di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah memberikan pelayanan berupa adanya aktivitas kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, naik-turun penumpang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Terminal tipe A dan terminal barang kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah terminal tipe A dan terminal barang yang telah ditetapkan lokasinya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan dan telah diserahkan dari Pemerintah Daerah kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.	Lokasi	105	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan	1 thn	Subdit TAJ
			IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda DEFINISI: Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 serta PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.	Lokasi	12	FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA: Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	1 thn	Subdit Faspim

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2023	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	SK. 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A DEFINISI: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A merupakan rekapitulasi hasil Survey Koresponden pada Terminal Penumpang Tipe A melalui aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian survey dilakukan secara periodik setiap bulan oleh penumpang yang diarahkan oleh Petugas Terminal di seluruh Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi di bawah kerwenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang dapat diakses melalui barcode ataupun link survey yang berbeda-beda setiap terminalnya. Barcode untuk mengakses form survey disediakan oleh masing-masing Terminal Tipe A dengan cara di-display melalui poster dan/atau banner ataupun melalui link yang diberikan oleh petugas terminal kepada penumpang di terminal serta disebarakan melalui media sosial masing-masing terminal. Pengisian survey dilakukan dengan cara mengisi data diri dan menjawab pertanyaan terkait dengan pelayanan di terminal dengan memberikan rating dari 1 sampai 6, dengan rating 6 berarti paling memuaskan dan rating 1 paling tidak memuaskan. Rekapitulasi hasil survey seluruh Terminal Tipe A dapat diakses melalui link skm.dephub.go.id dengan cara memasukkan username dan password yang telah terdaftar sebagai admin.	(%)	81	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A (Inventarisasi melalui aplikasi Case Management System IKM)	1 thn	Subdit TAJ
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A DEFINISI: IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Penumpang Tipe A adalah rata-rata dari persentase pemenuhan Standar Pelayanan	(%)	53.7	TERMINAL ANGKUTAN JALAN: Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan	1 thn	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Definisi	Satuan	Target PK 2023	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penyelenggaraan Terminal pada Terminal Penumpang Tipe A beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A didapatkan dari hasil survei penilaian pemenuhan jenis pelayanan yang diberikan nilai berdasarkan indikatornya dibandingkan dengan nilai maksimal yang bisa didapatkan jika semua jenis pelayanan terpenuhi indikatornya. Berdasarkan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A mencakup: (1) Pelayanan Keselamatan dengan bobot nilai 20%; (2) Pelayanan Keamanan dengan bobot nilai 6%; (3) Pelayanan Keandalan/Keteraturan dengan bobot nilai 18%; (4) Pelayanan Kenyamanan dengan bobot nilai 36%; (5) Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan dengan bobot nilai 18%; (6) Pelayanan Kesenjajaran dengan bobot nilai 2%. Survei pemenuhan Standar Penyelenggaraan Terminal pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A dilakukan secara online dengan menyebar kuisioner google form ke seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengisian kuisioner dilakukan dengan menjawab pertanyaan terkait jenis-jenis pelayanan sesuai dengan kondisi di terminal masing-masing. Rekapitulasi hasil pengisian kuisioner seluruh Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat di akun google drive yang digunakan untuk membuat form kuesioner.					

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2023	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A DEFINISI : IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A adalah presentase penerapan digitalisasi di Terminal Penumpang Tipe A yang meliputi : 1. Presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System dengan bobot 74%; 2. Presentase terminal yang dipasang mesin check in tiket dan passenger gate dengan bobot 8,4%; 3. Presentase terminal yang dipasang vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV dengan bobot 17,6%. Bobot nilai ditentukan berdasarkan fokus tujuan pada pelaporan data produksi secara online melalui system. Langkah tersebut merupakan langkah step by step menuju terminal yang smart melalui digitalisasi terminal. Latar belakang yang mendasari rumusan IKK tersebut yaitu karena terdapat perubahan pelaporan data produksi terminal yang semula dilaporkan secara manual kemudian direkap oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berubah menjadi input melalui sistem online sehingga sebagai tahap awal digitalisasi perencanaan 5 tahun melalui Rensta 2020 s.d. 2024 mengutamakan Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia untuk melaporkan data produksi secara online sehingga presentase terminal yang melakukan pelaporan data produksi di SIASATI dan/atau Terminal Online System berkontribusi paling besar yaitu dengan bobot 74%. SIASATI dapat diakses melalui https://siasati.dephub.go.id/ . Selanjutnya dalam rangka menuju terminal yang smart Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merencanakan akan mengaplikasikan digitalisasi terminal dengan memasang alat yang dapat mengirimkan data Terminal secara realtime yaitu mesin check in tiket, passenger gate, vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV. Akan tetapi karena besarnya jumlah Terminal	(%)	78.6	TERMINAL ANGKUTAN JALAN : 1. Bimbingan teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan 2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan	1 thn 1 thn	Subdit TAJ

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2023	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia, sehingga pengaplikasian alat-alat tersebut dilakukan secara bertahap, sehingga dalam indikator kinerja diberikan bobot penilaian sebesar 8,4% dan 17,6%. Vehicle gate, panel informasi digital dan CCTV memiliki bobot yang lebih besar dikarenakan merupakan cerminan dari terminal data produksi Terminal yaitu kendaraan angkutan umum yang keluar masuk Terminal Presentase-presentase di atas didapatkan dari data jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang memenuhi masing-masing kriteria dibandingkan dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi dalam kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan pada saat ini Terminal Penumpang Tipe A di Indonesia berada dalam kewenangan BPTJ (Pemerintah Pusat) untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah Bodetabek, kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk Terminal Penumpang Tipe A di wilayah DKI Jakarta, kewenangan swasta dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk Terminal Penumpang Tipe A yang tidak diserahkan ke pemerintah pusat.					
3	SK. 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat DEFINISI: Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah angkutan barang yang masuk ke UPPKB. Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi: a. tata cara pemuatan barang; b. dimensi kendaraan Angkutan Barang;	(%)	25	PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR : 1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor;	1 thn 1 thn 1 thn	Subdit PKB

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2023	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				c. tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang; d. dokumen Angkutan Barang; e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan f. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.			4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak kedua 5. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua	1 thn 1 paket	
4	SK. 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat DEFINISI: Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari: a) Aspek Perencanaan; b) Aspek Kepegawaian (SDM); c) Aspek Keuangan; Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance. Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin. Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.	Nilai	88	1. Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana 2. FGD Pedoman Rancang Bangun dan Penyusunan Standar Biaya Operasional Terminal 3. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor 4. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 5. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor 7. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 8. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 9. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan	12 rekomendasi kebijakan 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn	1. Subdit TAJ 2. Subdit PKB 3. Subdit Faspim 4. Subdit KP 5. Subbag Tata Usaha

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2023	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							10. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan	1 thn	
							11. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta	1 thn	
							12. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ	1 thn	
							13. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan	1 thn	
							14. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri	1 thn	
							15. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi	1 thn	
							16. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024	1 thn	
							17. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan	1 thn	
							18. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	1 thn	
							19. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A dan UPPKB di Pulau Jawa	1 thn	
							20. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait	1 thn	

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan Definisi		Satuan	Target PK 2023	Kegiatan	Volume	Sumber Data
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada stakeholders (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai implikasi dari tugas dan fungsi yang diampu Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.					



REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN															ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
						Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1	SK.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar moda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0.62	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan; 3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	1,034,056,000	Subdit TAJ Subdit Faspim			
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	500,000,000	Subdit TAJ		
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12	Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	259,859,000	Subdit Faspim		
2	SK.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	(%)	81	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	-	Subdit TAJ			
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	(%)	63.7	Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	539,957,000	Subdit TAJ			
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	(%)	78.6	1. Bimbingan teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan 2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6	486,926,000	Subdit TAJ		
3	SK.3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	(%)	25	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak kedua 5. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	16,578,729,000	Subdit PKB			
4	SK.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukung Teknik Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukung Teknik Transportasi Darat	Nilai	88	1. Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana 2. FGD Pedoman Rancang Bangun dan Penyusunan Standar Biaya Operasional Terminal 3. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor 4. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 5. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor 7. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 8. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 9. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan 10. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyajian dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan 11. Monitoring Pendampingan Dukung Kerjasama Pemerintah dengan Swasta 12. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ 13. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan 14. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri 15. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDPA, Rencat) dan Reformasi Birokrasi 16. Pembahasan Terpadu Penyusunan RRAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 17. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan 18. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 19. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A dan UPPKB di Pulau Jawa 20. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait 21. Penyajian Dokumen dan Persyaratan untuk Proses Transaksi Proyek KPBU Pengembangan Terminal Purabaya 22. Penyajian Dokumen dan Persyaratan untuk Proses Transaksi Proyek KPBU Pengembangan Terminal Betan Subang Lampung 23. Penyusunan Preliminary Studi KPBU Transit Sistem dan ITS IKN 24. Penyusunan Preliminary Studi KPBU Urban Consolidation Centre IKN 25. Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Umum Massal Perkotaan, di KIPP IKN (Tahap 1) 26. Penyediaan Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran, Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 27. Penyusunan Feasibility Study (FS) Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Simpul Kereta Cepat Jakarta-Bandung	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	22,568,075,000	Subdit TAJ Subdit PKB Subdit Faspim Subdit KP Subbag Tata Usaha
5	SK.1 Meningkatkan Efisiensi Biaya Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perhubungan Darat Direktorat	Nilai	73	1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	6,657,588,000	Subbag Tata Usaha			

Jakarta, 16 Agustus 2023

PH. DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

SUBDIT PERTIWI
NIP. 19740720 199703 2 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERHUBUNGAN DARAT

B-VIII-59

Surat Dari	:	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha
Nomor Surat	:	
Tanggal Surat	:	
Perihal	:	Permohonan Tanda Tangan Konsep Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Diterima Tanggal	:	21/08/2023
No Agenda	:	B-VIII-59

☐	KSD 1	SUBDIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
☐	KSD 2	SUBDIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
☐	KSD 3	SUBDIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
☒	KSD 4	SUBDIREKTORAT KEPENGUSAHAAN
☒	KSB	KASUBBAG TATA USAHA
☐		SESPRI
☐		PARA PPK
☐		SEKRETARIS SATKER

ISI DISPOSISI

☒ Tindak Lanjuti	☐ Untuk Diketahui
☐ Tanggapan/Saran	☐ Untuk Dipelajari & Laporkan
☐ Harap Mewakili	☐ Untuk Diselsaikan & Laporkan
☐ Hadir Bersama Saya	☐ Untuk Dilaksanakan & Laporkan
☐ Siapkan Bahan	☒ Untuk Dikoordinasikan
☐ Jadwalkan	☐ Untuk Disiapkan
☐ Hadiri	☐ Sangat Segera
☐ Segera	☐ Untuk Ditanggapi

CATATAN DISPOSISI

ry
21/8.2023
SUSANTY PERTIWI



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

NOTA DINAS

Nomor

Kepada Yth. : Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Dari : Ketua Tim Kelompok Tata Usaha
Hal : Permohonan Tanda Tangan Konsep Revisi I Perjanjian
Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Aksi atas Perjanjian
Kinerja Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi
Jalan
Tanggal : Agustus 2023

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor UM.207/55/3/DJPD/2023 tanggal 9 Agustus 2023 perihal Undangan Penyusunan Dokumen Revisi PK dan Renaksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bersama ini terlampir kami sampaikan konsep Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Revisi I Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Sudarmaji, SAP.,MM
NIP. 19720814 199803 1 003



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

**Kepala Sub Direktorat
Kepengusahaan Prasarana**

2023



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB DIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susanty Pertiwi

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Susanty Pertiwi

Jabatan : Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Pihak Kedua
Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Pihak Pertama
Kepala Sub Direktorat
Kepengusahaan Prasarana

SUSANTY PERTIWI
NIP. 19740720 199703 2 001

SUSANTY PERTIWI
NIP. 19740720 199703 2 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB DIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2		3		4	5
1	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88

Disetujui

Jakarta, 15 Agustus 2023

Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Kepala Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana



SUSANTY PERTIWI
NIP. 19740720 199703 2 001



SUSANTY PERTIWI
NIP. 19740720 199703 2 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

**Ketua Tim Kelompok Substansi
Penyelenggaraan Kemitraan**

2023



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Septi Rahayu, M.T.

Jabatan : Ketua Tim Kelompok Substansi Penyelenggaraan Kemitraan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Susanty Pertiwi, S.S, M.Hum.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Pihak Kedua
Kepala Sub Direktorat
Kepengusahaan Prasarana

Pihak Pertama
Ketua Tim Kelompok Substansi
Penyelenggaraan Kemitraan

SUSANTY PERTIWI, SS, M.Hum
NIP. 19740720 199703 2 001

DIANA SEPTI RAHAYU, M.T.
NIP. 19830903 200604 2 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KELOMPOK SUBSTANSI PENYELENGGARAAN KEMITRAAN
SUB DIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88

Disetujui

Kepala Sub Direktorat
Kepengusahaan Prasarana



SUSANTY PERTIWI, SS, M.Hum
NIP. 19740720 199703 2 001

Jakarta, 15 Agustus 2023

Ketua Tim Kelompok Substansi
Penyelenggaraan Kemitraan



DIANA SEPTI RAHAYU, M.T.
NIP. 19830903 200604 2 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

Ketua Tim Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi

2023



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB DIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Fauzi Rahman, S.SiT., M.Si.

Jabatan : Ketua Tim Kelompok Substansi Pengawasan dan Evaluasi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Susanty Pertiwi, S.S, M.Hum.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Pihak Kedua
Kepala Sub Direktorat
Kepengusahaan Prasarana

SUSANTY PERTIWI, S.S., M.Hum.
NIP. 19740720 199703 2 001

Pihak Pertama
Ketua Tim Kelompok Substansi
Pengawasan Dan Evaluasi

RIZKI FAUZI RAHMAN, S.SiT., M.Si.
NIP. 19890127 201101 1 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KELOMPOK SUBSTANSI PENGAWASAN DAN EVALUASI
SUB DIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88

Disetujui

Kepala Sub Direktorat
Kepengusahaan Prasarana

SUSANTY PERTIWI, S.S., M.Hum.
NIP. 19740720 199703 2 001

Jakarta, 15 Agustus 2023

Ketua Tim Kelompok Substansi
Pengawasan dan Evaluasi

RIZKI FAUZI RAHMAN, S.Si., M.Si.
NIP. 19890127 201101 1 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

Kepala Sub Direktorat
Terminal Angkutan
Jalan

2023



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB DIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmadi Z.B., ATD, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Susanty Pertiwi

Jabatan : Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Pihak Kedua

Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan

SUSANTY PERTIWI
NIP. 19740720 199703 2 001

Pihak Pertama

Kepala Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan

AHMADI ZB, ATD, S.E., M.M.
NIP. 19660513 198903 1 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB DIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2		3		4	5
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,70
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,60
3	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88

Disetujui
Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan



SUSANTY PERTIWI
NIP. 19740720 199703 2 001

Jakarta, 15 Agustus 2023
Kasubdit Terminal Angkutan Jalan



AHMADI Z.B., ATD, S.E., M.M.
NIP. 19660513 198903 1 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

**Ketua Tim Kelompok Substansi
Rancang Bangun Terminal**

2023



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Y Prihantoko, S.T., M.Sc.

Jabatan : Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Terminal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmadi Z.B., ATD, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Pihak Kedua
Kepala Sub Direktorat
Terminal Angkutan Jalan

Pihak Pertama
Ketua Tim Kelompok Substansi
Rancang Bangun Terminal


AHMADI Z.B., ATD, S.E., M.M.
NIP. 19660513 198903 1 001


Y PRIHANTOKO, S.T., M.Sc.
NIP. 19670607 200604 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KELOMPOK SUBSTANSI RANCANG BANGUN TERMINAL
SUB DIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,70
3	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88

Disetujui

Kepala Sub Direktorat
Terminal Angkutan Jalan



AHMADI Z.B., ATD, S.E., M.M.
NIP. 19660513 198903 1 001

Jakarta, 15 Agustus 2023

Ketua Tim Kelompok Substansi
Rancang Bangun Terminal



Y PRIHANTOKO, S.T., M.Sc.
NIP. 19670607 200604 1 002



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

Ketua Tim Kelompok Substansi

Pengelolaan Terminal

2023



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susiani,A.Md LLAJ, ST, MT

Jabatan : Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Terminal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmadi Z.B., ATD, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Pihak Kedua
Kepala Sub Direktorat
Terminal Angkutan Jalan

AHMADI Z.B., ATD, S.E., M.M.
NIP. 19660513 198903 1 001

Pihak Pertama
Ketua Tim Kelompok Substansi
Pengelolaan Terminal

SUSIANI,A.Md LLAJ, ST, MT
NIP. 19840417 200812 2 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KELOMPOK SUBSTANSI PENGELOLAAN TERMINAL
SUB DIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,60
3	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88

Disetujui

Kepala Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan



AHMADI Z.B., ATD, S.E., M.M.
NIP. 19660513 198903 1 001

Jakarta, 15 Agustus 2023

Ketua Tim Kelompok Substansi
Pengelolaan Terminal



SUSIANI, A.Md LLAJ, ST, MT
NIP. 19840417 200812 2 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

**Kepala Sub Direktorat
Penimbangan Kendaraan
Bermotor**

2023



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB DIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eriza Putra, S.SI, M.M.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Susanty Pertiwi

Jabatan : Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Pihak Kedua

Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan

SUSANTY PERTIWI
NIP. 19740720 199703 2 001

Pihak Pertama

Kepala Sub Direktorat
Penimbangan Kendaraan Bermotor

ERIZA PUTRA, S.SI, M.M.
NIP. 19761029 200604 1 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB DIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2		3		4	5
1	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25
2	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88

Disetujui

Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan



SUSANTY PERTIWI
NIP. 19740720 199703 2 001

Jakarta, 15 Agustus 2023

Kepala Sub Direktorat
Penimbangan Kendaraan Bermotor



ERIZA PUTRA, S.SI., M.M.
NIP. 19761029 200604 1 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan
Penimbangan Kendaraan Bermotor

2023



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Nilawati Agustina, S.E., M.M.Tr.

Jabatan : Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eriza Putra, S.SI., M.M.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Pihak Kedua

Kepala Sub Direktorat Penimbangan
Kendaraan Bermotor


ERIZA PUTRA, S.SI., M.M.
NIP. 19761029 200604 1 001

Pihak Pertama

Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan
Penimbangan Kendaraan Bermotor


AYU NILAWATI A., S.E., M.M.Tr.
NIP. 19730829 199603 2 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KELOMPOK SUBSTANSI PENGELOLAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
SUB DIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25
2	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88

Disetujui

Kepala Sub Direktorat
Penimbangan Kendaraan Bermotor


 ERIZA PUTRA, S.Si., M.M.
 NIP. 19761029 200604 1 001

Jakarta, 15 Agustus 2023

Ketua Tim Kelompok Substansi Pengelolaan
Penimbangan Kendaraan Bermotor


 AYU NILAWATI A., S.E., M.M.Tr.
 NIP. 19730829 199603 2 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun
Penimbangan Kendaraan Bermotor

2023



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dluha My Praba, M.T.

Jabatan : Ketua Tim Kelompok Substansi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eriza Putra, S.Si., M.M.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor

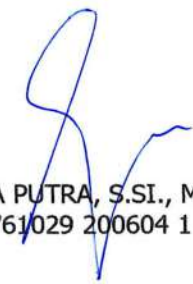
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Pihak Kedua
Kepala Sub Direktorat
Penimbangan Kendaraan Bermotor


ERIZA PUTRA, S.Si., M.M.
NIP. 19761029 200604 1 001

Pihak Pertama
Ketua Tim Kelompok Substansi
Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan
Bermotor


DLUHA MY PRABA, MT
NIP. 19860911 200912 1 004

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KELOMPOK SUBSTANSI RANCANG BANGUN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
SUB DIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25
2	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88

Disetujui

Pihak Kedua
Kepala Sub Direktorat
Penimbangan Kendaraan Bermotor

ERIZA PUTRA, S.SI., M.M.
NIP. 19761029 200604 1 001

Jakarta, 15 Agustus 2023

Ketua Tim Kelompok Substansi
Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan
Bermotor

DLUHA MY PRABA, MT
NIP. 19860911 200912 1 004



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

Kepala Sub Direktorat Fasilitas
Pendukung Dan Integrasi Moda

2023



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB DIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herman Armanda, S.E., M.T.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Susanty Pertiwi

Jabatan : Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Pihak Kedua
Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Pihak Pertama
Kepala Sub Direktorat
Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

SUSANTY PERTIWI
NIP. 19740720 199703 2 001

HERMAN ARMANDA, S.E., M.T.
NIP. 19670502 198903 1 002

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB DIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

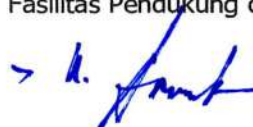
No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62
			IKK 3	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12
2	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88

Disetujui
 Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan



SUSANTY PERTIWI
 NIP. 19740720 199703 2 001

Jakarta, 15 Agustus 2023
 Kepala Sub Direktorat
 Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda



HERMAN ARMANDA, S.E., M.T.
 NIP. 19670502 198903 1 002



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

Ketua Tim Kelompok Substansi

Fasilitas Pendukung

2023



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astri Widiani. AMd. LLAJ, S.E., M.M.Tr.D.

Jabatan : Ketua Tim Kelompok Substansi Fasilitas Pendukung

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Herman Armanda, S.E., M.T.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Pihak Kedua
Kepala Sub Direktorat
Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Pihak Pertama
Ketua Tim Kelompok Substansi
Fasilitas Pendukung

HERMAN ARMANDA, S.E., M.T.
NIP. 19670502 198903 1 002

ASTRI WIDIANI, AMd.LLAJ, S.E., M.M.Tr.D.
NIP. 19740706 199703 2 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KELOMPOK SUBSTANSI FASILITAS PENDUKUNG
SUB DIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12
2	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88

Disetujui

Kepala Sub Direktorat
Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda



HERMAN ARMANDA, S.E., M.T.
NIP. 19670502 198903 1 002

Jakarta, 15 Agustus 2023

Ketua Tim Kelompok Substansi
Fasilitas Pendukung



ASTRI WIDIYANI, AMd.LLAJ, SE, M.M.Tr.D.
NIP. 19740706 199703 2 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

Ketua Tim Kelompok Substansi Integrasi Moda

2023



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jekky Hendri, S.Sos

Jabatan : Ketua Tim Kelompok Substansi Integrasi Moda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Herman Armanda, S.E., M.T.

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Pihak Kedua
Kepala Sub Direktorat
Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

HERMAN ARMANDA, S.E., M.T.
NIP. 19670502 198903 1 002

Pihak Pertama
Ketua Tim Kelompok Substansi
Integrasi Moda

JEKKY HENDRI, S.Sos
NIP. 19711003 199803 1 003

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KELOMPOK SUBSTANSI INTEGRASI MODA
SUB DIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12
2	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88

Disetujui

Kepala Sub Direktorat
Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda



HERMAN ARMANDA, S.E., M.T.
NIP. 19670502 198903 1 002

Jakarta, 15 Agustus 2023

Ketua Tim Kelompok Substansi
Integrasi Moda



JEKKY HENDRI, S.Sos
NIP. 19711003 199803 1 003



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA

Ketua Tim Kelompok
Substansi Tata Usaha

2023



**REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudarmaji, S.A.P.,M.M.

Jabatan : Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Susanty Pertiwi

Jabatan : Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Pihak Kedua

Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan

SUSANTY PERTIWI
NIP. 19740720 199703 2 001

Pihak Pertama

Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha

SUDARMAJI, S.A.P.,M.M.
NIP. 19720814 199803 1 003

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KELOMPOK SUBSTANSI TATA USAHA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2		3		4	5
1	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88
2	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73

Disetujui

Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Jakarta, 15 Agustus 2023

Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha

SUSANTY PERTIWI
NIP. 19740720 199703 2 001

SUDARMAJI, S.A.P., M.M.
NIP. 19720814 199803 1 003

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2023**

BULAN JULI TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-7				REALISASI BULAN-7		% CAPAIAN BULAN-7		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,62	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan;	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,62	0,62	100%	886.019.000	100,00%	0,62	524.203.870	100,00%	59,16%	TERCAPAI	Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	105	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	105	105	100%	500.000.000	100,00%	107	155.406.139	101,90%	31,08%	TERCAPAI	Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu konsistensi jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	12	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	12	12	100%	407.896.000	100,00%	12	327.753.919	100,00%	80,35%	TERCAPAI	1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	81	81	100%	-	100,00%	97,04	-	119,80%	-	TERCAPAI	Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengingatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,7	Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53,7	53,7	100%	539.957.000	100,00%	59,02	131.810.209	109,91%	24,41%	TERCAPAI	Mengoptimalkan fasilitas yang ada pada Terminal Tipe A	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,6	1. Bimbingan teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan 2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	78,6	78,6	100%	486.926.000	100,00%	81,75	486.235.982	104,01%	99,86%	TERCAPAI	Meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
3	SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak kedua 5. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	25	25	100%	16.578.729.000	100,00%	26,04	9.112.138.827	95,84%	54,96%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR DRJ 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalur; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736;	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-7				REALISASI BULAN-7		% CAPAIAN BULAN-7		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN					
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88	1. Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana 2. FGD Pedoman Rancang Bangun dan Penyusunan Standar Biaya Operasional Terminal 3. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor 4. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 5. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor 7. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 8. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 9. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan 10. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBu Prasarana Transportasi Jalan 11. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta 12. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ 13. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan 14. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri 15. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PODA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi 16. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 17. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan 18. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 19. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A dan UPRKB di Pulau Jawa 20. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBu) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBu) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subang) 23. Penyusunan Preliminary Studi KPBu Transit Sistem dan ITS IKN 24. Penyusunan Preliminary Studi KPBu Urban Consolidation Centre IKN 25. Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Umum Massal Perkotaan di KIPP IKN (Tahap 1) 26. Penyediaan Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran, Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 27. Penyusunan Feasibility Study (FS) Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Simpul Kereta Cepat Jakarta-Bandung	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	88	88	100%	24.078.207.000	100,00%	83	11.411.695.302	94,32%	47,39%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73	1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	73	73	100%	6.657.588.000	100,00%	75,26	2.439.938.388	103,10%	36,65%	TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subbag Tata Usaha

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2023**

BULAN AGUSTUS TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-8				REALISASI BULAN-8		% CAPAIAN BULAN-8		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN					
								volume	%	volume	%									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,62	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan. 3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,62	0,62	100%	1.034.056.000	100,00%	0,62	682.084.495	100,00%	65,96%	TERCAPAI	1. Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan. 2. Melanjutkan proses pembangunan terminal yang masih belum selesai.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	105	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	105	105	100%	500.000.000	100,00%	108	165.179.337	102,86%	33,04%	TERCAPAI	Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu konsistensi jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	12	Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	12	12	100%	259.859.000	100,00%	12	207.401.486	100,00%	79,81%	TERCAPAI	1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	81	81	100%	-	100,00%	95,26	-	117,60%	-	TERCAPAI	Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan meningkatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,7	Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53,7	53,7	100%	539.957.000	100,00%	59,02	202.086.817	109,91%	37,43%	TERCAPAI	Mengoptimalkan fasilitas yang ada pada Terminal Tipe A	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,6	1. Bimbingan teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan 2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	78,6	78,6	100%	486.926.000	100,00%	81,75	486.235.982	104,01%	99,86%	TERCAPAI	Meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Pencegahan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak kedua 5. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	25	25	100%	16.578.729.000	100,00%	25,25	10.025.918.102	99%	60,47%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM); 2. Sudah terdapat konsep outlook UPPKB; 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR. DRJ. 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Sudah terdapat konsep Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Pelayanan UPPKB untuk dapat memenuhi capaian target persentase pelanggaran; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736; 7. Melakukan pengawasan kepada Satpel UPPKB melalui adanya pelaporan data penimbangan secara periodik setiap bulan.	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-8				REALISASI BULAN-8		% CAPAIAN BULAN-8		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN					
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK.1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88	1. Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana 2. FGD Pedoman Rancang Bangun dan Penyusunan Standar Biaya Operasional Terminal 3. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor 4. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 5. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor 7. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 8. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 9. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan 10. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBu Prasarana Transportasi Jalan 11. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta 12. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ 13. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan 14. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri 15. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PODA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi 16. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 17. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan 18. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 19. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A dan UPRKB di Pulau Jawa 20. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait 21. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBu) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) 22. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBu) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) 23. Penyusunan Preliminary Studi KPBu Transit Sistem dan ITS IKN 24. Penyusunan Preliminary Studi KPBu Urban Consolidation Centre IKN 25. Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Umum Massal Perkotaan di KIPP IKN (Tahap 1) 26. Penyediaan Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran, Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 27. Penyusunan Feasibility Study (FS) Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Simpul Kereta Cepat Jakarta-Bandung	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	88	88	100%	22.568.075.000	100,00%	83	12.176.102.774	94,32%	53,95%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK.1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73	1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	73	73	100%	6.657.588.000	100,00%	75,26	2.908.481.521	103,10%	43,69%	TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subbag Tata Usaha

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2023**

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-9				REALISASI BULAN-9		% CAPAIAN BULAN-9		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN				
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,62	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan. 3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0,62	0,62	100%	1.034.056.000	100,00%	0,62	802.479.655	100,00%	77,61%	TERCAPAI	Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	105	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	105	105	100%	500.000.000	100,00%	108	193.938.737	102,86%	38,79%	TERCAPAI	Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu konsistensi jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	12	Survei Pendataan dan Inventarisasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	12	12	100%	259.859.000	100,00%	12	207.401.486	100,00%	79,81%	TERCAPAI	1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasionalis; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	81	81	100%	-	100,00%	97,54	-	120,42%	-	TERCAPAI	Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengingatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,7	Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	53,7	53,7	100%	539.957.000	100,00%	59,02	223.799.817	109,91%	41,45%	TERCAPAI	Mengoptimalkan fasilitas yang ada pada Terminal Tipe A	Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,6	1. Bimbingan teknis Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan 2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	78,6	78,6	100%	486.926.000	100,00%	81,75	486.235.982	104,01%	99,86%	TERCAPAI	Meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
3	SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak kedua 5. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	25	25	100%	16.578.729.000	100,00%	24,99	9.458.335.177	100,04%	57,05%	TERCAPAI	Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM) 2. Sudah terdapat outlook UPPKB 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Pedirjen Hubdat No PR DIRJID 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Pedirjen SK.736;	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-9				REALISASI BULAN-9		% CAPAIAN BULAN-9		EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB		
								TARGET KINERJA		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN					
								volume	%	volume	%	Volume	Volume	%	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	BKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88	1. Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana 2. FGD Pedoman Rancang Bangun dan Penyusunan Standar Biaya Operasional Terminal 3. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor 4. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 5. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor 7. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 8. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 9. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan 10. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan 11. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta 12. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ 13. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan 14. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri 15. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi 16. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 17. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan 18. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 19. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A dan UPPKB di Pulau Jawa 20. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait 21. Pendampingan Transaksi Proyekti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) 22. Pendampingan Transaksi Proyekti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subling) 23. Penyusunan Preliminary Studi KPBU Transit Sistem dan ITS IKN 24. Penyusunan Preliminary Studi KPBU Urban Consolidation Centre IKN 25. Penyusunan Dokumen Perencanaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Umum Massal Perkotaan di KIPP IKN (Tahap 1) 26. Penyediaan Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran, Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 27. Penyusunan Feasibility Study (FS) Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Simpul Kereta Cepat Jakarta-Bandung	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	88	88	100%	22.568.075.000	100,00%	84	15.761.994.623	95,45%	69,84%	BELUM TERCAPAI	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	SK1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	BKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73	1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	73	73	100%	6.657.588.000	100,00%	75,39	3.664.458.990	103,27%	55,04%	TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subbag Tata Usaha

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			FASILITAS					
			PRASARANA TRANSPORTASI JALAN					
			Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan Terminal & Faspim)
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba			Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Danau Toba (TA. 2022)	1	1
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang					
	3	3	KSPN Borobudur	1. Terminal Purworejo 2. Terminal Tidar	1	1. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang (TA. 2020) 2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo (TA. 2020) 3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten (TA. 2020) 4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga (TA. 2020) 5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta (TA. 2020)	1	1
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru	3. Terminal Pandaan Pasuruan 4. Terminal Banyuwangga - Kota Probolinggo	1			1
	5	5	KSPN Mandalika	5. Terminal Mandalika - Kota Mataram	1	1. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021) 2. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD untuk mendukung penyelenggaraan Moto GP)	1	1
	6	6	KSPN Lab Bajo			12. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Lab Bajo	1	1
	7	7	KSPN Likupang	6. Terminal Liwas	1			1
	8	8	KSPN Wakatobi					
	9	9	KSPN Morotai					
	10	10	KSPN Raja Ampat					
9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei					
	12	2	KI Galang Batang					
	13	3	KI Bintan Aerospace					
	14	4	KI Sadai					
	15	5	KI Ketapang					
	16	6	KI Surya Borneo					
	17	7	KI Palu	7. Terminal Mambo, Kota Palu	1			1
	18	8	KI Teluk Weda					
	19	9	KI Teluk Bintuni					

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			FASILITAS					
			PRASARANA TRANSPORTASI JALAN					
			Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan Terminal & Faspim)
8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	20	1	KPBPB Sabang					
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe	8. Terminal Paya Ilang, Kota Lhokseumawe	1			1
	22	3	KPBPB Batam Bintang Karimun					
	23	4	KEK Tanjung Lesung	9. Terminal Labuan, Kab. Pandeglang	1			1
	24	5	KEK Mandalika*					
	25	6	KEK MBTK	10. Terminal Samarinda Seberang, Kota Samarinda	1. TBI Entikong - Prov. Kalbar	1		1
	26	7	KEK Bitung	11. Terminal Tangkoko, Kota Bitung	1			1
	27	8	KEK Morotai					
	28	1	Banda Aceh	12. Terminal Bato, Kota Banda Aceh	1			1
	29	2	Mebidangrov (Medan dsk)	13. Terminal Amplas, Kota Medan 14. Terminal Pinang Baris, Kota Medan	1			1
	30	3	Padang dsk	15. Terminal Anak Air, Kota Padang	1			1
	31	4	Pekanbaru	16. Terminal Bandaraya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru	1	Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021)	1	1
	32	5	Dumai	17. Terminal Dumai, Kota Dumai	1			1
	33	6	Batam					
	34	7	Jambi	18. Terminal Alam Barajo, Kota Jambi	1			1
	35	8	Pelembang dsk	19. Terminal Alang-alang Lebar, Kota Palembang, 20. Terminal Karya Jaya, Kota Palembang	1	Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang (TA. 2020)	1	1
	36	9	Bengkulu	21. Terminal Air Sebakul	1			1
	37	10	Pangkal Pinang					
	38	11	Bandar Lampung	22. Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung	1			1
	39	12	Jabodetabek	23. Terminal Kampung Rambutan, Kota Jakarta Timur 24. Terminal Kalideres, Kota Jakarta Barat 25. Terminal Baranangsiang, Kota Bogor 26. Terminal Jatijajar, Kota Depok 27. Terminal Induk Bekasi, Kota Bekasi 28. Terminal Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan 29. Terminal Poris Plawad, Kota Tangerang	1			1
	40	13	Serang	30. Terminal Pakupatan, Kota Serang	1			1

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS				
				PRASARANA TRANSPORTASI JALAN				
				Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan Terminal & Faspim)
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	41	14	Cilegon	31. Terminal Merak, Kab. Cilegon		1		1
	42	15	Bandung Raya	32. Terminal Cicaheum, Kota Bandung 33. Terminal Leuwi Panjang, Kota Bandung		1		1
	43	16	Cirebon	34. Terminal Harjamukti, Kota Cirebon		1		1
	44	17	Surakarta	35. Terminal Tirtonadi, Kota Solo		1	Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta (TA. 2020)	1
	45	18	Kedungsepur (Semarang dsk)	36. Terminal Mangkang, Kota Semarang 37. Terminal Bawen, Kab. Semarang 38. Terminal Tingkir, Kota Salatiga		1		1
	46	19	Cilacap	39. Terminal Bangga Mbangun Desa		1		1
	47	20	Yogyakarta	40. Terminal Giwangan		1		1
	48	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	41. Terminal Osowilangun, Kota Surabaya 42. Terminal Purabaya, Kab. Sidoarjo		1		1
	49	22	Malang	43. Terminal Arjosari, Kota Malang		1		1
	50	23	Sarbagita	44. Terminal Mengwi, Kab. Badung		1	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Perkotaan Skema Buy The Service di Denpasar (dukungan G20 TA. 2022)	1
	51	24	Mataram Raya	Terminal Mandalika - Kota Mataram		1		1
	52	25	Kupang	45. Terminal Bimoku	2. TBI Motamasin - Prov. NTT, 3. TBI Wini - Prov. NTT	1		1
	53	26	Pontianak					
	54	27	Palangkaraya	46. Terminal W.A Gara		1		1
	55	28	Banjarmasin dsk					
	56	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang	47. Terminal Batu Ampar, Kota Balikpapan 48. Terminal Samarinda Seberang, Kota Samarinda		1		1
	57	30	Tarakan					
	58	31	Gorontalo	49. Terminal Isimu, Kab. Gorontalo 50. Terminal Duingingi, Kota Gorontalo		1		1
	59	32	Manado	Terminal Liwas		1		1
	60	33	Bitung	Terminal Tangkoko		1		1
	61	34	Palu	Terminal Mamboro		1		1
	62	35	Mammasata (Makassar dsk)	51. Terminal Daya, Kota Makassar		1		1
	63	36	Kendari	52. Terminal Puuwatu, Kota Kendari		1		1
	64	37	Ambon					
	65	38	Ternate					
	66	39	Sorong					
	67	40	Timika					

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL				FASILITAS					
				PRASARANA TRANSPORTASI JALAN					
				Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan Terminal & Faspim)
	68	41	Jayapura	53. Terminal Entrop, Kota Jayapura		1			1
	69	42	Merauke						
				41			8		43

*untuk lokasi yang tidak ada nomor = 1 terminal melayani 2 kawasan

$$\text{Realisasi (Rasio)} = \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun}(n)(10 \text{ DPP, } 9 \text{ KI, } 8 \text{ KEK, } 42 \text{ PKN}) \text{ yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional (10 DPP, } 9 \text{ KI, } 8 \text{ KEK, } 42 \text{ PKN) yang ditetapkan}}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \quad \text{Capaian Rasio Konektivitas} = \frac{43 \text{ wilayah (irisan simpul TTA \& faspim yang terlayani)}}{69 \text{ wilayah KSN}} = 0,62$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,62}{0,61} \times 100\% = 101,64\%$$

Jumlah Kawasan yang telayani Terminal	Jumlah KSN yg terlayani Terminal Tipe A / Jumlah KSN (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN = 69 Wilayah)	41
Rasio Kawasan yang terlayani terminal		0,59
Jumlah Kawasan yang telayani Faspim	Jumlah KSN yg terlayani Faspim / Jumlah KSN (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN = 69 Wilayah)	8
Rasio Kawasan yang terlayani Faspim		0,12
Jumlah Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan)	Jumlah KSN terlayani Simpul Prasarana Transportasi Jalan / Jumlah KSN (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN = 69 Wilayah)	43
Rasio Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan)		0,62

**CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERIODE JANUARI S.D SEPTEMBER 2023**

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI									
		TARGET SESUAI RENSTRA 2023	TARGET SESUAI PK 2023	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023	Apr-23	Mei 2023	Junl 2023	Juli 2023	Agt 2023	Sep-23	
SK 01. Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi													
IKK 2 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	lokasi	111	105	105	105	105	106	107	107	107	108	108	
Terminal Penumpang Tipe A kewenangan Ditjen Hubdat													
1 Terminal Langsa		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2 Terminal Uthokseumawe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3 Terminal Meulaboh		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4 Terminal Batah		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5 Terminal Paya Ilang		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6 Terminal Tanjung Pinggir		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7 Terminal Madya Tarutung		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8 Terminal Sibolga		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9 Terminal Padang Bulan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Terminal Ampas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11 Terminal Pinang Baris		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12 Terminal Anak Air		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13 Terminal Kiliran Joo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14 Terminal Boreh Solak		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15 Terminal Simpang Aur		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
16 Terminal Jati Pariaman		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17 Terminal Bangkinana		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18 Terminal Payung Sekel		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
19 Terminal Duml		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20 Terminal Gebangari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 Terminal Alam Barajo		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22 Terminal Muara Bangso		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
23 Terminal Pulau Tuh Bangko		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
24 Terminal Sribulan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
25 Terminal Alang-Alang Lebar		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26 Terminal Kayuagung		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
27 Terminal Batu Kuning		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
28 Terminal Betung		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
29 Terminal Karya Jaya		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
30 Terminal Simpang Peruk		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
31 Terminal Batay		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
32 Terminal Simpang Nangka		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
33 Terminal Air Sebakul		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Terminal Rajabasa		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
35 Terminal Betan Subing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Terminal Pakupatan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
37 Terminal Labuan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
38 Terminal Mandala Lebak		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
39 Terminal Merak		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
40 Terminal KH. Ahmad Sanusi		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
41 Terminal Cioakar		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
42 Terminal Guntur Melati Garut		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
43 Terminal Harjamukti		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
44 Terminal Indihana		1	1										

[illegible]

IKK Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda s.d September 2023

Persentase penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dengan target penyediaan fasilitas pendukung sampai dengan tahun 2023 ada sebanyak 12 lokasi. Penyediaan fasilitas pendukung tersebut sudah terealisasi di 12 (dua belas) lokasi, antara lain:

1. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang (TA. 2020)
2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo (TA. 2020)
3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten (TA. 2020)
4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga (TA. 2020)
5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta (TA. 2020)
6. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang (TA. 2020)
7. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021)
8. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021 dan 2022 untuk mendukung penyelenggaraan Moto GP Tahun 2022)
9. Pembangunan Fasilitas Pendukung di KSPN Danau Toba (TA. 2022)
10. Pembangunan Fasilitas Pendukung di KSPN Borobudur (TA. 2022)
11. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Lab Bajo (TA. 2022)
12. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Perkotaan Skema Buy The Service di Denpasar (dukungan G20 TA. 2022)

SATUAN KERJA	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT
Satpel TTA Leuwi Panjang									
Kayuagung	100,00			97,05					
Surodakan	100,00	100,00	100,00	99,86	99,81	100,00			
Liwas									
Simpang Nangka	88,28	98,13		90,63	97,94	97,37			
Kiliran Jao						95,18			
Induk Lumpue									
Jati	91,25				92,50	90,63			
Lebak		84,30	88,28			98,13			
Ciakar									
Tidar		93,03	94,56	93,79	95,28	92,44			
Batu Kuning		99,06							
Pakupatan	94,81	95,01	97,49	96,14	98,24	96,57			
Tangkoko	99,24	99,39	99,50	99,83	99,57	99,55			
Labuan	92,67		97,32	99,06	98,02				
Arya Wiraraja			100,00	97,88	98,61	98,79			
Payung Sekaki									
Tipalayo									
Bawen	91,27	92,26	92,56	93,83	97,53	92,64			
Induk Pemalang	94,92	94,31	94,13	94,24	98,13	91,88			
Bobot Sari	97,55	95,39	96,39	97,54	97,04	98,13			
Karya Jaya			94,09	95,74	92,71	95,00			
Kebumen	94,22		93,73	94,67	92,99	94,29			
Sibolga			94,38	90,31	93,96	96,04			
Lahat	92,13		88,13	100,00	85,00	96,25			
Purwokerto	91,25	93,59	90,92	90,60	92,72	85,80			
Purworejo			93,55	92,92	91,51	93,72			
Bangga Bangun Desa	94,38		88,74	93,60	93,29	94,72			
Pekalongan		92,10	91,45	92,48	92,78	92,03			
TTM									
Tirtonadi		97,31	96,48	97,51	97,19	96,81	96,68		
Dumai									
Botoh									
Rajabasa		88,48	85,00	76,56	92,88	95,78			
Kayu Agung		95,31	95,00		96,81	92,19			
Merak		87,34							
Banjar									
Giawangan									
Mendolo		90,46	94,24	93,97	92,83	94,41			
Wa Gara			95,48						
Latenri Sessu Pakkae									
Baroko									
TOTAL	93,69	94,80	93,64	95,14	94,21	93,19	97,04	95,26	97,54

**CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERIODE JANUARI S.D SEPTEMBER 2023**

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI								
		TARGET SESUAI RENSTRA 2023	TARGET SESUAI PK 2023	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023	Apr-23	Mei 2023	Junl 2023	Julul 2023	Agt 2023	Sep-23
4368 Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat												
SK 02 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat												
IKK 2 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Nilai	53,70	53,70	59,02	59,02	59,02	59,02	59,02	59,02	59,02	59,02	59,02
1 Terminal Longsa	Nilai	71	71	65	65	65	65	65	65	65	65	65
2 Terminal Lhokseumawe	Nilai	25	25	51	51	51	51	51	51	51	51	51
3 Terminal Meulaboh	Nilai	46	46	40	40	40	40	40	40	40	40	40
4 Terminal Batoah	Nilai	43	43	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5 Terminal Paya Ilang	Nilai	34	34	62	62	62	62	62	62	62	62	62
6 Terminal Tanjung Pinagir	Nilai	38	38	91	91	91	91	91	91	91	91	91
7 Terminal Madya Tarutung	Nilai	31	31	55	55	55	55	55	55	55	55	55
8 Terminal Sibolga	Nilai	17	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9 Terminal Padang Bulan	Nilai											
10 Terminal Amplas	Nilai	46	46	76	76	76	76	76	76	76	76	76
11 Terminal Pinang Baris	Nilai	21	21	61	61	61	61	61	61	61	61	61
12 Terminal Anak Air	Nilai	40	40	43	43	43	43	43	43	43	43	43
13 Terminal Kiliran Joo	Nilai	33	33	24	24	24	24	24	24	24	24	24
14 Terminal Boreh Solok	Nilai	37	37	28	28	28	28	28	28	28	28	28
15 Terminal Simpang Aur	Nilai	33	33	25	25	25	25	25	25	25	25	25
16 Terminal Jati Parliman	Nilai	43	43	62	62	62	62	62	62	62	62	62
17 Terminal Bangkinang	Nilai	59	59	66	66	66	66	66	66	66	66	66
18 Terminal Payang Sekaki	Nilai	40	40	52	52	52	52	52	52	52	52	52
19 Terminal Dumai	Nilai	70	70	39	39	39	39	39	39	39	39	39
20 Terminal Garbanasari	Nilai											
21 Terminal Alam Baraja	Nilai	21	21	49	49	49	49	49	49	49	49	49
22 Terminal Muara Bungo	Nilai	60	60	37	37	37	37	37	37	37	37	37
23 Terminal Pulau Tuhj Bangko	Nilai	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
24 Terminal Sribulan	Nilai	57	57	39	39	39	39	39	39	39	39	39
25 Terminal Alang-Alang Lebor	Nilai	57	57	69	69	69	69	69	69	69	69	69
26 Terminal Kayuagung	Nilai	35	35	51	51	51	51	51	51	51	51	51
27 Terminal Batu Kuning	Nilai	50	50	23	23	23	23	23	23	23	23	23
28 Terminal Betuna	Nilai			48	48	48	48	48	48	48	48	48
29 Terminal Karya Jaya	Nilai	71	71	40	40	40	40	40	40	40	40	40
30 Terminal Simpang Peruk	Nilai	26	26	53	53	53	53	53	53	53	53	53
31 Terminal Batay	Nilai	12	12	15	15	15	15	15	15	15	15	15
32 Terminal Simpang Nangka	Nilai	40	40	53	53	53	53	53	53	53	53	53
33 Terminal Air Sebakul	Nilai											
34 Terminal Rajabasa	Nilai	36	36	65	65	65	65	65	65	65	65	65
35 Terminal Betan Subing	Nilai											
36 Terminal Pakupatan	Nilai	57	57	48	48	48	48	48	48	48	48	48
37 Terminal Labuan	Nilai	29	29	53	53	53	53	53	53	53	53	53
38 Terminal Mandala Lebak	Nilai	83	83	90	90	90	90	90	90	90	90	90
39 Terminal Marak	Nilai	72	72	63	63	63	63	63	63	63	63	63
40 Terminal KH. Ahmad Sanusi	Nilai	61	61	54	54	54	54	54	54	54	54	54
41 Terminal Cikar	Nilai	49	49	59	59	59	59	59	59	59	59	59
42 Terminal Guntur Melati Garut	Nilai	46	46	66	66	66	66	66	66	66	66	66
43 Terminal Harjumukti	Nilai	72	72	66	66	66	66	66	66	66	66	66
44 Terminal Indihiana	Nilai	56	56	76	76	76	76	76	76	76	76	76
45 Terminal Kertawangunan	Nilai	59	59	67	67	67	67	67	67	67	67	67
46 Terminal Subang	Nilai	96	96	94	94	94	94	94	94	94	94	94
47 Terminal Banjar	Nilai	90	90	98	98	98	98	98	98	98	98	98
48 Terminal Cikampek	Nilai	60	60	19	19	19	19	19	19	19	19	19
49 Terminal Cicaheum	Nilai											
50 Terminal Lestuwipanjang	Nilai	44	44	83	83	83	83	83	83	83	83	83
51 Terminal Purworejo	Nilai	50	50	98	98	98	98	98	98	98	98	98
52 Terminal Cepu	Nilai	46	46	72	72	72	72	72	72	72	72	72
53 Terminal Bangga Mbanqun Desa	Nilai	46	46	58	58	58	58	58	58	58	58	58
54 Terminal Giri Adipura	Nilai	75	75	72	72	72	72	72	72	72	72	72
55 Terminal Ir. Soekarno	Nilai	64	64	69	69	69	69	69	69	69	69	69
56 Terminal Kebumen	Nilai	41	41	92	92	92	92	92	92	92	92	92
57 Terminal Mangkang	Nilai	53	53	61	61	61	61	61	61	61	61	61
58 Terminal Pekalongan	Nilai	70	70	59	59	59	59	59	59	59	59	59
59 Terminal Induk Pemalang	Nilai	45	45	75	75	75	75	75	75	75	75	75
60 Terminal Bulupitu Purwokerto	Nilai	38	38	76	76	76	76	76	76	76	76	76
61 Terminal Mendolo	Nilai	64	64	34	34	34	34	34	34	34	34	34
62 Terminal Bowen	Nilai	47	47	51	51	51	51	51	51	51	51	51
63 Terminal Tidar	Nilai	83	83	59	59	59	59	59	59	59	59	59
64 Terminal Tinakir	Nilai	26	26	66	66	66	66	66	66	66	66	66
65 Terminal Tintonadi	Nilai	100	100	98	98	98	98	98	98	98	98	98
66 Terminal Jati	Nilai	76	76	60	60	60	60	60	60	60	60	60
67 Terminal Bobot Sari	Nilai	75	75	28	28	28	28	28	28	28	28	28
68 Terminal Demak	Nilai											
69 Terminal Tegal	Nilai	52	52	62	62	62	62	62	62	62	62	62
70 Terminal Giwangan	Nilai	63	63	73	73	73	73	73	73	73	73	73
71 Terminal Dhoksinarga	Nilai	58	58	55	55	55	55	55	55	55	55	55
72 Terminal Arjosari	Nilai	86	86	84	84	84	84	84	84	84	84	84
73 Terminal Arya Wiraraja	Nilai	49	49	54	54	54	54	54	54	54	54	54
74 Terminal Bangkalan	Nilai											
75 Terminal Banyuwangga	Nilai	73	73	71	71	71	71	71	71	71	71	71
76 Terminal Gayatri	Nilai	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
77 Terminal Kartonegoro	Nilai	50	50	57	57	57	57	57	57	57	57	57
78 Terminal Pacitan	Nilai	47	47	77	77	77	77	77	77	77	77	77
79 Terminal Patria	Nilai	47	47	85	85	85	85	85	85	85	85	85
80 Terminal Purbaya	Nilai	54	54	60	60	60	60	60	60	60	60	60
81 Terminal Selo Aji	Nilai	82	82	95	95	95	95	95	95	95	95	95
82 Terminal Tamanan	Nilai	50	50	36	36	36	36	36	36	36	36	36
83 Terminal Tawangalun	Nilai	82	82	75	75	75	75	75	75	75	75	75
84 Terminal Surodakan	Nilai	54	54	90	90	90	90	90	90	90	90	90
85 Terminal Rajekwesi	Nilai	87	87	76	76	76	76	76	76	76	76	76
86 Terminal Pandaan Pasuruan	Nilai	78	78	94	94	94	94	94	94	94	94	94
87 Terminal Kambang Putih	Nilai	55	55	45	45	45	45	45	45	45	45	45
88 Terminal Sri Tanihna	Nilai											
89 Terminal Osowilangun	Nilai											
90 Terminal Pucabaya	Nilai			47	47	47	47	47	47	47	47	47
91 Terminal Menawi	Nilai	54	54	67	67	67	67	67	67	67	67	67
92 Terminal Mandalika	Nilai	61	61	59	59	59	59	59	59	59	59	59
93 Terminal Sumer Payuna	Nilai	70	70	54	54	54	54	54	54	54	54	54
94 Terminal Dara	Nilai	45	45	44	44	44	44	44	44	44	44	44
95 Terminal Kefamenanu	Nilai											
96 Terminal Bimoku	Nilai											
97 Terminal Sei Ambawang	Nilai	78	78	72	72	72	72	72	72	72	72	72
98 Terminal Singkawang	Nilai											
99 Terminal W.A. Gara	Nilai	54	54	89	89	89	89	89	89	89	89	89
## Terminal Gambut Barakat	Nilai	76	76	64	64	64	64	64	64	64	64	64
## Terminal Batu Ampar	Nilai	37	37	62	62	62	62	62	62	62	62	62
## Terminal Samarinda Seberang	Nilai	34	34	77	77	77	77	77	77	77	77	77
## Terminal Induk Lumpeu	Nilai	26	26	67	67	67	67	67	67	67	67	67
## Terminal Latenri Sessu Pekkaa	Nilai	32	32	35	35	35	35	35	35	35	35	35
## Terminal Petta Pongawai	Nilai	73	73	54	54	54	54	54	54	54	54	54
## Terminal Daya	Nilai											
## Terminal Sonaka Palopo	Nilai											
## Terminal Simbuang	Nilai	54	54	83	83	83	83	83	83	83	83	83
## Terminal Tipalaya	Nilai	63	63	50	50	50	50	50	50	50	50	50
## Terminal Kolinbaru	Nilai	23	23	38	38	38	38	38	38	38	38	38
## Terminal Mamboro	Nilai	37	37	50	50	50	50	50	50	50	50	50
## Terminal Boroko	Nilai	36	36	54	54	54	54	54	54	54	54	54
## Terminal Uluas	Nilai			20	20	20	20	20	20	20	20	20
## Terminal Inanikako	Nilai	25	25	44	44	44	44	44	44	44	44	44

[illegible]

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
PERIODE JANUARI S.D SEPTEMBER 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET		REALISASI									
		TARGET SESUAI RENSTRA 2023	TARGET SESUAI PK 2023	Januari 2023	Februari 2023	Maret 2023	Apr-23	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agt 2023	Sep-23	
4368 Kegiatan Pelayanan Transportasi Darat													
SK 02 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat													
IKK 3 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	78,60	78,60	82,61	82,61	82,61	82,53	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75	81,75
- Persentase terminal yang melaporkan data produksi di SIASATI	%	96,12	96,12	109,62	109,62	109,62	109,52	108,49	108,49	108,49	108,41	108,41	108,41
- Persentase pengadaan mesin check in ticket	%	51,46	51,46	7,69	7,69	7,69	7,62	7,55	7,55	7,55	8,41	8,41	8,41
- Persentase penerapan TOS	%	51,46	51,46	4,81	4,81	4,81	4,76	4,72	4,72	4,72	4,67	4,67	4,67

**Rekapitulasi Persentase Pelanggaran Angkutan Barang pada UPPKB s.d
September Tahun 2023**

Bulan	Masuk UPPKB	Melanggar	Tidak Melanggar	Presentase Pelanggaran
Januari	172.917	52.305	120.612	30,25%
Februari	175.305	52.884	122.421	30,17%
Maret	210.591	66.744	143.847	31,69%
April	107.671	36.620	71.051	33,99%
Mei	196.558	63.587	120.612	32,35%
Juni	189.201	55.650	133.551	29,41%
Juli	221.796	57.766	164.030	26,04%
Agustus	224.100	56.578	167.522	25,25%
September	218.964	54.724	164.240	24,99%
Oktober				#DIV/0!
November				#DIV/0!
Desember				#DIV/0!
Total				#DIV/0!



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021)3506138,
3506129,3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202,3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

NOTA DINAS

Nomor: ~~MD-295/PTB/X/2023~~

Yth : Plt. Direktur Prasarana Transportasi Jalan
Dari : Kasubdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
Hal : Laporan Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang pada UPPKB Bulan
September Tahun 2023
Tanggal : 6 Oktober 2023

Dengan hormat, bersama ini kami laporkan hasil pengawasan kendaraan angkutan barang di seluruh BPTD pada UPPKB bulan September 2023 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 567 Tahun 2022 tentang Pengoperasian Fasilitas Penimbangan di seluruh Indonesia, terdapat 82 (delapan puluh dua) UPPKB yang ditetapkan beroperasi yang berada di seluruh BPTD.
2. Pada bulan September 2023, terdapat 9 dari 82 UPPKB tidak dioperasikan sementara waktu karena beberapa alasan diantaranya:
 - a. Keterbatasan SDM dan dalam proses koordinasi dengan Setditjen untuk pemenuhan SDM pada:
 - 1) UPPKB Talun, Provinsi Jawa Timur, hanya terdapat SDM sebanyak 2 (dua) orang sebagai penjaga aset;
 - 2) UPPKB Klakah, Provinsi Jawa Timur, hanya terdapat SDM sebanyak 5 (lima) orang sebagai penjaga aset.
 - b. Sedang proses rehabilitasi, dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2023:
 - 1) UPPKB Aek Batu;
 - 2) UPPKB Pelawan Sarolangun;
 - 3) UPPKB Cimanuk;
 - 4) UPPKB Cikande
 - 5) UPPKB Wanareja;
 - 6) UPPKB Guyangan.
 - c. Kendala teknis karena terjadi kerusakan pada komputer server JTO akibat cuaca buruk di UPPKB Sibolangit dan dalam proses koordinasi dengan BPTD terkait;

3. Pada bulan September 2023, sebanyak 218.964 kendaraan diperiksa di UPPKB dengan rincian sebesar 54.724 (24,99%) kendaraan melanggar dan 164.240 (75,01%) kendaraan tidak melanggar.
4. Jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah pelanggaran daya angkut/kelebihan muatan, yaitu sebanyak 33.943 (62%) kendaraan dengan mayoritas kendaraan kelebihan muatan di atas 5% - 20% berat muatan yang diizinkan, serta pelanggaran dokumen sebanyak 23.465 (43%) kendaraan.
5. Rata-rata pengawasan kendaraan angkutan barang di seluruh UPPKB sebesar 3,23% dibandingkan dengan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) kendaraan yang melintasi UPPKB dengan rincian sebagaimana terlampir.
6. Jumlah kendaraan yang diberikan penindakan baik melalui peringatan, tilang UPPKB maupun tilang kepolisian sebanyak 55.593 kendaraan dengan rincian sebagaimana terlampir.
7. Sanksi tambahan juga dilakukan pada 6.011 kendaraan (10,98% dari kendaraan melanggar) dengan rincian sebagaimana terlampir.
8. Jumlah BPTD yang telah melaksanakan tilang sebanyak 19 dari 27 BPTD, sedangkan transfer muatan baru dilakukan oleh 10 BPTD. Adapun BPTD yang belum melaksanakan penindakan dimaksud dikarenakan tidak ada PPNS, tidak memiliki kartu bukti lulus uji sebagai dasar, keterbatasan area parkir dan adanya kebijakan *soft law enforcement* sehingga penindakan ditekankan pada sosialisasi dan edukasi kepada pengemudi.
9. Permasalahan-permasalahan yang ada terkait penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor pada 82 UPPKB:
 - a. Kurangnya SDM pada UPPKB dan PPNS menyebabkan kinerja operasional di UPPKB belum optimal terutama terhadap kegiatan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar;
 - b. Fasilitas parkir terbatas atau kurang memadai;
 - c. Ketersediaan/kestabilan jaringan internet belum memadai;
 - d. Beberapa UPPKB belum konsisten menggunakan aplikasi JTO dan e-tilang;
 - e. UPPKB belum optimal beroperasi karena adanya kerusakan platform penimbangan.
10. Tindak lanjut terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor pada 82 UPPKB yaitu:
 - a. Permasalahan kekurangan SDM di UPPKB:
 - 1) BPTD dapat melakukan optimalisasi dan koordinasi dengan bagian Kepegawaian Setditjen untuk pemenuhan kebutuhan pegawai;
 - 2) Menambah usulan jumlah peserta diklat PPNS dan penguji kendaraan bermotor untuk pegawai UPPKB;
 - 3) Penggunaan teknologi informasi (WIM, Sensor dimensi, ANPR, CCTV, dan sistem JTO terintegrasi);
 - b. Penyediaan atau perluasan area parkir penindakan secara bertahap pada tiap UPPKB dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran.

- c. Mendorong BPTD dalam menyediakan dan peningkatan jaringan internet dengan kapasitas *bandwidth* minimal 50 Mbps;
- d. Melakukan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi terkait Pengoperasian UPPKB serta mendorong petugas UPPKB konsisten menggunakan Aplikasi JTO dan e-tilang;
- e. Melaporkan secara berkala kepada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terkait progress perbaikan platform penimbangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir kami sampaikan data pengawasan UPPKB bulan September Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan, mohon perkenan dan arahan lebih lanjut.



Eriza Putra
NIP. 19761029 200604 1 001 6



Laporan Pengawasan Angkutan Barang pada UPPKB

Periode: September 2023





Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor **KP-DRJD 567 Tahun 2022** tentang **Pengoperasian Fasilitas Penimbangan** di seluruh Indonesia, ditetapkan sebanyak 82 UPPKB yang beroperasi.



Pengoperasian UPPKB



Terdapat penghentian operasi sementara waktu pada 9 UPPKB karena beberapa alasan diantaranya:

a. Sedang proses rehabilitasi

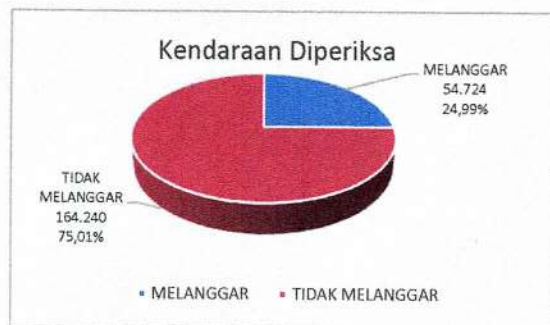
- UPPKB Aek Batu
- UPPKB Pelawan Sarolangun
- UPPKB Cikande
- UPPKB Cimanuk
- UPPKB Wanareja
- UPPKB Guyangan

b. Keterbatasan SDM

- UPPKB Talun, hanya terdapat SDM sebanyak 2 (dua) orang sebagai penjaga aset;
- UPPKB Klakah, hanya terdapat SDM sebanyak 5 (lima) orang sebagai penjaga aset.

c. **Kendala teknis** karena terjadinya kerusakan pada computer server JTO akibat cuaca buruk di UPPKB Sibolangit;

Jumlah Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang (KAB)



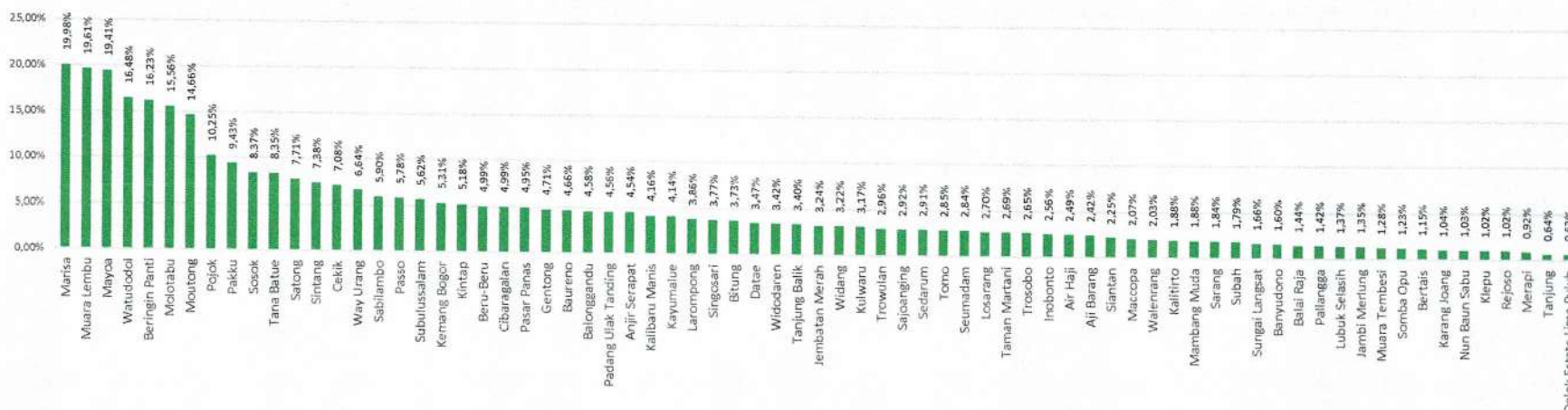
Selama periode bulan September 2023, sebanyak **218.964** kendaraan diperiksa di UPPKB dengan 24,99% diantaranya melakukan pelanggaran.

Sebanyak 33.943 (63%) kendaraan tercatat melanggar ketentuan daya angkut dan 23.465 (43%) kendaraan melanggar ketentuan dokumen.

Mayoritas kendaraan yang melanggar daya angkut, kelebihan muatannya di atas 5% sampai 20%.

Persentase Pemeriksaan KAB di tiap UPPKB

Persentase KAB yang diperiksa per LHR di UPPKB



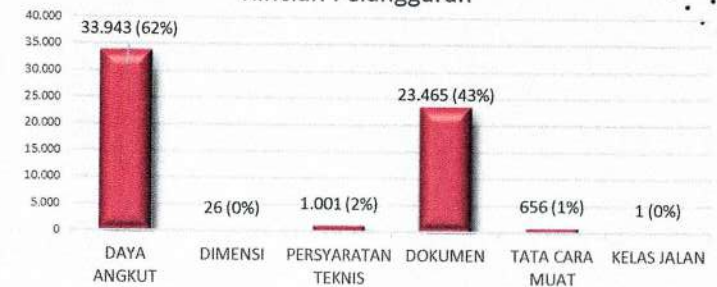
- UPPKB **Marisa, Muara Lembu, dan Mayoa** memiliki kinerja pengawasan yang baik karena berhasil memeriksa lebih dari 19% KAB yang melintas per harinya.
- UPPKB **Dolok Estate Lima Puluh, Tanjung, dan Merapi** perlu meningkatkan kinerjanya karena hanya memeriksa kurang dari 1% (rata-rata 1 dari 100) KAB yang melintas.

Rincian Jenis Pelanggaran per Wilayah BPTD

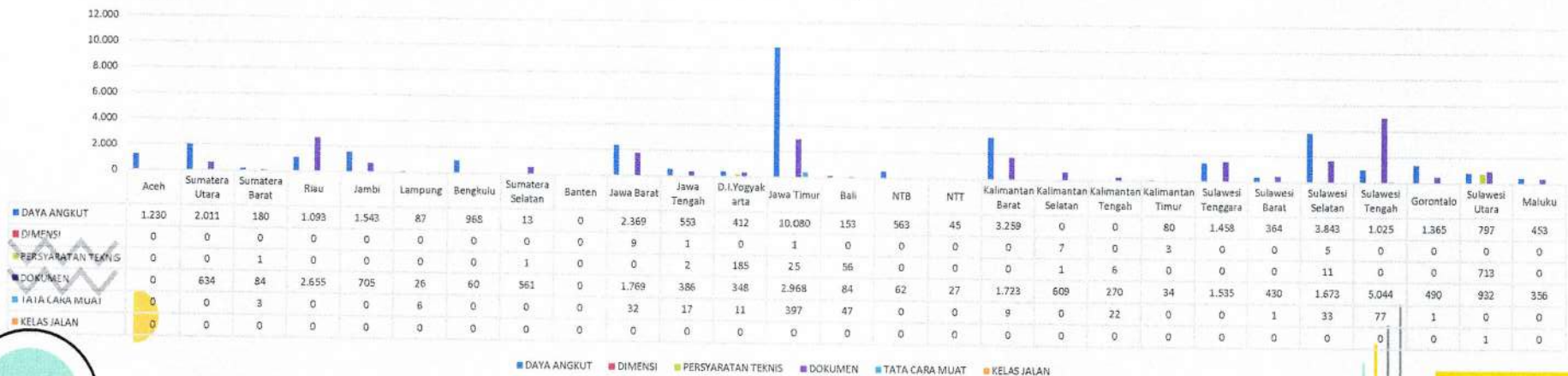
Mayoritas **daya angkut** menjadi jenis pelanggaran terbanyak di wilayah BPTD. Di Wilayah **Sulteng**, mayoritas KAB melanggar ketentuan dokumen.



Rincian Pelanggaran



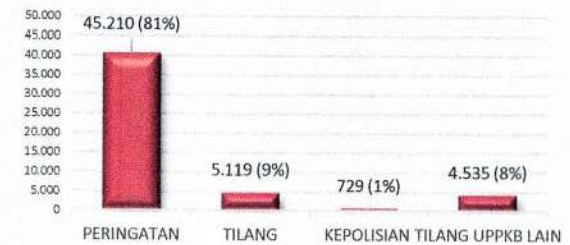
Jenis Pelanggaran tiap BPTD



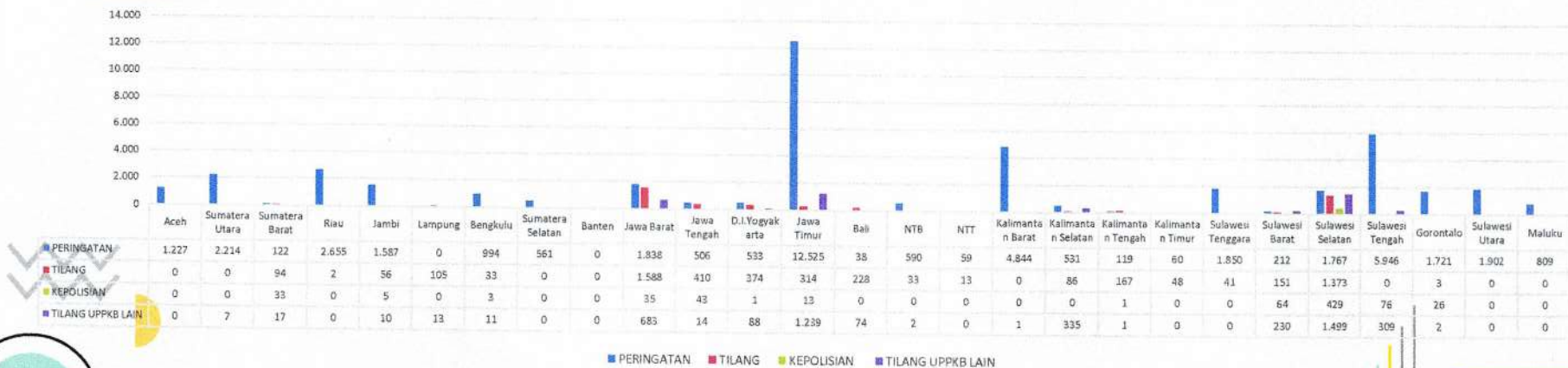
Rincian Penindakan per Wilayah BPTD

Mayoritas penindakan yang dilakukan adalah **peringatan**.

Rincian Penindakan



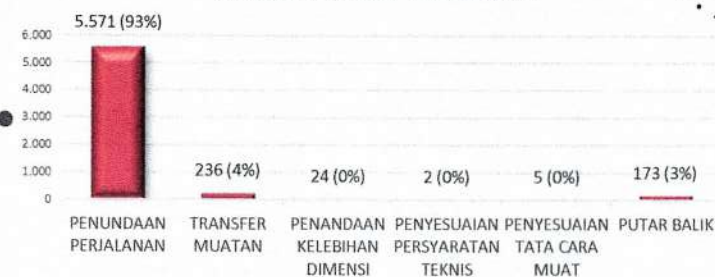
Jenis Penindakan tiap BPTD



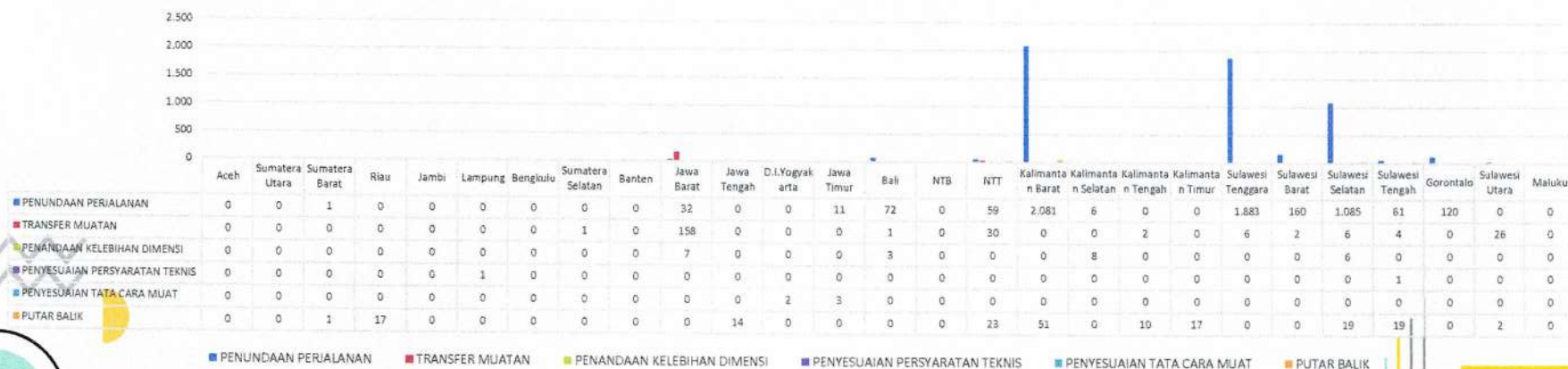
Rincian Sanksi Tambahan per Wilayah BPTD

UPPKB di wilayah BPTD daerah **Sulawesi** banyak melakukan sanksi tambahan untuk KAB pelanggar.

Rincian Sanksi Tambahan



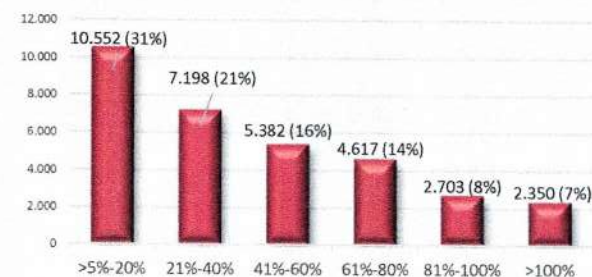
Sanksi Tambahan tiap BPTD



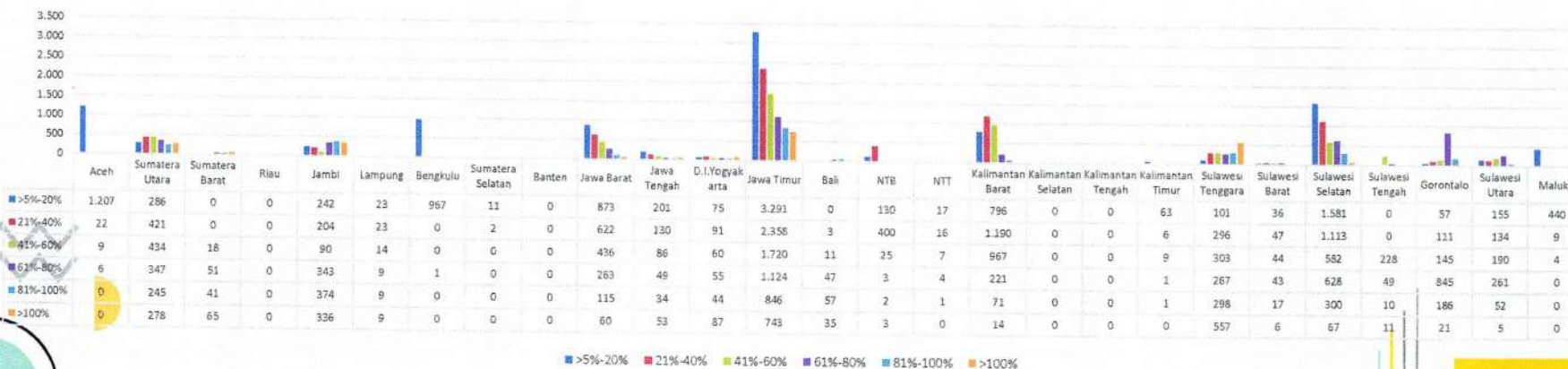
Rincian Kelebihan Muatan per Wilayah BPTD

Mayoritas pelanggaran daya angkut memiliki kelebihan muatan antara **5% sampai 20%**. BPTD Wil. **Jawa Barat** memiliki pelanggaran daya angkut terbanyak.

Kelebihan Muatan



Kelebihan Muatan tiap BPTD





Terimakasih



Realisasi IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat
periode September 2023

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	35%	
1	SAKIP	20%	
a	Rencana Strategis (Renstra)	4	4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥ 1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥ 1 Januari)		
c	Perjanjian Kinerja (PK)	3	3
	Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20		
d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20		
e	Input Aplikasi e-Performance	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-		
g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
2	Input Aplikasi e-Planning	15%	
a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	4
b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5	4
c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5	4
B	Indeks Profesionalisme ASN	35%	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5	8,5
2	Kompetensi	14	14
3	Kinerja	11	11
4	Disiplin	1,5	1,5
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan	30%	
1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	6
	Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap ≥ 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
	Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	2
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
		Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
	3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	10
		Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
		Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
		Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
		Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
		Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		
				84

Realisasi IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan periode Januari s.d September 2023

NO	URAIAN		BOBOT	HASIL PERHITUNGAN	NILAI	BULAN											
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon II	10%	70,0	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00			
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8%	70,0	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60			
	3	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7%	70,0	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90			
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	70,0	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50			
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%														
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20%	117,28	23,46	22,62	22,62	22,89	22,35	22,62	23,17	23,46	23,46	23,46			
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15%	66,67	10,00	9,64	9,64	9,76	9,53	9,64	9,88	10,00	10,00	10,00			
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15%	46,2	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93			
TOTAL NILAI					75,39	74,19	74,19	74,58	73,81	74,19	74,98	75,39	75,39	75,39	0,00	0,00	0,00

LAMPIRAN LMCK TRIWULAN III TAHUN 2023
TERKAIT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PADA DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

1. Lampiran 1_KM_109_TAHUN_2019 ttg Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A;
- 1a. PM_102_TAHUN_2018 ttg Penyelenggaraan Terminal Barang
2. Lampiran 2_KP 75 Tahun 2016 ttg Penlok Terminal Entikong
3. Lampiran 3_KM_44_TAHUN_2019 ttg Penlok Terminal Barang untuk Umum Nanga Badau
4. Lampiran 4_KM_45_TAHUN_2019 ttg Penlok Terminal Barang untuk Umum Aruk
5. Lampiran 5_KM_139_Tahun_2021 ttg Penlok Terminal Barang untuk Umum NTT & Papua (Motaain, Motamasin, Wini, Skouw)
6. Lampiran 6_Perpres Nomor 18 Tahun 2020 ttg RPJMN 2020 – 2024
7. Lampiran 7_Perpres Nomor 109 Tahun 2020 ttg Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
8. Lampiran 8_PM 80 Tahun 2020 ttg Renstra Kemenhub 2020-2024
9. PP_no._79_tahun_2013 ttg Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. PM_40_Tahun_2015 ttg Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang
11. PM_18_TAHUN_2021 ttg Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan PKB
12. PM_67_tahun_2021_Organisasi _ Tata Kerja Kemenhub_Pasal 158 _ 159_dan bagan hal 365
13. PM 17 TAHUN 2022 ttg Tata Kerja Kemenhub
14. KEPDIRJEN NO.KP-DRJD 9151 TAHUN 2022 ttg Pedoman Teknis Sistem Informasi Manajemen Terminal AJ

Dapat di download melalui link <https://intip.in/DasarHukumDPTJ2022>